



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PROGRAM RELOKASI MASYARAKAT  
DAN PENGARUHNYA TERHADAP *HUMAN SECURITY*  
(Studi Kasus Penertiban Daerah Aliran Sungai Ciliwung DKI Jakarta)**

**T E S I S**

**ARIFIN MUKHLIS, S.Sos  
NPM. 0806448283**

**PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS INDONESIA  
KAJIAN STRATEJIK KETAHANAN NASIONAL  
JAKARTA  
2010**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PROGRAM RELOKASI MASYARAKAT  
DAN PENGARUHNYA TERHADAP *HUMAN SECURITY*  
(Studi Kasus Penertiban Daerah Aliran Sungai Ciliwung DKI Jakarta)**

**T E S I S**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh  
Gelar Megister Sains (M.Si) Pada Program Study Kajian Ketahanan Nasional  
Pascasarjana Universitas Indonesia**

**ARIFIN MUKHLIS, S.Sos  
NPM. 0806448283**

**PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS INDONESIA  
KAJIAN STRATEJIK KETAHANAN NASIONAL  
JAKARTA  
2010**



**PASCASARJANA UNIVERSITAS INDONESIA  
PROGRAM STUDI PENGKAJIAN KETAHANAN NASIONAL**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Nama : Arifin Mukhlis. S.Sos  
NPM : 0806448283  
Kekhususan : Kajian Strategik Ketahanan Nasional  
Judul Tesis : **PROGRAM RELOKASI MASYARAKAT DAN  
PENGARUHNYA TERHADAP HUMAN SECURITY (Studi  
Kasus Penertiban Daerah Aliran Sungai Ciliwung DKI Jakarta)**

**Telah disetujui untuk diuji**

**PEMBIMBING I**

**Prof. Dr. Tb. Ronny Rahman Nitibaskara**

**PEMBIMBING II**

**Bantarto Bandoro, SH, MA**

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

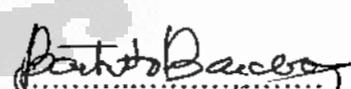
Nama : Arifin Mukhlis. S.Sos  
 NPM : 0806448283  
 Program Studi : Kajian Ketahanan Nasional  
 Judul Tesis : **PROGRAM RELOKASI MASYARAKAT DAN  
 PENGARUHNYA TERHADAP HUMAN SECURITY (Studi  
 Kasus Penertiban Daerah Aliran Sungai Ciliwung DKI Jakarta)**

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Megister Sains (M.Si) pada Program Studi Kajian Ketahanan Nasional, Pascasarjana Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Tb. Ronny R. Nitibaskara (.....) 

Anggota : 1. Dr. Amirsyah Sahil, S.E., M.Si (.....) 

2. Bantarto Bandoro, SH, MA (.....) 

Sekretaris : Dr. Amirsyah Sahil, S.E., M.Si (.....) 

Ditetapkan di : Jakarta  
 Hari / Tanggal : 2 Desember 2010  
 Pukul : 11.30 WIB.

## KATA PENGANTAR

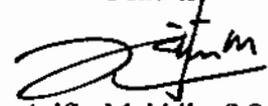
Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan Tesis ini. Penulisan Tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai Gelar Megister Sains (M.Si) pada Program Studi Kajian Ketahanan Nasional Pascasarjana Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan Tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikannya, oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada :

- (1) Prof. Dr. Tb. Ronny Rahman Nitibaskara selaku Ketua Program PKN UI, sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan Tesis ini.
- (2) Bapak Bantarto Bandoro, SH, M.Si, selaku Pembimbing II yang dengan teliti memeriksa, mengarahkan dan memberi masukan dalam penyusunan tesis ini.
- (3) Dr. Amirsyah Sahil, SE, M.Si selaku Sekretaris Program PKN UI sekaligus sebagai Dewan Penguji dalam pelaksanaan Sidang Tesis ini.
- (4) Seluruh Dosen PKN UI yang sejak awal kuliah telah memberikan gambaran kepada penulis tentang rencana penyusunan tesis sebagai tugas akhir yang harus dilaksanakan dalam mengikuti perkuliahan di Universitas Indonesia.
- (5) Seluruh Karyawan PKN UI yang telah sabar melayani agar penulis sukses dalam studi.
- (6) Rekan-rakan PKN UI Angkatan ke-27 yang telah memberi semangat dan masukan dalam memperkaya dimensi tesis ini.
- (7) Orang Tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan baik moril maupun materiil dalam proses penulisan hingga sampai penyelesaian Tesis ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga Tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Jakarta, 2 Desember 2010

Penulis



Arifin Mukhlis, S.Sos

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS  
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Arifin Mukhlis, S.Sos  
NPM : 0806448283  
Program Studi : Kajian Strategik Ketahanan Nasional  
Fakultas : Pascasarjana  
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**PROGRAM RELOKASI MASYARAKAT  
DAN PENGARUHNYA TERHADAP HUMAN SECURITY  
(Studi Kasus Penertiban Daerah Aliran Sungai Ciliwung DKI Jakarta)**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Jakarta

Pada tanggal : 2 Desember 2010

Yang menyatakan,



( Arifin Mukhlis, S.Sos )

## ABSTRAK

Nama : Arifin Mukhlis, S.Sos  
 NPM : 0806448283  
 Program Studi : Kajian Stratejik Ketahanan Nasional  
 Judul Tesis : **PROGRAM RELOKASI MASYARAKAT DAN PENGARUHNYA TERHADAP HUMAN SECURITY (Studi Kasus Penertiban Daerah Aliran Sungai Ciliwung DKI Jakarta)**

Daerah bantaran sungai Ciliwung tidak pernah lepas dari masalah banjir yang melanda apabila hujan deras mengguyur wilayah tersebut. Selama bertahun-tahun masyarakatnya hidup dengan kondisi demikian, dan fenomena banjir menjadi sesuatu yang dimaklumi oleh warga yang bermukim di bantaran sungai tersebut. Pemerintah beranggapan bahwa solusi terbaik bagi permasalahan ini adalah pemindahan seluruh warga dari wilayah banjir ke tempat yang lebih baik dan permanen yaitu Rumah Susun (Rusun). Untuk itu, pemerintah merencanakan program relokasi masyarakat agar penertiban permukiman di bantaran sungai Ciliwung dapat terlaksana dengan baik. Hal ini diperlukan, agar kegiatan normalisasi DAS Ciliwung dapat dilaksanakan untuk mengatasi banjir yang sering kali melanda wilayah DKI Jakarta.

Tidak mudah merelokasi warga hunian bantaran sungai Ciliwung yang diyakini menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir di Jakarta, karena para penghuni pemukiman tersebut sudah lama menetap disana. Rencana relokasi sebagai upaya penertiban permukiman di bantaran sungai Ciliwung, menjadi isu yang kurang menarik bagi warganya karena kebanyakan dari mereka merasa kurang mampu untuk membayar biaya sewa Rusun. Kondisi itu menjadi hal yang melatarbelakangi pemikiran masyarakat bantaran sungai Ciliwung untuk tetap tinggal dilokasi tersebut. Disamping itu rencana penggantian terhadap aset yang dimiliki masyarakat tidak didasarkan pada nilai jual, sehingga membawa kekhawatiran bahwa masyarakat akan menanggung kerugian. Hal ini membuat masyarakat bantaran sungai Ciliwung kurang memberikan respons positif terhadap rencana pemerintah untuk merelokasi mereka ke Rusun, sebagai tempat yang dinilai layak huni. Dengan adanya sikap masyarakat yang skeptis seperti itu, menjadi penghambat pelaksanaan upaya penertiban DAS Ciliwung dalam rangka penanggulangan banjir di Jakarta.

Terhambatnya pembangunan infrastruktur untuk mewujudkan normalisasi DAS disebabkan oleh belum terlaksananya penertiban bangunan liar di sepanjang bantaran sungai Ciliwung. Hal ini merupakan kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam melaksanakan rencana program relokasi masyarakat di bantaran sungai tersebut. Efek yang ditimbulkan sebagai akibat dari kondisi ini adalah bahaya banjir tetap melanda Ibukota Jakarta. Keamanan manusia yang tinggal di wilayah DKI Jakarta pun akan terus terancam oleh bahaya banjir tersebut. Hal ini berdampak negatif terhadap Ketahanan Wilayah, karena keamanan manusia sebagai salah satu aspek kehidupan yang menjadi lingkup dalam Ketahanan Wilayah tidak memperoleh perhatian yang tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh rencana program relokasi masyarakat dalam rangka penertiban DAS Ciliwung terhadap *human security* di Provinsi DKI Jakarta. Dalam hal ini, Keamanan manusia akan dilihat sebagai konteks ketahanan wilayah.

Kata kunci : Banjir, Normalisasi, Penertiban DAS, Rencana Relokasi, *human security* sebagai Aspek Ketahanan Wilayah

## ABSTRACT

Name : Arifin Mukhlis, S.Sos  
NPM : 0806448283  
Study Program : Strategic Studies National Defense  
Thesis Title : **PROGRAM RELOCATION AND THE EFFECT ON HUMAN SECURITY (Control Case Study Watershed Ciliwung DKI Jakarta)**

Ciliwung riverbank area is never separated from the problem of flooding that hit when heavy rains flushed the area. Over the years the people living with such conditions, and the phenomenon of flooding into something understandable by citizens who live along the river is. The government thought that the best solution for this problem is to transfer all its citizens from flooding into the region a better place and that is permanent Flats (Flat). For that, the government is planning programs for regulating residential relocation communities along the river Ciliwung to performing well. This is necessary so that activities can be carried out Ciliwung normalization to overcome the floods that often hit parts of Jakarta.

Not easy to relocate residents Ciliwung riverbank occupancy is believed to be one of the causes of flooding in Jakarta, because the inhabitants of these settlements have long settled there. Relocation plan as an effort to control the Ciliwung settlements along the river, an issue which is less attractive to residents because most of them feel less able to pay the rental fee Flat. The condition is a matter of thinking underlying the Ciliwung riverbank communities to remain at the site. Besides, the replacement plan to the community-owned assets is not based on the sale price, thus bringing the concerns that people will bear the loss. This makes people less Ciliwung riverbanks give positive response to the government's plan to relocate them to the Flat, as a place that is considered suitable for habitation. With the public skeptical attitude like that, be obstacles to the implementation of efforts to control the Ciliwung river in line with flood in Jakarta.

Inhibition of development of infrastructure to realize the normalization of the watershed caused by the wild has not been the implementation of the control building along the banks of the river Ciliwung. This is a constraint faced by the government in implementing the relocation plan on the banks of the river community. What effect as a result of this condition is permanent flooding hit the capital Jakarta. Security man who lived in Jakarta area will continue to be threatened by the flooding hazard. This negative impact on the Regional Resilience, because human security as one aspect of life that becomes the scope of the Regional Resilience does not get high attention. This study aims to determine the influence of community relocation plan in order to control Ciliwung of Regional Resilience in DKI Jakarta Province. In this case, human security will be seen as the context of regional resilience.

Key words : Flood, Normalization, Control DAS, Relocation Plan, Human Security as a Regional Security Aspects.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	v
ABSTRAK .....	vi
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL .....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
<b>BAB 1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Perumusan Masalah .....	6
1.3. Tujuan Penelitian .....	7
1.4. Manfaat Penelitian .....	7
1.5. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
2.1. Teori Yang Melandasi Relokasi .....	10
2.1.1. Teori Perkotaan .....	10
2.1.2. Teori Permukiman Penduduk .....	15
2.1.3. Permukiman Kumuh Masyarakat Kota .....	18
2.1.4. Teori Relokasi .....	20
2.2. Taat Hukum .....	28
2.2.1. Pengertian Hukum .....	28
2.2.2. Penegakan Hukum .....	30
2.2.3. Hukum Lingkungan Hidup .....	34

2.3. <i>Human Security</i> .....	39
2.3.1. Gagasan Pemikiran <i>Human Security</i> .....	39
2.3.2. <i>Human Security</i> Menurut Para Ahli .....	40
2.4. Ketahanan Wilayah .....	44
2.4.1. Pengertian .....	44
2.4.2. Pembinaan Ketahanan Wilayah .....	47
<b>BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	<b>49</b>
3.1. Tempat dan Waktu Penelitian .....	49
3.1.1. Tempat Penelitian .....	49
3.1.2. Waktu Penelitian .....	49
3.2. Metode dan Teknik Pengumpulan Data .....	49
3.2.1. Metode Penelitian .....	49
3.2.2. Teknik Pengumpulan Data .....	50
3.2.3. Teknik Analisis Data .....	51
3.3. Unit Analisis, Populasi Dan Sampel .....	52
3.3.1. Unit Analisis .....	52
3.3.2. Populasi dan Sampel .....	52
3.4. Variabel Penelitian .....	54
3.5. Instrumen Penelitian .....	56
3.5.1. Variabel Relokasi .....	56
3.5.2. Variabel Taat Hukum .....	57
3.5.3. Variabel <i>Human Security</i> .....	58
3.6. Uji Coba Instrumen Penelitian .....	59
3.6.1. Uji Validitas .....	60
3.6.2. Uji Reliabilitas .....	67
<b>BAB 4. GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN</b> .....	<b>75</b>
4.1. Karakteristik DKI Jakarta .....	75

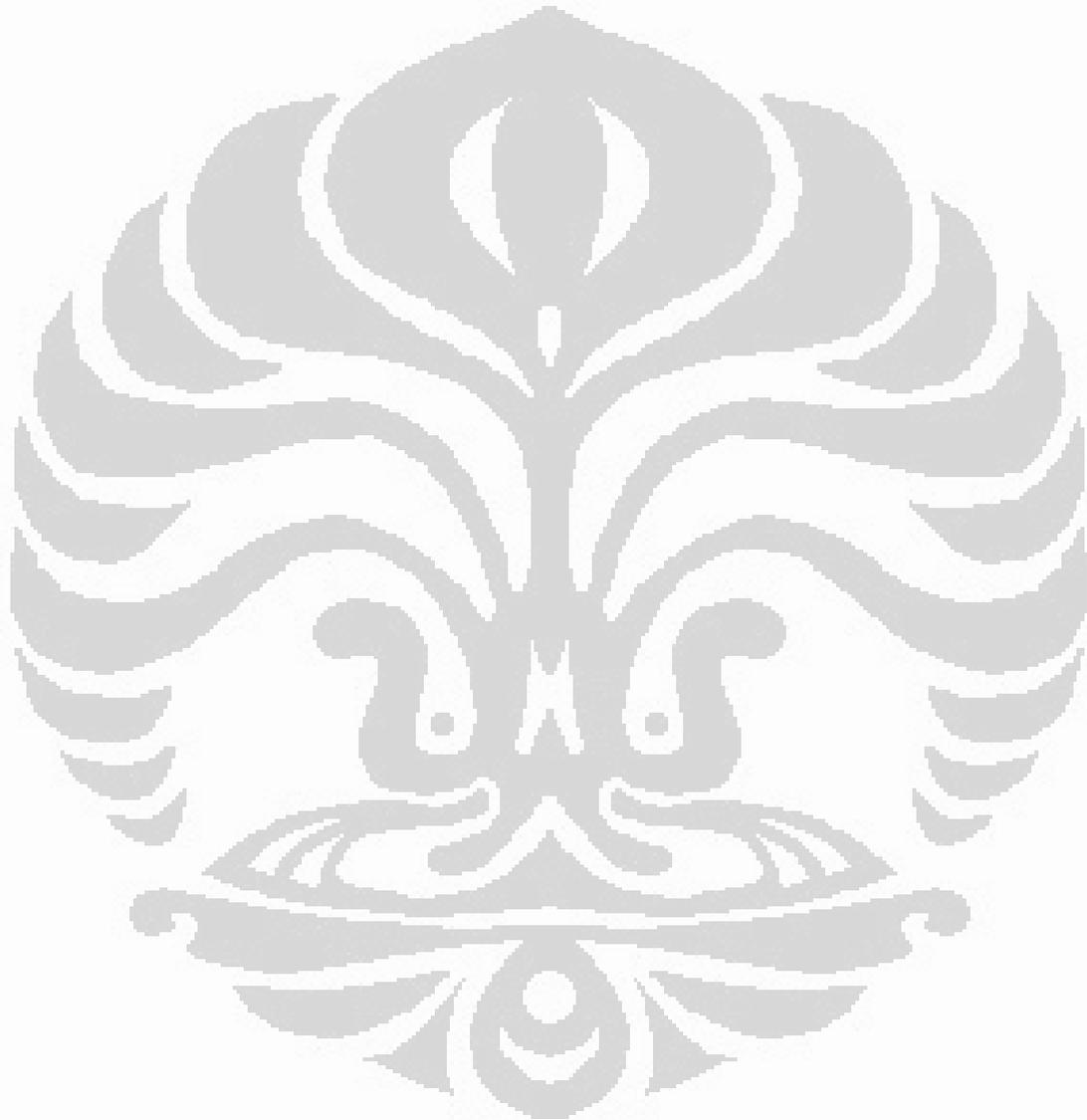
4.1.1. Sejarah Jakarta .....	75
4.1.2. Geografis Jakarta .....	75
4.1.3. Geologis Jakarta .....	76
4.1.4. Klimatologis Jakarta .....	76
4.1.5. Demografis Jakarta .....	77
4.1.6. Perumahan Rakyat .....	77
4.2. Karakteristik Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung .....	78
4.2.1. Sejarah Sungai Ciliwung .....	78
4.2.2. Topografis Sungai Ciliwung .....	79
4.2.3. Sumber Air Sungai Ciliwung .....	79
4.2.4. Jenis Tanah Sungai Ciliwung .....	81
4.2.5. Sistem Pengendalian Banjir .....	81
<b>BAB 5. ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>84</b>
5.1. Analisis Pengaruh Program Relokasi Masyarakat Terhadap <i>Human Security</i> .....	84
5.2. Analisis Pengaruh Taat Hukum Terhadap <i>Human Security</i> .....	89
5.3. Persepsi Masyarakat Bantaran Tentang Normalisasi DAS Ciliwung .....	92
<b>BAB 6. PENUTUP .....</b>	<b>107</b>
6.1. Kesimpulan .....	107
6.2. Saran .....	109
<b>DAFTAR REFERENSI</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1.	: Jumlah Penduduk Permukiman Rawan Banjir Bantaran Sungai Ciliwung Kelurahan Kebon Baru .....	53
Tabel 3.2.	: Jumlah Penduduk Permukiman Rawan Banjir Bantaran Sungai Ciliwung Kelurahan Pengadegan .....	53
Tabel 3.3.	: Kisi-kisi Variabel Relokasi Masyarakat .....	57
Tabel 3.4.	: Kisi-kisi Variabel Taat Hukum .....	58
Tabel 3.5.	: Kisi-kisi Variabel <i>Human Security</i> .....	59
Tabel 3.6.	: Perhitungan Validitas Butir Variabel $X_1$ dan Y .....	61
Tabel 3.7.	: Hasil Uji Validitas Variabel $X_1$ .....	63
Tabel 3.8.	: Perhitungan Validitas Butir Variabel $X_2$ dan Y .....	64
Tabel 3.9.	: Hasil Uji Validitas Variabel $X_2$ .....	66
Tabel 3.10.	: Perhitungan Reliabilitas Variabel $X_1$ .....	69
Tabel 3.11.	: Rangkuman Varians Butir Variabel ( $X_1$ ) .....	70
Tabel 3.12.	: Rangkuman Varians Butir Variabel ( $X_2$ ) .....	72
Tabel 3.13.	: Hasil Uji Instrumen Penelitian .....	74
Tabel 5.1.	: Penilaian Responden Terhadap Kuesioner Variabel $X_1$ .....	88
Tabel 5.2.	: Penilaian Responden Terhadap Kuesioner Variabel $X_2$ .....	91
Tabel 5.3.	: Penilaian Responden Terhadap Kuesioner Variabel Y .....	92

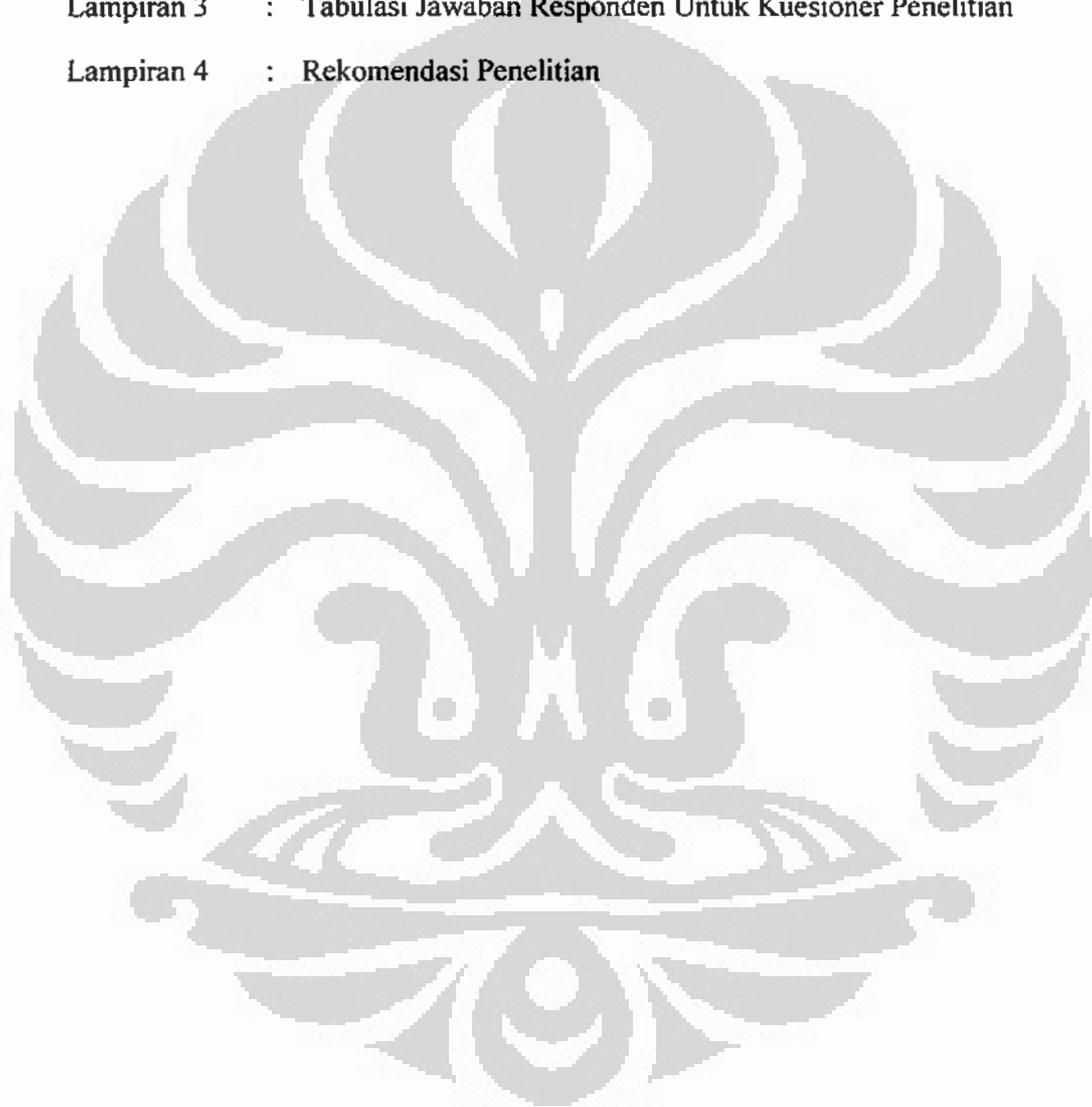
**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 3.1. : Hubungan Antar Variabel ..... 55



**DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Instrumen Penelitian
- Lampiran 2 : Uji Validitas Dan Reliabilitas Tabulasi Jawaban Responden
- Lampiran 3 : Tabulasi Jawaban Responden Untuk Kuesioner Penelitian
- Lampiran 4 : Rekomendasi Penelitian



## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Isu internasional tentang perubahan iklim global (Global Warming) yang membawa dampak serius terhadap keselamatan jiwa manusia, mendorong setiap negara untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur yang dapat mengantisipasi ancaman bencana alam. Letak geografis Indonesia yang berada di garis Khatulistiwa beriklim tropis serta memiliki dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau tentunya membawa berbagai konsekuensi.

Pada musim hujan, sering kali bencana banjir melanda berbagai wilayah di Indonesia. Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia pun tidak luput dari permasalahan banjir tersebut. Berbagai upaya telah dilaksanakan untuk mengantisipasi guna menanggulangi hal tersebut diantaranya dengan pembangunan proyek Banjir Kanal Timur (BKT). Pembangunan infrastruktur tersebut telah dinyatakan selesai pada bulan Februari 2010. Namun pada beberapa tempat di wilayah DKI Jakarta fenomena banjir tersebut masih belum dapat ditanggulangi. Hal ini masih dirasakan oleh masyarakat yang bermukim disepanjang bantaran sungai Ciliwung. Melihat kondisi demikian, Pemerintah DKI Jakarta merencanakan pelaksanaan program relokasi masyarakat dalam upaya penertiban DAS Ciliwung dengan tujuan untuk mengantisipasi bencana banjir.

Relokasi penduduk dari bantaran sungai diperlukan sebelum dilakukannya normalisasi kali Ciliwung. Pengamatan Kompas : sungai Ciliwung saat ini lebarnya kurang dari 10 meter. Pemerintah berencana melebarkan sungai itu sampai 60 meter. Pelebaran dan pengerukan sungai merupakan salah satu solusi untuk membebaskan Jakarta dari banjir.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> <http://megapolitan.kompas.com/read/2010/01/11/2248540/Pusat.dan.DKI.Sepakati.Relokasi.Penduduk.Bantaran.Ciliwung>. Senin, 11 Januari 2010 | 22:48 WIB.

Tidak mudah merelokasi warga hunian bantaran sungai Ciliwung yang diyakini menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir di Jakarta, karena para penghuni pemukiman tersebut sudah belasan bahkan puluhan tahun menetap disana. Sehingga perlu komitmen dan koordinasi yang kuat antar Departemen, Pemprov DKI Jakarta dan kesadaran warga masyarakat sendiri. Hal ini ditegaskan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra) HR. Agung Laksono di pintu air Manggarai, Jakarta Selatan usai ekspedisi menyusuri sungai Ciliwung (Sabtu, 5 Desember 2009).<sup>2</sup>

Kondisi daerah aliran sungai Ciliwung diperparah oleh masyarakat yang bermukim di bantaran sungai tersebut, hingga menimbulkan berbagai permasalahan, diantaranya :

- a. Penyempitan daerah aliran sungai yang diakibatkan oleh semakin banyaknya penghuni bantaran sungai Ciliwung hingga menyebabkan daya tampung sungai semakin berkurang. Hal ini mengakibatkan ancaman banjir tahunan di wilayah DKI Jakarta tidak dapat dihindari.
- b. Kualitas air yang semakin parah sebagai akibat pembuangan limbah industri dan limbah rumah tangga.

Kondisi tersebut merupakan permasalahan yang harus segera mendapatkan penanganan yang tepat agar tujuan pembangunan yaitu menciptakan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Berdasarkan Kepres No.32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, Pasal 15 menyatakan bahwa perlindungan terhadap bantaran sungai dilakukan untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai. Sedangkan dalam pasal 16 dikatakan bahwa bantaran sungai adalah sekurang-kurangnya 100 meter dari kiri-kanan sungai besar dan 50 meter dari kiri-kanan anak sungai yang berada di luar permukiman, untuk sungai di kawasan permukiman berupa bantaran sungai yang diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inspeksi antara 10 – 15 meter.

<sup>2</sup> <http://bataviase.co.id/content/relokasi-dilakukan-secara-bermartabat>. Senin, 7 Desember 2009.

Geomorfologis Jakarta berada pada posisi yang rendah dan rentan terhadap ancaman banjir dan memiliki daerah aliran 13 sungai yang bermuara di Teluk Jakarta. Faktor tingginya curah hujan memberi sumbangan yang signifikan terjadinya banjir di Jakarta dan kawasan sekitarnya. Hal ini disebabkan oleh ketidakdisiplinan pemerintah dan masyarakat memelihara lingkungan, melanggar tata-ruang kota. Secara geografis, ketinggian rata-rata Kota Jakarta : 7 m diatas permukaan laut, terletak pada  $106^{\circ}.49'.35^{\circ}$  Bujur Timur dan  $5^{\circ}.10'.37^{\circ}$  Lintang Selatan. Luas wilayah daratan seluas 664,12 Km<sup>2</sup>, dengan tidak kurang dari 110 buah pulau yang tersebar di Kepulauan Seribu, dengan suhu maksimum berkisar 31,4° C, tinggi curah hujan setiap tahun rata-rata 2.000 mm dengan maksimum pada bulan Januari dan kelembaban (nisbi) 77,97 % serta kecepatan angin rata-rata 1,5 m/dtk.<sup>3</sup>

Masalah penduduk yang membawa dampak pada penataan permukiman sebagai satu aspek dalam proses pembangunan di DKI Jakarta belum dapat dirasakan optimal. Hal ini dapat dilihat dari meluasnya permukiman penduduk pada lahan kritis di daerah bantaran sungai Ciliwung. Bila melihat kondisi tersebut, nampaknya akan sangat sulit melaksanakan program relokasi, yang hasil akhirnya bertujuan untuk mengatasi ancaman banjir tahunan. Pemerintah DKI Jakarta merencanakan program relokasi masyarakat dalam upaya penertiban daerah aliran sungai di bantaran kali Ciliwung. Melalui program tersebut diharapkan masyarakat dapat memperoleh tempat hunian yang layak dan upaya penanggulangan ancaman banjir tahunan dapat terlaksana secara optimal.

Kebijakan program relokasi masyarakat di bantaran Sungai Ciliwung dalam upaya penertiban daerah aliran sungai merupakan salah satu upaya pemerintah DKI Jakarta untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yaitu kebutuhan tempat tinggal yang baik dan layak huni. Untuk itu telah disiapkan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) di Marunda, namun ditanggapi dingin oleh warga karena letaknya yang jauh dari pemukiman dan tempat kerja masyarakat setempat. Tahun ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang

---

<sup>3</sup> Perda DKI Jakarta No.1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2007-2012. Hlm.6.

melaksanakan inventarisasi terhadap lokasi baru, diantaranya kawasan Kebon Baru Tebet Jakarta Selatan dan Pengadegan Kalibata. Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo mengatakan “ketersediaan tanah kerap menjadi masalah karena belum tentu lokasi tersebut adalah lokasi yang diinginkan warga”. Harga tanah yang tinggi juga menjadi kendala Pemprov DKI meski DPR telah menetapkan bahwa biaya standar pembebasan lahan demi kepentingan umum adalah harga NJOP (Nilai Jual Objek Pajak).<sup>4</sup>

Adanya gangguan keamanan akibat kerawanan sosial seperti konflik antar penduduk dan kekerasan sebagai dampak dari kondisi lingkungan di daerah yang padat dan kumuh serta tidak layak huni. Hal ini disebabkan oleh timbulnya daerah-daerah kantong kemiskinan yang sebagian besar berupa pemukiman kumuh, sebagai permasalahan sosial yang sudah menjadi pemandangan umum di sepanjang bantaran sungai Ciliwung. Pada akhirnya, kondisi seperti ini akan dapat berpengaruh pada ketahanan Nasional serta ketahanan daerah / wilayah secara khusus. Karena sesuai dengan kaidah dualistis yang dikemukakan oleh Sunardi, menyatakan bahwa Ketahanan Nasional merupakan perpaduan sinergis dari setiap ketahanan wilayah.<sup>5</sup>

Ketahanan Nasional (Tannas) ialah kondisi dinamik suatu bangsa, berisi keuletan dan ketangguhan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi ATHG (Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan) baik dari dalam maupun dari luar.<sup>6</sup> Pembangunan pada hakekatnya adalah proses peningkatan nilai tambah di segala aspek kehidupan. Sehubungan dengan makna pembangunan ini, Goulet dalam Wan Usman (2003 : 35) mengemukakan tiga nilai hakiki yang terdapat dalam konsep dasar sebagai petunjuk praktis untuk memahami hakekat pembangunan. Nilai-nilai hakiki

<sup>4</sup> <http://megapolitan.kompas.com/read/2010/02/15/14045235/Relokasi.Warga.Bantaran.Ciliwung.Sasar.Lokasi.Baru/trackback.Laporan.Wartawan.KOMPAS.com.Caroline.Damanik.Senin,15.Februari.2010,14:04.WIB>.

<sup>5</sup> R.M. Sunardi, *Pembinaan Ketahanan Bangsa Dalam Rangka Memperkokoh Keutuhan Negara Kesatuan RI*. PT. Kuaternita Adidarma. Jakarta. 2004. Hlm.55.

<sup>6</sup> Wan Usman, dkk. *Daya Tahan Bangsa* (Program Studi Pengkajian Ketahanan Nasional Program Pascasarjana Universitas Indonesia). Jakarta. 2003. Hlm. 93.

itu ialah : kebutuhan hidup, harga diri dan kebebasan. Ketiga nilai ini berhubungan dengan kebutuhan manusia yang mendasar.

Pemerintah sebagai aktor utama dalam pembangunan, pada prinsipnya selalu berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelaksanaan berbagai program pembangunan infrastruktur yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat menyangkut ketersediaan tempat tinggal, melalui program relokasi akan disiapkan Rusun (Rumah Susun) pada beberapa lokasi diantaranya Kebon Baru dan Pangadegan Kalibata. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala yang menjadi hambatan dalam mensosialisasikan rencana program pembangunan infrastruktur tersebut, diantaranya adalah :

- a. Masalah biaya pembangunan : masyarakat menghendaki nilai ganti rugi atas tanah yang dimilikinya menyesuaikan dengan harga pasar, sementara pemerintah berpedoman pada NJOP.
- b. Masalah keamanan : timbulnya spekulasi tanah yang mempengaruhi masyarakat untuk tetap mempertahankan tuntutannya dengan jalan menyebarkan isu pengambil-alihan tanah secara paksa oleh pemerintah dan isu pemberian ganti rugi tanah di bawah harga pasaran. Hal ini akan semakin memperbesar konflik antara pemerintah dan masyarakat hingga mengakibatkan gangguan keamanan.

Masalah pembangunan infrastruktur yang akan dilaksanakan melalui program relokasi masyarakat bantaran Sungai Ciliwung, dapat berimplikasi terhadap ketahanan wilayah DKI Jakarta yang pada akhirnya terakumulasi pada Ketahanan Nasional.

Penertiban daerah aliran sungai Ciliwung DKI Jakarta yang dilaksanakan melalui program relokasi masyarakat berpotensi menimbulkan gangguan keamanan yang diakibatkan oleh konflik antara pemerintah dan masyarakat. Hal tersebut berpengaruh terhadap Ketahanan Wilayah Provinsi DKI Jakarta dan apabila tidak segera mendapatkan penanganan yang tepat akan berimplikasi negatif terhadap Ketahanan Nasional.

Adanya gangguan keamanan dan permasalahan sosial di lokasi tersebut, dapat menghambat pelaksanaan proses pembangunan kepentingan umum yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Untuk itulah diperlukan adanya penyelesaian yang arif, bijaksana dan adil, agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan lancar dengan tidak mendatangkan kesengsaraan bagi masyarakat yang terkena proyek pembangunan infrastruktur tersebut. Hal ini merupakan tantangan yang harus dicermati oleh Pemerintah agar setiap program pembangunan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat dapat berjalan dengan baik.

Ketahanan Nasional dapat dipandang sebagai suatu mata uang dengan dua sisi yakni keamanan (*security*) dan kesejahteraan (*prosperity*). Keduanya harus berjalan seimbang, dimana kesejahteraan dan keamanan mengandung muatan utama yakni partisipasi masyarakat yang demokratis.<sup>7</sup> Dalam kaitannya dengan keamanan, penerapan peraturan dan perundang-undangan/hukum merupakan hal penting yang harus ditegakkan untuk mewujudkan kesejahteraan. Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini selain mengkaji pengaruh rencana program relokasi masyarakat dan penerapan peraturan perundang-undangan/hukum dalam rangka penertiban DAS Ciliwung terhadap Ketahanan Wilayah di Provinsi DKI Jakarta, juga akan mengkaji aspek keamanan manusia dari program tersebut. Dalam hal ini, Keamanan manusia akan dilihat dalam konteks ketahanan wilayah.

## 1.2. Perumusan Masalah

Atas dasar fakta tersebut, melalui penelitian ini ingin dijawab sejumlah pertanyaan, yaitu :

- 1.2.1. Bagaimanakah pengaruh program relokasi masyarakat dalam rangka penertiban DAS Ciliwung terhadap *human security* di Provinsi DKI Jakarta ?

---

<sup>7</sup> Wan Usman, *Ibid.* Hlm.93.

1.2.2. Bagaimanakah pengaruh taat hukum masyarakat dalam rangka penertiban DAS Ciliwung terhadap *human security* di Provinsi DKI Jakarta ?

1.2.3. Bagaimanakah pengaruh program relokasi masyarakat dan taat hukum secara bersamaan dalam rangka penertiban DAS Ciliwung terhadap *human security* di Provinsi DKI Jakarta ?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Dengan melihat perumusan masalah yang telah diuraikan, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1.3.1. Mengetahui besarnya pengaruh program relokasi masyarakat dalam rangka penertiban DAS Ciliwung terhadap *human security* di Provinsi DKI Jakarta.

1.3.2. Mengetahui besarnya pengaruh taat hukum masyarakat dalam rangka penertiban DAS Ciliwung terhadap *human security* di Provinsi DKI Jakarta.

1.3.3. Mengetahui besarnya pengaruh program relokasi masyarakat dan taat hukum secara bersamaan dalam rangka penertiban DAS Ciliwung terhadap *human security* di Provinsi DKI Jakarta.

### 1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1.4.1. Secara teoritis, melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi Kajian Strategik Ketahanan Nasional dan memperkaya hasil penelitian yang telah ada serta memberi gambaran tentang program relokasi masyarakat dan pengaruhnya terhadap *human security* di Provinsi DKI Jakarta.

1.4.2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi yang berguna bagi masyarakat maupun Institusi terkait yang berkompeten terhadap pelaksanaan program relokasi masyarakat dalam rangka penertiban daerah aliran sungai Ciliwung yang mempengaruhi *human security* di Provinsi DKI Jakarta.

## 1.5. Sistematika Penulisan

Dengan merujuk pada judul tesis yang telah dikemukakan, maka proses pengumpulan dan penelusuran data yang dijadikan sebagai bahan untuk menganalisis masalah dalam penelitian ini akan diuraikan dengan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

**BAB 1** Pendahuluan, berisi latar belakang tentang rencana program relokasi masyarakat bantaran Sungai Ciliwung, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

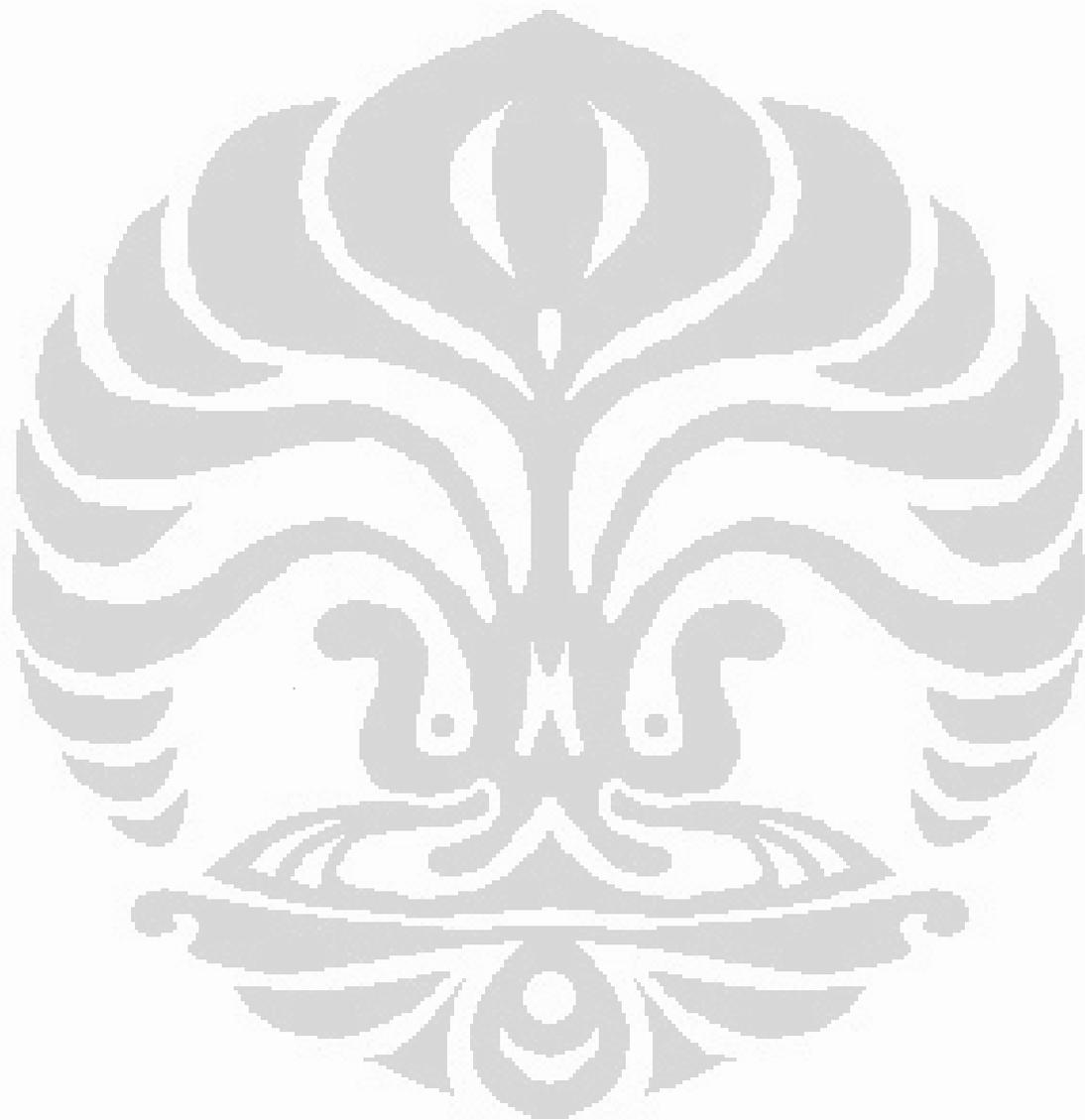
**BAB 2** Tinjauan Pustaka, bagian ini mengkaji teori yang digunakan dalam penelitian berisi tentang dasar pemikiran konsep yang melandasi program relokasi dan konsep *human security* dalam kajian ketahanan wilayah.

**BAB 3** Metodologi Penelitian, pada bab ini terdapat beberapa pembahasan diantaranya adalah tempat dan waktu penelitian; metode dan teknik pengumpulan data; unit analisis, populasi dan sampel; variabel penelitian; instrument penelitian; ujicoba instrument penelitian; teknik analisis data.

**BAB 4** Gambaran Umum Daerah Penelitian, pada bagian ini diuraikan karakteristik Provinsi DKI Jakarta dan karakteristik DAS Ciliwung.

**BAB 5** Pembahasan Analisis Hasil Penelitian, membahas tentang hasil penelitian yang dirangkum dalam kumpulan data untuk mendapatkan kesimpulan.

**BAB 6** Penutup, terdiri dari uraian tentang kesimpulan terhadap hasil penelitian dan saran-saran yang dianggap berguna bagi pemerintah sebagai pembuat kebijakan pembangunan daerah / wilayah.



## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Teori Yang Melandasi Relokasi

##### 2.1.1. Teori Perkotaan

Andy Rizal Umbara, dalam penelitiannya tentang Kajian Relokasi Permukiman Kumuh Nelayan Ke Rumah Susun Kedaung Kelurahan Sukamaju (2003 : 31) mengemukakan pengertian kota menurut para ahli diantaranya : Wirth mendefinisikan kota sebagai permukiman yang relatif besar, padat dan permanen, dihuni oleh orang-orang yang heterogen kedudukan sosialnya; Bintarto mendefinisikan kota sebagai suatu jaringan kehidupan manusia yang ditandai dengan strata sosial ekonomi yang heterogen dan materialistis serta adanya pemusatan penduduk yang besar. Dalam kamus Tata Ruang, pengertian kota adalah kawasan permukiman dengan jumlah dan kepadatan penduduk yang relatif tinggi, memiliki luas areal terbatas, pada umumnya bersifat non agraris, tempat sekelompok orang dalam jumlah tertentu cenderung berpola hubungan rasional, ekonomis dan individualis.

Branch mengemukakan tentang unsur-unsur yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kota, sebagai berikut :<sup>1</sup>

- a. Keadaan geografis, yakni pengaruh letak geografis terhadap perkembangan fisik dan fungsi yang diemban oleh kota. Misalnya kota pantai akan berkembang secara fisik pada bagian daratan yang berbatasan dengan laut dan perkembangan awal disekitar pelabuhan dan biasanya berfungsi sebagai kota perdagangan.

---

<sup>1</sup> Branch, Melville, 1995. *Perencanaan Kota Komprehensif. Pengantar dan Penjelasan*. Yogyakarta Gajah Mada University Press. Hlm.37.

- b. Tapak (site, merujuk pada topografi kota) sebuah kota akan berkembang dengan memperhitungkan kondisi kontur bumi. Dengan demikian pembangunan sarana dan prasarana kota akan menyesuaikan dengan topografi agar bermanfaat optimal.
- c. Fungsi yang diemban kota, yakni aktivitas utama atau yang paling menonjol yang dijalankan oleh kota tersebut.
- d. Sejarah dan kebudayaan yang melatarbelakangi terbentuknya kota juga berpengaruh terhadap perkembangan kota, karena sejarah dan kebudayaan mempengaruhi karakteristik fisik dan masyarakat kota.
- e. Unsur-unsur umum, yakni unsur yang turut mempengaruhi perkembangan kota seperti bentuk pemerintahan dan organisasi administratif, jaringan transportasi, energi, pelayanan sosial dan pelayanan lainnya.

Dimensi perkembangan dan pertumbuhan kota juga dapat diuraikan dan pengaruh pertumbuhan penduduk perkotaan terhadap perkembangan kota. Konsep demikian melihat peningkatan jumlah penduduk perkotaan dan pengaruh yang ditimbulkan sebagai suatu proses yang disebut urbanisasi.

Urbanisasi dapat diartikan sebagai proses perkotaan, baik dalam aspek sosial, yakni perilaku penduduknya, maupun dalam perspektif wilayahnya yakni meluasnya kawasan terbangun dengan ciri perkotaan (Kusumadewi, 1992 : 211). Konsep demikian sama pengertian seperti ini merupakan suatu proses yang digerakan oleh perubahan-perubahan struktural dalam masyarakat, sehingga daerah-daerah yang sebelumnya merupakan daerah pedesaan dengan struktur mata pencaharian agraris berubah memperoleh sifat kehidupan kota. Konsep urbanisasi ini dapat diartikan sebagai suatu proses yang terjadi di kota. Urbanisasi merupakan suatu proses yang diawali oleh adanya

urbanisasi memberi dampak positif bagi pertumbuhan dan perkembangan kota, tetapi tidak sedikit beranggapan bahwa urbanisasi menimbulkan dampak negatif bagi perkembangan kota.

Dampak negatif urbanisasi dirasakan banyak terjadi di Negara-negara sedang berkembang. Mengalirnya arus migrasi dari desa ke kota dapat menimbulkan masalah urbanisasi berlebih (*over urbanization*), yaitu kelebihan penduduk hingga melebihi daya tampung kota.<sup>2</sup> Daya tampung tidak sekedar diartikan ketersediaan lahan untuk beraktifitas, tetapi juga kemampuan kota dalam lingkaran aktifitas perkotaan, kemampuan penyediaan tempat tinggal dan kemampuan kota memberikan pelayanan dan penyediaan sarana/prasarana. Salah satu permasalahan yang dirasakan mendesak adalah penyediaan perumahan atau permukiman (Andy Rizal Umbara, 2003 : 33).

Perumahan dan permukiman merupakan suatu wadah yang tidak dapat dilihat hanya secara fisik, tetapi juga faktor non fisik yang menyangkut sosial, ekonomi dan budaya. Ketiga faktor tersebut mempunyai peran yang besar dalam penyelenggaraan pembangunan dan permukiman. Selain sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, perumahan dan permukiman berfungsi sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya dan peningkatan kualitas generasi penerus dalam membangun dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Perumahan dan permukiman juga merupakan lingkungan kehidupan yang membentuk bagian terbesar dari struktur kota.<sup>3</sup>

Perumahan dan permukiman mempunyai fungsi dan peranan penting dalam kehidupan manusia. Di dalam masyarakat Indonesia, perumahan merupakan cermin dari diri pribadi manusia baik secara perorangan maupun dalam suatu kesatuan dan kebersamaan lingkungan

---

<sup>2</sup> Khairuddin, 1992. *Pembangunan Masyarakat, Tinjauan Aspek Sosiologi, Ekonomi dan Perencanaan*. Yogyakarta. Liberty. Hlm.214.

<sup>3</sup> Murtini, Titien Woro. 2002. *Keselaran Pembangunan Perumahan Dan Permukiman Sebagai Suatu Pemenuhan Kebutuhan Permukiman di Perkotaa. Proceeding : Perumahan dan Permukiman Yang Sinergis* (Artikel). Semarang. Hlm.42.

alamnya. Perumahan tidak dapat dilihat dari sekedar sebagai suatu benda mati atau sarana kehidupan semata, tetapi lebih dari itu, perumahan merupakan suatu proses bermukim, yakni kehadiran manusia dalam ruang hidup di lingkungan masyarakat dan alam sekitarnya. Bermukim pada hakekatnya adalah hidup bersama dan untuk itu fungsi rumah dalam kehidupan adalah sebagai tempat tinggal dalam suatu lingkungan yang mempunyai sarana dan prasarana yang diperlukan oleh manusia dalam memasyarakatkan dirinya.

Turner 1976 (dalam Andy Rizal Umbara, 2003 : 34) mengidentifikasi 3 fungsi utama yang terkandung dalam sebuah rumah tempat bermukim, yaitu :

- a. Rumah sebagai penunjang identitas keluarga (*identity*), yang berwujud pada kualitas hunian atau perlindungan yang diberikan oleh rumah (*the quality of shelter provide by housing*). Kebutuhan akan tempat tinggal dimaksudkan agar penghuni dapat memiliki tempat berlindung / berteduh guna melindungi iklim setempat.
- b. Rumah sebagai penunjang kesempatan (*opportunity*) keluarga untuk berkembang dalam kehidupan sosial, budaya dan ekonomi atau fungsi pengemban keluarga. Fungsi ini diwujudkan dalam lokasi tempat rumah itu didirikan. Kebutuhan berupa akses ini diterjemahkan dalam pemenuhan kebutuhan sosial dan kemudahan ke tempat kerja guna mendapatkan sumber penghasilan.
- c. Rumah sebagai penunjang rasa aman dalam arti terjaminnya keadaan keluarga di masa depan setelah mendapatkan rumah. Jaminan keamanan atas lingkungan perumahan yang ditempati serta jaminan keamanan berupa kepemilikan rumah dan lahan (*the form of tenure*).

Prioritas dari ketiga fungsi tersebut menurut Turner berbeda-beda sesuai dengan tingkat penghasilan masyarakat. Bagi masyarakat

berpenghasilan sangat rendah, faktor *opportunity* bersifat penting dan faktor *identity* belum terpikirkan. Yang utama adalah memperoleh kerja guna mendapatkan *security* pada tahap selanjutnya. Bagi golongan pendapatan rendah, faktor *security* diprioritaskan lebih tinggi. Bagi masyarakat menengah ke atas, faktor *identity* menjadi tuntutan utama.

Berkaitan dengan penilaian lokasi hunian tersebut dikemukakan antara lain oleh Budiharjo (Andy Rizal Umbara, 2003 : 35) yang menyebutkan bahwa "Penduduk dan kehidupan membutuhkan berbagai fasilitas yang dapat memenuhi kebutuhan. Pusat kota merupakan pusat pelayanan dengan fasilitas lebih lengkap, sehingga dalam memilih lokasi permukiman timbul persaingan mendapatkan lokasi di bagian kota, yaitu : sekitar pusat kota / pusat kegiatan; dekat pusat industri perkantoran, perdagangan atau kegiatan komersial; dekat dengan fasilitas kota seperti transportasi dan fasilitas publik lainnya; faktor harga yang lebih murah.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, fenomena meluasnya permukiman kumuh masyarakat bantaran sungai Ciliwung dilatarbelakangi oleh peningkatan kepadatan penduduk yang disebabkan oleh arus urbanisasi. Masyarakat desa yang ingin mengadu nasib di kota Jakarta namun tidak memiliki kemampuan untuk memperoleh tempat tinggal yang layak, lebih memilih bantaran sungai sebagai tempat huniannya. Hal ini dipengaruhi oleh pemikiran bahwa tinggal di bantaran sungai memudahkan mereka untuk memperoleh air dan MCK tanpa harus mengeluarkan banyak biaya. Permukiman kumuh yang digunakan sebagai perumahan atau tempat tinggal di bantaran sungai Ciliwung bagi mereka adalah konsekuensi yang harus dijalani agar dapat bertahan hidup di kota. Dari gambaran tersebut, dapat dilihat bahwa fenomena yang terjadi pada masyarakat bantaran sungai Ciliwung adalah sesuai dengan teori perkotaan yang telah diuraikan diatas. Dalam hal ini, keterbatasan tanah di kota untuk area permukiman penduduknya mengharuskan penduduk yang berpenghasilan rendah untuk tinggal di lokasi-lokasi seperti bantaran sungai.

### 2.1.2. Teori Permukiman Penduduk

Pembangunan perumahan senantiasa memerlukan tanah sebagai basis kegiatannya. Sementara itu menurut Yudohusodo (1991 : 355) luas tanah yang tersedia untuk pembangunan semakin terbatas, baik dalam arti kuantitas maupun kualitasnya. Model-model pembangunan berdasarkan kepada masalah keterbatasan penyediaan tanah, mendorong lahirnya konsep pembangunan rumah susun sebagai alternatif penyelesaian yang tidak dapat dihindari.

Sementara itu Suyono dalam (Komarudin, 1999 : 139), memberikan pandangan akan perlunya rumah susun, dengan jumlah penduduk yang besar dan pertumbuhan penduduk tinggi mengakibatkan makin besarnya kebutuhan rumah baru dan kebutuhan tanah. Akibatnya kota tumbuh melebar dan konversi tanah pertanian ke non-pertanian juga makin besar. Akibat dari keterbatasan lahan perkotaan, biaya tinggi (prasarana kota, utilitas kota, pelayanan kota), kehilangan waktu lama dalam membangun rumah tinggal biasa dan lokasi makin melebar, maka rumah susun menjadi pilihan utama hunian di kota.

Indriastjario (dalam Andy, 2003 : 40), menyatakan bahwa pembangunan rumah susun juga sering dikaitkan dengan masalah permukiman kumuh yang barangkali sebenarnya sangat sulit untuk ditarik benang merah antara keduanya, karena karakter masyarakat yang hidup di rumah kumuh yang berperilaku *agriculture-transisi rural* ke *urban*, sangat berbeda dengan karakter penghuni rumah susun yang seharusnya yaitu berperilaku *industry-service* yang sangat tinggi efisiensi dan efektif dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat memiliki dan digunakan secara terpisah,

terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.

Selain itu menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.60/PRT/1992 tentang Persyaratan Teknis Pembangunan Rumah Susun, pengertian dan pembangunan rumah susun adalah :

- a. Lingkungan Rumah Susun adalah sebidang tanah dengan batas-batas di atasnya dibangun rumah susun termasuk prasarana dan fasilitasnya secara keseluruhan merupakan tempat permukiman.
- b. Satuan lingkungan rumah susun adalah kelompok rumah susun yang terletak pada tanah bersama sebagai salah satu lingkungan yang merupakan satu kesatuan system pelayanan dan pengelolaan.
- c. Rumah susun adalah bangunan bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi-bagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan yang masing-masing dapat memiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama dan tanah bersama.
- d. Prasarana lingkungan rumah susun adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan rumah susun dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Rumah susun juga harus memenuhi syarat-syarat minimum sama seperti syarat-syarat rumah biasa, yaitu :

- a. Harus dapat menjadi tempat berlindung yaitu tempat tinggal dan tempat menetap (bermukim).
- b. Harus dapat memberikan rasa aman baik secara fisik maupun psikologis, aman dari gangguan, aman jatuh dari atas serta aman dalam fungsi kegiatan penghuni.

- c. Harus dapat menjadi wadah sosialisasi antara penghuni dengan penghuni lain dalam satu bangunan yang menjadi tetangganya.
- d. Harus dapat memberikan suasana harmonis diantara penghuni sehingga mendukung tercapainya kehidupan yang sejahtera di lingkungan rumah susun.

Komarudin (1991 : 147) mengemukakan hasil penelitiannya di rumah susun Penjaringan dan Tanah Abang yang menguraikan 10 hal yang terkait dengan upaya pemasyarakatan dan pembudayaan rumah susun. Pertama, keadaan rumah susun perlu disesuaikan dengan keinginan penghuni; kedua, rumah susun yang dibangun saat ini terkesan berbeda dengan keinginan penghuni; ketiga, masih terdapat cukup banyak kekurangan fasilitas rumah susun; keempat, cukup besar hambatan bermukim di rumah susun; kelima, luas satuan rumah susun yang terlalu kecil ( $18 \text{ m}^2$  dan  $21 \text{ m}^2$ ) sering menimbulkan stress para penghuninya; keenam, masih dijumpai kesulitan bagi penghuni untuk memecahkan berbagai permasalahan hunian rumah susun yang dihadapinya; ketujuh, kondisi lingkungan rumah susun masih belum mendorong kehidupan yang efisien dan produktif; kedelapan, masih perlu waktu panjang untuk membudayakan rumah susun bagi warga perkotaan; kesembilan, sulitnya pengurusan status kepemilikan rumah susun; kesepuluh, masih kurangnya perhatian terhadap aspek sosial-ekonomi, sosial-budaya dan psikologis penghunian di rumah susun.

Dalam kaitannya dengan kebijakan pemerintah tentang program relokasi masyarakat bantaran sungai Ciliwung yang akan ditempatkan di rumah susun, pada dasarnya juga dilatarbelakangi oleh keterbatasan lahan tanah yang ada di kota Jakarta untuk menampung masyarakatnya. Peralihan orientasi konsep permukiman penduduk Jakarta yang semula melebar kesamping menjadi bertingkat ke atas, diharapkan mampu memberikan solusi bagi masalah permukiman penduduk kota Jakarta. Selain dapat memberikan manfaat efisiensi lahan dan bangunan, hal ini

juga diharapkan dapat menjadi solusi bagi masyarakat bantaran sungai Ciliwung untuk memperoleh tempat hunian yang layak.

### 2.1.3. Permukiman Kumuh Masyarakat Kota

Fenomena yang sering muncul di kota-kota besar adalah tingkat kebutuhan yang tidak seimbang dengan kemampuan kota dalam menyediakan fasilitas umum. Dampaknya adalah munculnya lingkungan kumuh, kemacetan lalu lintas, ketidakteraturan, inefisiensi penggunaan lahan serta rendahnya tingkat pelayanan kebutuhan air bersih dan lainnya baik dari segi keterjangkauan maupun kualitas pelayanan.<sup>4</sup>

Arus migrasi ke perkotaan mempunyai kontribusi penting memperbesar keterbatasan lahan kota. Kota menjadi semakin padat dan pengaturan ruang menjadi semakin rumit sebagai akibat besarnya intensitas *slumming* dan *squatting* pendudukan, oleh para pendatang. Akibatnya memunculkan area-area permukiman kumuh dan liar di bantaran sungai dan sepanjang pantai, dibelakang bangunan-bangunan produktif di lereng-lereng perbukitan.

Rabekka dalam Sobirin (2001 : 49) mengemukakan pengertian permukiman kumuh secara umum adalah terlihat dari kualitas bangunan rumahnya yang tidak permanen, dengan kepadatan bangunan yang tinggi dan tidak teratur, prasarana jalan yang sangat terbatas, walaupun ada berupa gang-gang sempit yang berliku-liku, tidak adanya saluran drainase dan tempat penampungan sampah sehingga terlihat kotor dan jorok. Tidak jarang pula terdapat daerah yang secara berkala mengalami banjir. Yudohusodo (1991) mendefinisikan kampung kumuh sebagai bentuk hunian tidak berstruktur, tidak berpola dengan letak rumah dan jalan-jalannya tidak beraturan, tidak tersedianya fasilitas umum, prasarana dan sarana permukiman tidak mendukung terlihat tidak ada

---

<sup>4</sup> Saraswati. 2000. *Dinamika Pembangunan Fisik Permukiman Kota : Kasus Kota Jakarta Dalam Dimensi Keruangan Kota, Teori dan Kasus*. Penyunting Raldi Hendro Koestoer, dkk. Jakarta. UIP. Hlm.72.

got, sarana air bersih, MCK dan lainnya, bentuk fisiknya tidak layak misalnya setiap tahun banjir dan lain sebagainya.

Kebijakan penataan permukiman kumuh adalah pertama, meningkatkan kualitas kehidupan penghuni perumahan dan permukiman kumuh dengan mengadakan perumahan dan permukiman yang lebih baik dan kedua, mewujudkan lingkungan perumahan dan permukiman yang di tata secara tertib dan memenuhi persyaratan pembangunan. Asas yang dipakai adalah manfaat, adil dan merata, kebersamaan dan kekeluargaan, kesetiakawanan sosial, kepercayaan pada diri sendiri, keterjangkauan dan kelestarian lingkungan hidup serta diselenggarakan dengan pendekatan pembangunan bertumpu pada kemampuan masyarakat, dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.<sup>5</sup>

Sudono Sukirno dalam Khairuddin (1992 : 166) berpendapat bahwa penanggulangan masalah perumahan dan permukiman kumuh dapat dilakukan melalui 2 cara, yaitu :

- a. Dengan mengembangkan daerah permukiman baru, yaitu dengan membangun rumah-rumah sesuai dengan kebutuhan penduduk.
- b. Dengan memperbaiki lingkungan perumahan yang sudah ada sehingga memenuhi persyaratan untuk kehidupan yang layak.

Cara pertama saat ini banyak dikembangkan di daerah-daerah perkotaan untuk membantu penduduk yang ingin memiliki rumah sederhana dengan kredit yang dilakukan dengan Kredit Pemilikan Rumah (KPR), termasuk diantaranya relokasi penduduk yang dipadukan dengan pola KPR tersebut. Cara kedua, lebih diarahkan pada renovasi-renovasi rumah yang dianggap tidak memenuhi syarat untuk dihuni atau dilihat dari kualitas lingkungannya. Program seperti ini di Indonesia dikenal

---

<sup>5</sup> Komarudin. 1999. *Pembangunan Perkotaan Berwawasan Lingkungan*. Jakarta. Dirjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Hlm.121.

dengan perbaikan kampung atau Kampung Improvement Program (KIP).<sup>6</sup>

Afandi menyebutnya dengan istilah *urban renewal* atau peremajaan kota merupakan upaya menata kembali suatu kawasan kota yang telah mengalami pemerosotan nilai atau tidak lagi sesuai fungsinya. Prinsip peremajaan kota adalah memberi prioritas dan bantuan sepenuhnya kepada penghuni lama (Afandi, 1987, dalam Jurnal PWK No.11 : 23). Yudohusodo (1991 : 332) memberikan batasan peremajaan kota adalah upaya pembangunan yang terencana untuk merubah atau memperbaharui suatu kawasan di kota yang mutu lingkungannya rendah. Peningkatan mutu lingkungan dalam peremajaan kota dimaksudkan untuk memperbaiki tatanan sosial ekonomi di kawasan yang bersangkutan. Dengan demikian peremajaan kota tidak sekedar ditujukan pada perbaikan fisiknya saja, tetapi yang utama adalah perbaikan tatanan sosial ekonomi masyarakat.

#### 2.1.4. Teori Relokasi

Pemukiman kembali atau sering diartikan sebagai relokasi atau dalam bahasa Inggris disebut *resettlement*. Menurut Ridlo, relokasi atau *resettlement* merupakan proses pemindahan penduduk dari lokasi pemukiman yang tidak sesuai dengan peruntukannya ke lokasi baru yang disiapkan sesuai dengan rencana pembangunan kota.<sup>7</sup> Hal tersebut didukung oleh Yudohusodo yang berpendapat bahwa relokasi atau pemindahan pemukiman dilakukan terhadap lokasi pemukiman yang peruntukannya bukan untuk perumahan atau lokasi pemukiman yang rawan bahaya.<sup>8</sup>

<sup>6</sup> Sujarto, Djoko. 1997. *Pendekatan Pembangunan Perkotaan Ditinjau Dari Segi Perencanaan Lokal*. Buletin No.12, BPA UGM. Yogyakarta. Hlm.26.

<sup>7</sup> Ridlo, Mohamad Agung. *Kemiskinan di Perkotaan*. Penerbit Unissula Press. Semarang. 2001. Hlm.95.

<sup>8</sup> Yudohusodo, Siswono. Et, al. *Rumah Untuk Seluruh Rakyat*. Yayasan Padamu Negeri. Jakarta. 1991.

Pendapat para ahli tersebut pada prinsipnya dilandasi oleh pengertian relokasi yang ditetapkan oleh *World Bank (OD 4.30, June 1990)*, yang menyatakan bahwa pemukiman kembali atau *resettlement* pada umumnya terjadi atau dilakukan pada kondisi “terpaksa”. *Asian Development Bank (November 1995)*, menyampaikan laporan hasil studinya yang menunjukkan bahwa banyak kebijakan dan peristiwa yang seringkali menjadi penyebab program relokasi (*resettlement*), antara lain : (1) proyek pemerintah yang memerlukan pembebasan tanah untuk keperluan pembangunan sarana prasarana kota, pembuatan waduk, pembuatan rel kereta api atau jalan bebas hambatan, untuk keperluan jaringan listrik dan telepon; (2) kondisi *force major* seperti bencana alam, kebakaran, perang dan kerusuhan.<sup>9</sup>

Bersumber dari pendapat Kertasaputra yang mengemukakan bahwa pengertian relokasi adalah pemukiman kembali suatu kelompok masyarakat berdasarkan tempat tinggal atau pemukiman sebelumnya, obyek yang dimukimkan kembali tersebut adalah sekelompok masyarakat yang tinggal pada suatu lokasi tertentu, misalnya suatu kelompok masyarakat yang tinggal pada lokasi tepi sungai, dimukimkan kembali pada lokasi yang telah ditentukan.<sup>10</sup>

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang perumahan dan pemukiman, menetapkan bahwa :

Pemukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, dapat merupakan kawasan perkotaan dan pedesaan, berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau hunian dan tempat kegiatan yang mendukung peri kehidupan dan penghidupan.

<sup>9</sup> Andy Rizal Umbara. *Kajian Relokasi Pemukiman Kumuh Nelayan Ke Rumah Susun Kedaung Kelurahan Sukamaju*. Universitas Diponegoro. Semarang. 2003. Hlm.51

<sup>10</sup> Syafruddin Apidiani. *Program Relokasi Penduduk Tepian Sungai Karang Mumus Kota Samarinda*. FISIP UI. Jakarta. 2002. Hlm.28.

Sedangkan menurut Kuswartojo mengatakan bahwa pemukiman adalah perumahan dengan segala isi dan kegiatan yang ada didalamnya.<sup>11</sup>

Bila dikaitkan dengan topik penelitian ini, maka relokasi merupakan pemindahan tempat / lokasi pemukiman (perumahan dengan segala isinya / termasuk masyarakat) dengan pertimbangan keamanan manusia agar terhindar dari lingkungan yang rawan bahaya. Untuk itulah pelaksanaan program relokasi masyarakat selayaknya dapat memberikan banyak kemudahan kepada masyarakat yang akan dipindahkan. Sehingga kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam program tersebut dapat tumbuh secara sukarela.

#### a. Tujuan Kebijakan Rolokasi

Asian Development Bank menyampaikan tujuan dan prinsip kebijakan mengenai pemukiman kembali, yang barangkali dapat diadopsi dan dimodifikasikan sebagai bentuk alternatif program relokasi, yaitu :<sup>12</sup>

- 1) Pemukiman kembali secara paksa harus dihindari kalau memungkinkan memilih alternatif-alternatif proyek yang layak.
- 2) Orang-orang yang terkena dampak, wajib diberikan ganti rugi dan dibantu, supaya kehidupan sosial dan ekonominya sama seperti apabila tidak ada proyek tersebut.
- 3) Orang-orang yang terkena dampak ini harus diberikan informasi lengkap dan diajak bermusyawarah tentang pemukiman kembali dan alternatif-alternatif lain.
- 4) Lembaga-lembaga sosial dan budaya dari penduduk yang dipindahkan dan penduduk setempat di lokasi pindahan

<sup>11</sup> Kuswartojo, Tjuk dan Suparti Amir Salim. *Perumahan dan Pemukiman Yang Berwawasan Lingkungan*. Direktorat Jenderal pendidikan Dan Kebudayaan. Jakarta. 1997. Hlm.21.

<sup>12</sup> Andy, *Ibid*. Hlm.52.

harus didukung dan dimanfaatkan sebaik mungkin. Penduduk yang dipindahkan harus dapat berintegrasi secara ekonomi dan sosial dengan penduduk setempat di lokasi pindahan.

- 5) Sedapat mungkin pemukiman kembali harus dirancang dan dilaksanakan sebagai bagian dari proyek.
- 6) Seluruh biaya pemukiman kembali dan ganti rugi harus diperhitungkan dalam rencana biaya dan manfaat proyek.

#### **b. Prosedur Pelaksanaan Relokasi**

Terdapat banyak langkah-langkah yang harus dilaksanakan sebagai prosedur Relokasi. Ridlo mengungkapkan beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai prosedur relokasi sebagai berikut :<sup>13</sup>

- 1) Pendekatan yang interaktif kepada masyarakat yang terkena relokasi dalam rangka menginformasikan rencana proyek relokasi tersebut.
- 2) Pembentukan forum diskusi warga sebagai wadah untuk menggali respon, aspirasi warga dan peranserta warga dalam proyek peremajaan. Kegiatan forum diskusi ini dilaksanakan mulai dari perencanaan hingga terlaksananya proyek. Hal-hal yang dibicarakan dalam forum diskusi diantaranya kesepakatan besarnya kompensasi, pengurusan surat-surat hak atas tanah, penyusunan jadwal kepindahan, perancangan prosedur kepindahan dan sebagainya.
- 3) Pekerjaan fisik berupa pengukuran yang bermanfaat bagi penentuan besarnya kompensasi bagi masing-masing warga, penyiapan prasarana dan sarana lingkungan di lokasi yang baru.

---

<sup>13</sup> Ridlo. *Ibid.* Hlm.96.

- 4) Penyusunan rencana penempatan lokasi rumah tempat tinggal baru dengan memperhatikan aspirasi warga.
- 5) Setelah pemindahan warga ke lokasi baru dilaksanakan, perlu diadakan bimbingan dan pembinaan kepada warga agar dapat segera menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru.

Bank dunia (1999) merekomendasikan bahwa sebelum memutuskan rencana relokasi, negara-negara berkembang perlu mempersiapkan kerangka rencana atau kerangka kebijakan pemukiman kembali secara matang dan program dikembangkan atas dasar partisipatif, sehingga keputusan untuk pindah atau dimukimkan kembali dibuat sendiri oleh masyarakat setempat dan secara teguh mengikat anggota-anggotanya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan program relokasi :

- 1) Diberikan penjelasan yang memadai mengenai pilihan dan hak-hak mereka sebagai orang yang akan direlokasi.
- 2) Diberikan konsultasi dan ditawarkan pilihan-pilihan di antara alternatif pemukiman kembali yang dapat dilakukan secara layak dipandang dari segi teknis dan ekonomis.
- 3) Diberikan kompensasi secara tepat dan efektif dengan penggantian penuh atas kehilangan aset yang secara langsung terkena program relokasi.
- 4) Jika relokasi diperlukan, bantuan (seperti biaya pindah) diberikan selama relokasi.
- 5) Setelah pemindahan, diberikan bantuan (seperti pekerjaan jangka pendek, bantuan nafkah atau biaya hidup) secara layak selama masa transisi yang cukup memadai.

- 6) Disediakan bantuan pengembangan bagi keberlanjutan perumahan dan kawasan pemukiman.

Davidson dalam Andy (2003 : 54) berpendapat bahwa relokasi yang dipilih jauh dari pemukiman asli dapat menyebabkan tekanan, khususnya jika lokasi itu berbeda keadaan lingkungannya, pola kehidupan ekonomi dan mata pencaharian. Relokasi ke kawasan yang jauh harus dapat dihindari sedini mungkin.

Penentuan lokasi yang akan digunakan untuk program relokasi masyarakat juga merupakan hal penting, karena berdasarkan lokasi tersebut akan mempengaruhi kesediaan masyarakat untuk pindah ke lokasi yang telah ditetapkan. Persyaratan lokasi tersebut, umumnya mengacu kepada hal-hal yang menyangkut kesesuaian dengan peraturan dan keamanan serta keselamatan penghuninya.<sup>14</sup> Hal ini telah dirumuskan dalam Petunjuk Perencanaan Kawasan Perumahan Kota Departemen Pekerjaan Umum, dengan menetapkan beberapa syarat dasar untuk merencanakan lokasi perumahan yaitu :

- 1) Aksesibilitas, yaitu kemungkinan pencapaian dari dan ke kawasan. Aksesibilitas dalam kenyataannya berwujud jalan atau transportasi.
- 2) Kompabilitas, yaitu keserasia dan keterpaduan antar kawasan yang menjadi lingkungannya.
- 3) Fleksibilitas, yaitu kemungkinan pertumbuhan fisik / pemekaran kawasan perumahan.
- 4) Ekologi, yaitu keterpaduan antara tatanan kegiatan alam yang mewadahnya.

---

<sup>14</sup> *Ibid.* Hlm.112.

### c. Dampak Relokasi

Evaluasi yang dilakukan oleh Bank Dunia dalam artikel "*Involuntary resettlement*" (1990) terhadap beberapa program relokasi di negara-negara berkembang lebih banyak menunjukkan dampak negatif. Program-program tersebut seperti memindahkan ke wilayah lain (transmigrasi), penggusuran untuk kepentingan proyek dan pemindahan paksa untuk eksploitasi sumber daya alam di beberapa negara selalu menyisakan masalah, tidak saja menyangkut kerugian materil di lokasi lama tetapi juga kesulitan-kesulitan atau masalah yang dihadapi "korban" di lokasi baru.

*Asian Development Bank* dalam salah satu temuan studinya mengemukakan beberapa dampak negatif yang mungkin ditimbulkan oleh program relokasi yang tidak direncanakan secara matang di dalam pembangunan perkotaan yakni bahwa perumahan struktur dan system masyarakat, hubungan sosial dan pelayanan sosial dapat terganggu. Sumber-sumber produktif termasuk lahan, pendapatan dan mata pencaharian dapat hilang. Kultur budaya dan kegotong-royongan yang ada dalam masyarakat dapat menurun. Kehilangan sumber penghidupan dan pendapatan dapat mendorong timbulnya eksploitasi ekosistem, kesulitan hidup, ketegangan sosial dan kemiskinan (ADB, November 1995).

Sehubungan dengan hal tersebut, *Word Bank* (2001) melihat dampak yang mungkin timbul bagi penduduk yang dipindahkan atau orang terkena dampak relokasi adalah :

- 1) Kehidupan penduduk dapat terkena akibat atau dampak yang menyebabkan penderitaan. Banyak mata pencaharian dan kekayaan yang hilang. Pemeliharaan kesehatan cenderung menurun. Mata rantai antara produsen dan

konsumen seringkali terputus dan pasar tenaga kerja lokal menjadi terpecah-pecah.

- 2) Jaringan-jaringan sosial informal yang merupakan bagian dari system pemeliharaan kehidupan sehari-hari (seperti kebiasaan saling tolong-menolong dan sumber dukungan sosial ekonomi) menjadi rusak.
- 3) Organisasi-organisasi setempat dan perkumpulan-perkumpulan formal dan informal lenyap karena bubarnya anggota mereka. Masyarakat dan otoritas tradisional dapat kehilangan pemimpin mereka.
- 4) Efek kumulatif ialah rusaknya system sosial dan ekonomi setempat yang secara mendasar menimbulkan dampak negatif bagi sejumlah besar penduduk.

Menurut pendapat Ridlo yang dikutip oleh Andy (2003 : 51), mengemukakan dua alternatif pemberian ganti rugi (kompensasi) dalam proses relokasi, yaitu :

- 1) Pemberian kompensasi atas tanah dan/atau bangunan serta fasilitas lainnya berupa uang tunai senilai dengan nilai jual tanah dan/atau bangunan serta fasilitas lainnya yang dilepaskan.
- 2) Pemberian kompensasi atas tanah/atau bangunan serta fasilitas lainnya berupa hal yang sama dengan yang dilepaskan pada lokasi baru yang telah ditetapkan dan disepakati.

Dari uraian yang telah dijabarkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian relokasi adalah penempatan kembali suatu kelompok masyarakat dari suatu tempat tinggal atau permukiman sebelumnya yang dipindahkan ke tempat baru yang sesuai dengan peruntukannya.

## 2.2. Taat Hukum

### 2.2.1. Pengertian Hukum

Menurut Utrecht (dalam Edison, 2006 : 56 – 57), hukum adalah himpunan peraturan / perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu hukum harus ditaati oleh masyarakat. E.M. Meyers berpendapat bahwa hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan pada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan yang menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa negara dalam melakukan tugasnya. Sementara itu, S.M. Amin berpendapat bahwa hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi dan memiliki tujuan untuk mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpeliharakan.

Dalam kamus bahasa Indonesia (Depdikbud 1995), merumuskan pengertian hukum sebagai berikut :

- a. Peraturan yang dibuat oleh penguasa/pemerintah, atau adat yang berlaku bagi semua orang di suatu masyarakat / Negara.
- b. Undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup manusia.
- c. Patokan yang menetapkan mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Lawrence M. Friedman, ada tiga elemen atau aspek dari system hukum, yaitu : *structure*, *substance* dan *legal culture*. *Structure* menyangkut lembaga-lembaga yang berwenang membuat dan melaksanakan undang-undang (lembaga Pengadilan dan lembaga Legislatif). Aspek kedua, adalah substansi yaitu materi atau bentuk dari peraturan perundang-undangan yang terbagi dalam hukum tertulis/kodifikasi (*continental*) dan *common law system*. Sedangkan aspek ketiga dari system hukum adalah apa yang disebut dengan legal

culture, yaitu sebagai sikap orang terhadap hukum dan system hukum, yaitu menyangkut kepercayaan akan nilai, pikiran atau ide dan harapan mereka *people's attitudes toward law and the legal system, their beliefs, values, ideas and expectations*. Friedman mengungkapkan empat fungsi system hukum, pertama sebagai bagian dari system kontrol sosial (*social control*) yang mengatur perilaku manusia; kedua, sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa (*dispute settlement*). Dalam hal ini system hukum dilihat sebagai agen penyelesaian konflik atau sengketa. Ketiga, system hukum memiliki fungsi sebagai *social engineering function*. Hukum menjadi bagian dari perencanaan sosial dalam kebijakan publik. Keempat, hukum sebagai *social maintenance*, yaitu fungsi yang menekankan peranan hukum sebagai pemeliharaan *status quo* yang tidak menginginkan perubahan.<sup>15</sup>

Soerjono Soekanto dalam Radjagukguk (2001 : 496), mengemukakan bahwa indikator kesadaran hukum adalah :

- a. Pengetahuan hukum, artinya seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu diatur oleh hukum.
- b. Pemahaman hukum, artinya seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, terutama dari segi isinya.
- c. Sikap hukum, artinya seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.
- d. Perilaku hukum, dimana seseorang berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku.

Jadi apabila seseorang menilai hukum itu negatif, maka ia akan berperilaku melanggar hukum dan apabila ia menilai hukum itu positif, maka ia akan berperilaku mematuhi hukum. Dengan demikian sikap hukum dapat mempengaruhi perilaku hukum.

<sup>15</sup> Erman Rajagukguk dan Ridwan Khairandy. 2001. *Hukum dan Lingkungan Hidup di Indonesia (T. Gayus Lumbun : Peran Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup)*. Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Hlm.496-497.

Hukum berupa aturan yang dibuat oleh pemerintah dan harus ditaati oleh setiap orang (baik pemerintah maupun masyarakat). Sehingga dapat dikatakan bahwa di dalam kaidah hukum terdapat ketaatan yang harus dipatuhi oleh semua pihak.

Hukum merupakan pedoman yang melandasi terlaksananya penertiban DAS Ciliwung untuk mewujudkan normalisasi sungai sehingga program relokasi masyarakat yang bermukim di bantaran sungai tersebut dapat terlaksana dengan baik. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, ketaatan masyarakat bantaran sungai Ciliwung terhadap hukum lingkungan hidup dan kepentingan umum dapat digunakan untuk menganalisis pengaruh program relokasi masyarakat bantaran sungai Ciliwung terhadap Ketahanan Wilayah di Provinsi DKI Jakarta.

### **2.2.2. Penegakan Hukum**

R.E. Baringbing dalam Edison (2006 : 58), mengapa hukum harus ditegakkan ? karena hukum mempunyai tujuan untuk mengatur masyarakat agar damai dan adil dengan mengadakan keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi, sehingga tiap-tiap anggota masyarakat memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi haknya. Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kenyataan dan ditaati oleh masyarakat. Selain itu menurut Indriyanto Seno Aji, penegakan hukum terletak pada integritas, kejujuran dan keberanian personalitas pihak-pihak yang terkait di dalamnya, kesemuanya untuk keadilan bukan untuk kekuasaan.

Sorjono Soekanto berpendapat bahwa hakikat penegakan hukum adalah pengaturan hubungan hukum setiap kesatuan hukum dalam suatu masyarakat hukum. Pengaturan ini meliputi aspek pencegahan pelanggaran hukum (*regulation aspect*), penyelesaian sengketa hukum (*settlement of dispute*) dan pemulihan kondisi atau kerugian akibat

pelanggaran itu (*reparation or compensation*). Ketiga komponen akhir dari suatu system hukum yaitu evaluasi hukum.<sup>16</sup>

Dalam penelitian Edison tentang konflik pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan pengaruhnya terhadap Ketahanan Daerah (2006 : 59), mengungkapkan bahwa penegakan hukum yang dimaksud adalah pemberdayaan hukum yang mampu menjadi sarana untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Sehubungan dengan permasalahan yang sering terjadi dalam kasus-kasus pelanggaran hukum pada pembebasan tanah, pemerintah bertindak sewenang-wenang atau rakyat bertindak anarkis, yang merupakan bagian dari komponen ketahanan daerah, maka seharusnya terhadap mereka dikenakan tindakan atau sanksi hukum yang membuat mereka jera dan tidak akan mengulangi perbuatan yang sama atau sejenis.

Secara konseptual, menurut Sorjono Soekanto mengemukakan bahwa inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah / pandangan-pandangan nilai yang mantap dan mengejawantahkan serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan (sebagai "*social engineering*"), melihat dan mempertahankan (sebagai "*social control*") kedamaian pergaulan hidup. Agar hukum dapat berfungsi dengan baik, maka diperlukan keserasian dalam hubungan antara empat faktor, yaitu :<sup>17</sup>

a. Hukum atau peraturan itu sendiri.

Undang-undang dalam arti materiil adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah; dengan demikian maka undang-undang dalam pembuatannya mencakup : pertama, peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga Negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah Negara; kedua,

<sup>16</sup> Sorjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bina Cita. Bandung. 1983. Hlm.9.

<sup>17</sup> Ibid. Hlm.14-15.

peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja.

- b. Mentalitas petugas yang menegakan hukum. Penegak hukum antara lain Polisi, Jaksa, Hakim dan Pengacara perlu mental yang baik untuk menegakan hukum dengan baik.
- c. Fasilitas yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan hukum. Jika peraturan perundang-undangan sudah baik, penegakan hukumnya sudah baik, akan tetapi fasilitas kurang memadai (dalam ukuran tertentu), maka penegakan hukum tidak berjalan dengan semestinya.
- d. Kesadaran hukum, kepatuhan hukum dan perilaku warga masyarakat.

Dalam fungsinya sebagai sarana untuk terselenggaranya pembangunan, maka hukum itu menurut Michael Hager dalam Edison (2006 : 62) memiliki tiga sektor pengabdian, yaitu :

- a. Hukum sebagai alat penertib (*ordering*).

Dalam rangka penertiban ini, hukum dapat menciptakan suatu kerangka bagi pengambilan keputusan politik dan pemecahan sengketa / konflik yang mungkin timbul melalui suatu hukum acara yang baik, ia pun dapat meletakkan dasar hukum bagi penggunaan kekuasaan.

- b. Hukum sebagai alat keseimbangan (*balancing*).

Fungsi hukum dapat menjaga keseimbangan dan keharmonisan antara kepentingan Negara / kepentingan umum dan kepentingan perorangan.

- c. Hukum sebagai katalisator.

Sebagai katalisator, hukum dapat membantu untuk memudahkan terjadinya proses perubahan melalui pembaharuan hukum (*law reform*) dengan bantuan tenaga kreatif di bidang profesi hukum.

Sektor pertama dari fungsi hukum yaitu sebagai alat penertib (*ordering*) dapat dijadikan sebagai bahan analisis untuk mengetahui pengaruh hukum dalam rangka penertiban DAS Ciliwung terhadap ketahanan wilayah di Provinsi DKI Jakarta. Hal inilah yang menjadi alasan bagi peneliti untuk mengangkat aspek hukum sebagai variabel dalam penelitian ini.

Sehingga dapat dikatakan bahwa di dalam kaidah hukum terdapat ketaatan yang harus dipatuhi oleh semua pihak. Dengan adanya hukum, kendala penertiban seperti adanya konflik kepentingan tidak lagi dipecahkan menurut siapa yang paling kuat, melainkan berdasarkan aturan yang berorientasi pada kepentingan-kepentingan dan nilai-nilai obyektif yang terdapat pada hukum itu sendiri.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa hukum merupakan himpunan peraturan / perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu hukum harus ditaati oleh masyarakat. Berkaitan dengan upaya penertiban, maka hukum dapat dikatakan sebagai himpunan peraturan yang berisi perintah dan larangan tentang tata tertib kehidupan masyarakat dan menjadi pedoman bagi aparatur Negara dalam melaksanakan tugasnya.

Hukum merupakan pedoman yang melandasi terlaksananya penertiban DAS Ciliwung untuk mewujudkan normalisasi sungai sehingga program relokasi masyarakat yang bermukim di bantaran sungai tersebut dapat terlaksana dengan baik. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, ketaatan masyarakat bantaran sungai Ciliwung terhadap hukum lingkungan hidup dan kepentingan umum dapat digunakan untuk menganalisis pengaruh program relokasi masyarakat bantaran sungai Ciliwung terhadap Ketahanan Wilayah di Provinsi DKI Jakarta.

### 2.2.3. Hukum Lingkungan Hidup

Perlunya strategi pendekatan hukum yang tepat dalam penyelesaian kasus lingkungan adalah dengan memanfaatkan secara optimal keberadaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH). Oleh karena itu, adanya aparat pemerintah yang memahami secara benar pelaksanaan dan penegakan hukum lingkungan sebagai hukum fungsional, menjadi bagian integral dari upaya tersebut.

Sehubungan dengan hal itu, Ahmad Husni berpendapat bahwa :<sup>18</sup>

Berbagai fakta menunjukkan bahwa pelaksanaan dan penegakan hukum lingkungan selama ini didominasi oleh bentuk-bentuk penegakan hukum yang bersifat represif. Ternyata bahwa penyelesaian masalah lingkungan melalui pendekatan represif tersebut sebagian besar tidak memberikan hasil yang memuaskan, karena (i) adanya persepsi yang keliru tentang pola penyelesaian masalah lingkungan oleh (sebagian) aparat penegak hukum dan masyarakat; (ii) sulitnya proses pembuktian, yang disebabkan kompleksitas faktor yang menjadi penyebab pencemaran dan lemahnya profesionalitas aparat penegak hukum; (iii) mahal biaya finansial dan sosial yang harus dipikul masyarakat yang umumnya memiliki posisi sosial ekonomi lemah; (iv) rumitnya birokrasi peradilan untuk kasus lingkungan sebagai kendala non-yuridis bagi para korban pencemaran lingkungan.

Soerjani berpendapat bahwa permukiman memiliki keterkaitan yang erat dengan masalah penduduk dan juga erat hubungannya dengan lingkungan. Pertambahan penduduk dan urbanisasi mengakibatkan timbulnya permukiman-permukiman di perkotaan yang dibangun diatas tanah negara. Tetapi manusia bertambah banyak dan akal pikirannya terus berkembang, sehingga cara hidup dan bermukim tidak lagi diserasikan dengan lingkungan alam. Justru sebaliknya, lingkungan yang dirubah untuk dicocokkan dengan cara hidup dan bermukim

---

<sup>18</sup> Koesnadi Hardjosoemantri. 2001. *Hukum Dan Lingkungan Hidup Di Indonesia*. Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta. Hlm.498.

manusia. Ruang dan tanah dirombak untuk menampung berbagai bentuk perumahan dan pemukiman.<sup>19</sup>

Daya dukung alam dapat dimanfaatkan dengan baik apabila diikuti pula oleh pengelolaan tata ruang yang baik. Salah satu diantaranya adalah pengembangan pola tata ruang guna mencegah penggunaan lahan secara tidak terkendali sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan.<sup>20</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut, Ahmad Husni dan Bambang Sugiono dalam Koesnadi (2001 : 498) menguraikan strategi pendekatan hukum dalam penyelesaian masalah lingkungan dilakukan dengan pendekatan :

1) Pendekatan hukum lingkungan administratif, yang memiliki dua instrumen yaitu :

a. Instrumen Perizinan. Pengelolaan lingkungan hanya dapat berhasil menunjang pembangunan berkelanjutan jika administrasi pemerintahan berfungsi secara efektif dan terpadu. Salah satu sarana hukum utama untuk mencegah dan menanggulangi masalah lingkungan adalah sistem perizinan. Bertumpu pada konsep kewenangan, izin tertulis diberikan dalam bentuk penetapan (*beschikking*) penguasa.<sup>21</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut Spelt N.M dan ten Berge J.M, berpendapat bahwa .<sup>22</sup>

“...dengan mengikat tindakan pada suatu sistem perizinan, pembuat undang-undang dapat mengejar berbagai tujuan. Motif untuk menggunakan sistem izin dapat berupa : (i)

<sup>19</sup> Sugiaro Wirjosiswojo. 1993. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pola Permukiman Penduduk Di Daerah Alur Sungai (Studi Kasus Ciliwung)*. Magister Ilmu Lingkungan Pascasarjana UI. Jakarta. Hlm.31.

<sup>20</sup> *Ibid.* Hlm.38.

<sup>21</sup> Koesnadi. *Ibid.* Hlm.499.

<sup>22</sup> Philipus M. Hadjon. 1993. *Pengantar Hukum Perizinan*. Yuridika. Surabaya. Hlm.4.

keinginan mengerahkan atau mengendalikan (struen) aktivitas-aktivitas tertentu (izin bangunan); (ii) mencegah bahaya bagi lingkungan (izin lingkungan); (iii) keinginan melindungi objek-objek tertentu (izin terbang, izin membongkar pada monument-monumen); (iv) hendak membagi benda-benda yang sedikit (izin menghuni di daerah padat penduduk) dan (v) pengarahannya dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas”.

Perizinan merupakan instrumen pengendalian masalah lingkungan yang paling penting, sebab izin berfungsi untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan terjadinya masalah lingkungan. Sebagai instrumen hukum administrasi, pemberian izin merupakan awal proses pengendalian hukum yang hanya mungkin dapat berlaku efektif, ketika diikuti adanya pengawasan yang proporsional dan ketat oleh pemerintah sebagai aparat penegak hukum, untuk menjamin bahwa pemegang izin telah dan akan tetap melaksanakan isi yang tertuang dalam izin secara konsisten. Sebagai konsekuensinya, jika izin tidak dilaksanakan sesuai dengan isinya, maka pemerintah selaku aparat penegak hukum melalui kewenangan diskresi (*discretionary power*) dapat menerapkan sanksi administrasi, seperti penggunaan instrumen paksaan nyata, uang paksa, denda administrasi dan pencabutan izin. Bahkan dalam hal terdapat indikasi adanya elemen-elemen tindak pidana, sanksi administrasi dapat diterapkan bersama sanksi pidana.<sup>23</sup>

- b Instrumen Ekonomi. Koesnadi Hardjasoemantri (2001 : 503) berpendapat bahwa dalam kerangka pengelolaan lingkungan, peranan pemerintah untuk mengembangkan dan menerapkan perangkat hukum yang bersifat preemtif, preventif dan proaktif melalui pemanfaatan instrumen ekonomi akan membawa implikasi sosial dan ekonomi yang positif dalam masyarakat sebagai berikut :

---

<sup>23</sup> Koesnadi. *Ibid.* 500.

Implikasi sosial. Mengingat sistem pembangunan di Indonesia sebagian besar kegiatan pembangunan berada di bawah bimbingan pemerintah, sudah selayaknya bahwa masalah perlindungan lingkungan diintegrasikan ke dalam proses perencanaan pembangunan. Sedangkan implikasi ekonomi dapat dilihat melalui tiga faktor yaitu (i) isu lingkungan yang menonjol sebagai wujud kesadaran besarnya pencemaran akibat kegiatan ekonomi, menjadikan pakar ekonomi menerjemahkan faktor pelestarian lingkungan dalam perhitungan ekonomi.

Dengan demikian, pemanfaatan secara optimal perangkat hukum yang bersifat preemtif, preventif dan proaktif sebagai instrumen ekonomi dapat mencegah timbulnya masalah lingkungan pada masa depan sebagai resiko tinggi yang harus dipikul bersama.

Dalam penelitian ini, pendekatan hukum lingkungan administratif akan digunakan untuk mengetahui latar belakang permasalahan program relokasi masyarakat yang bermukim dibantaran sungai Ciliwung.

## 2) Penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan.

Dibutuhkan sarana hukum yang dapat digunakan untuk penyelesaian sengketa yang seringkali menjadi sumber konflik dalam pelaksanaan program relokasi. Disamping itu penyelesaian sengketa diluar pengadilan juga sangat dibutuhkan baik oleh masyarakat maupun pemerintah untuk menghindari terjadinya konflik yang mengarah kepada ancaman terhadap aspek keamanan manusia. Ahmad Husni dalam Koesnadi (2001 : 507) berpendapat bahwa penyelesaian sengketa lingkungan diluar pengadilan (*extra judicial settlement dispute*) dapat dilakukan melalui :

- a. **Negosiasi**, merupakan prosedur yang paling praktis dan murah, karena para pihak yang bersengketa dapat bertemu langsung untuk mengajukan tinjauan krisis dan usulan-usulan solusi.
- b. **Mediasi**, prosedur yang dilakukan atas inisiatif dari salah satu pihak dan disepakati oleh semua pihak melalui penunjukan mediator. Secara teratur mediator menyampaikan pesan, melakukan komunikasi, serta mengatur pertemuan antara para pihak. Masing-masing pihak dapat bertindak secara pribadi, melalui pengacara yang menjadi kuasa hukumnya atau atas izin mediator menunjuk kuasa yang bukan pengacara.
- c. **Konsiliasi**, umumnya lebih formal dari mediasi dan dijadikan alternatif ketika mediasi gagal. Para konsiliator memiliki peran yang lebih pro aktif dan tingkat keterlibatan lebih intensif dalam penyelesaian sengketa dibandingkan peran mediator.

Pengaturan penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan dalam UUPH terdapat pada Pasal 31 s/d Pasal 33. Dinyatakan dalam Pasal 31 bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian dan atau mengenai "tindakan tertentu" guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan. Pasal 32 menegaskan bahwa dalam penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan dapat digunakan pihak ketiga, baik yang memiliki kewenangan mengambil keputusan maupun yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan, sebagai pihak yang netral. Selanjutnya, ketentuan Pasal 33 menyebutkan bahwa pemerintah dan atau masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa pelayanan sengketa lingkungan yang bebas dan tidak memihak yang diatur dengan peraturan pemerintah.

Bersumber dari berbagai hal yang telah diuraikan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian taat hukum adalah ketaatan terhadap

keseluruhan aturan yang dibuat oleh pemerintah di suatu Negara, yang disertai dengan *reward* dan *punishment*.

### 2.3. *Human Security*

#### 2.3.1. Gagasan Pemikiran *Human Security*

Munculnya gagasan *human security* dilatarbelakangi oleh berakhirnya perang dingin yang menciptakan momentum baru hingga memberi ruang bagi penafsiran kembali makna keamanan. Pergeseran orientasi keamanan, tidak semata-mata pada keamanan Negara dari ancaman militer Negara lain, melainkan sudah meluas untuk melakukan tugas-tugas di luar pertahanan teritorial. Perhatian *human security* diperkuat oleh gelombang globalisasi yang melahirkan arus balik karena beberapa efek negatifnya terhadap Negara-negara lemah, kelompok dan individu tertentu. Menguatnya gagasan dan upaya *human security* merupakan reaksi terhadap masalah-masalah kemanusiaan yang melanda dunia saat ini, mulai dari penggungsi akibat konflik dan kekerasan fisik, penjualan anak-anak dan wanita, masalah pangan, terorisme, perdagangan senjata ilegal, pelanggaran hak azasi manusia dan sebagainya.

Gagasan *human security* nampak lebih jelas dalam laporan UNDP mengenai *Human Development Report of the United Nations Development Program* pada tahun 1994. Namun sesungguhnya gagasan atau pengertian *human security* mulai menjadi perdebatan setelah perang dingin berakhir. Salah satu sumber penting yang memunculkan *human security* adalah perdebatan tentang gagasan mengenai perlucutan senjata dan pembangunan yang banyak terjadi di berbagai forum di PBB dalam rangka merespon perlombaan senjata pada era perang dingin. Demikian pula kegiatan dari beberapa komisi independent seperti Komisi Brandt membantu merubah focus analisa keamanan

nasional atau keamanan Negara menjadi keamanan untuk warga Negara.<sup>24</sup>

### 2.3.2. *Human Security Menurut Para Ahli*

Astrid Suhrke 1999 dalam J. Kristiadi (2003), menyarankan human security sebaiknya menekankan pada perlindungan kelompok lemah yang secara potensial mudah menjadi korban. Ia mengkatagorikan dalam tiga katagori : mereka yang menjadi korban perang dan internal konflik, mereka yang hidup dalam tingkat dibawah garis kemiskinan dan mereka yang menjadi korban bencana alam.

Dr. Sverre Lodgaard (2000) dari Norwegia Institute of International Affairs mempunyai pendapat yang justru mempersempit definisi dari human security yaitu perlindungan terhadap pihak-pihak yang lemah selama terjadinya konflik kekerasan. Alasan yang memberikan latarbelakang penciutan definisi human security sebagai berikut :

- a. Masalah keamanan muncul pada waktu ada ancaman kekerasan. Oleh sebab itu kasus bencana sosial-ekonomi tidak dapat dikatagorikan dalam ruang lingkup human security mengingat hal itu tidak selalu dapat mengarah kepada tindakan kekerasan.
- b. Masalah keamanan selalu berdimensi "politik" dalam arti melibatkan manusia dan kontrol. Sementara itu, bencana alam sangat jarang dapat dicegah, karena hal itu adalah kejadian yang berada diluar kontrol manusia. Dengan demikian bantuan kemanusiaan paling baik dilakukan dengan cara-cara yang sama sekali menghilangkan pertimbangan politik dan keamanan. Dalam perspektif ini human security dirumuskan sebagai kebebasan dari takut akibat ulah manusia yang dapat menimbulkan kekerasan fisik kepada warga Negara.

<sup>24</sup> J. Kristiadi. 2003. Artikel : *National Security, Human Security, HAM dan Demokrasi*. Hlm.1. [http://www.propatria.or.id/download/Paper%20Diskusi/human\\_security\\_dan\\_ham\\_jk.pdf](http://www.propatria.or.id/download/Paper%20Diskusi/human_security_dan_ham_jk.pdf)

Menurut Kusnanto Anggoro, keamanan merupakan istilah yang secara sederhana dapat dimengerti sebagai suasana “bebas dari segala bentuk ancaman bahaya, kecemasan dan ketakutan”.<sup>25</sup>

Pada tahun 1994 *United Nations Development Program* (UNDP) menjelaskan konsep (*human security*) yang mencakup : *economic security, food security, health security, enviromental security, personal security, community security, dan political security*. Secara ringkas UNDP mendefinisikan *human security* sebagai .<sup>26</sup>

*“first, safety from such chronic threats such as hunger, disease, and repression. And, second, ...protection from sudden and hurtful disruptions in the patterns of daily life — whether in homes, in jobs or in communities”*. Jadi, secara umum, definisi *human security* menurut UNDP mencakup “*freedom from fear and freedom from want*. Kebebasan dari rasa takut akibat ulah manusia yang dapat menimbulkan kekerasan fisik kepada warga negara.

UNDP dalam laporannya : “*Human Development Report of the United Nations Development Program*” (1994) mulai mengangkat gagasan *Human Security*, yang dilatarbelakangi oleh pergeseran fokus analisa keamanan nasional atau keamanan negara menjadi keamanan untuk warga negara (*Human Security of the People* atau *Societal Security*). UNDP merumuskan *human security* dalam beberapa komponen sebagai berikut (1) keamanan ekonomi (*assured basic income*), (2) keamanan pangan (*physical and economic access to food*). (3) keamanan kesehatan (*relative freedom from disease and infection*), (4) keamanan lingkungan (*access to sanitary water supply, clean air and a non-degraded land system*), (5) keamanan sosial (*security of cultural identity*), (6) Keamanan individual (*security from physical violence and*

<sup>25</sup> Kusnanto Anggoro. 2002. *Perumusan Kembali Keamanan Nasional : definisi, lingkup, perspektif*. Bahan diskusi Focus FGroup Discussion, WGD-SR ProPatria. Indonesian Working Group on Security Sector Reform-ProPatria.

<sup>26</sup> Edy Prasetyono. 2003. *Human Security*. Laporan Ketua Departemen Hubungan Internasional, Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Anggota Working Group on Security Sector Reform. Hlm.2. [www.propatria.or.id/download/Paper%20Diskusi/human\\_security\\_ep.pdf](http://www.propatria.or.id/download/Paper%20Diskusi/human_security_ep.pdf).

*threat*), dan (7) keamanan politik (*protection of basic human rights and freedom*).<sup>27</sup>

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, dapat diambil 2 rumusan konsep keamanan manusia (*human security*) dari UNDP untuk menganalisa pengaruh program relokasi masyarakat terhadap Ketahanan Wilayah. Kedua rumusan konsep tersebut adalah keamanan lingkungan (*access to sanitary water supply, clean air and a non-degraded land system*), dan Keamanan individual (*security from physical violence and threat*)

#### a. Keamanan Lingkungan

Rumusan keamanan lingkungan yang bersumber dari konsep *human security* pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada manusia dari dampak buruk kerusakan lingkungan atau bencana alam, dan menurunnya kualitas lingkungan hidup. Secara umum tujuan pelaksanaan program relokasi masyarakat yang bermukim di bantaran sungai Ciliwung adalah untuk mengatasi banjir di Jakarta. Disamping itu, dengan terlaksananya program relokasi maka upaya penertiban kelestarian DAS Ciliwung dapat diwujudkan secara optimal. Bila hal tersebut dapat dilaksanakan dengan baik maka akan memperkuat Ketahanan Wilayah DKI Jakarta. Karena aspek keamanan merupakan aspek kehidupan manusia yang terlingkup dalam kajian Ketahanan Nasional yang dijabarkan kembali dalam Ketahanan Wilayah. Dalam hal ini keamanan lingkungan sebagai unsur dari konsep keamanan manusia dapat dijadikan sarana untuk menganalisa pengaruh program relokasi masyarakat terhadap Ketahanan Wilayah. Hal ini juga didukung oleh pendapat J. Kristiadi (2003 : 4) yang mengungkapkan bahwa perlunya memperhatikan lingkungan dalam proses pembangunan untuk menjamin keamanan manusia.

<sup>27</sup> J. Kristiadi. 2003. Artikel : *National Security, Human Security, HAM dan Demokrasi*. Hlm.1. [http://www.propatria.or.id/download/Paper%20Diskusi/human\\_security\\_dan\\_ham\\_jk.pdf](http://www.propatria.or.id/download/Paper%20Diskusi/human_security_dan_ham_jk.pdf)

b. Keamanan Individu

Dalam hal ini, aspek keamanan personal / individu yang terlingkup dalam konsep *human security* bertujuan melindungi manusia / orang dari kekerasan fisik, baik dari aparaturnegara, negara lain dan sesama individu. Bagi banyak orang sumber utama keresahan adalah kejahatan, terutama kejahatan yang disertai kekerasan.<sup>28</sup>

Masyarakat yang bermukim di bantaran sungai Ciliwung merupakan objek dari program relokasi yang akan dilaksanakan oleh pemerintah untuk mengatasi banjir tahunan di wilayah DKI Jakarta. Dikaitkan dengan aspek keamanan individu, maka pelaksanaan program relokasi tersebut harus dilakukan secara manusiawi. Hal ini perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat.

Berlandaskan pada definisi *human security* yang dikemukakan UNDP, maka dapat diklasifikasikan dua pendekatan dalam mengkaji konsep keamanan manusia, yaitu :<sup>29</sup>

- a. *Freedom from fear* (bebas dari rasa takut). Pendekatan ini membatasi praktek penegakan keamanan pada perlindungan individu dari konflik yang disertai kekerasan. Pendekatan ini memfokuskan pada kekerasan untuk dikelola secara realistik. Tindakan pengelolannya antara lain : bantuan darurat, pencegahan dan resolusi konflik (*peace building*).
- b. *Freedom from want* (bebas dari ketidakmampuan memiliki). Pendekatan ini memfokuskan pada gagasan bahwa kekerasan, kemiskinan, ketimpangan sosial, penyakit dan kerusakan lingkungan adalah konsep yang tidak terpisahkan dalam membahas keamanan manusia. Berbeda dengan pendekatan sebelumnya,

<sup>28</sup> Aditya Muharram dan Willy Aditya. *Human Security*. 14 Februari 2010. <http://bellaciaolaliberta.blogspot.com/2010/02/human-security.html>

<sup>29</sup> *Ibid.*

pendekatan ini memperluas fokusnya tidak terbatas pada kekerasan melainkan juga pada tujuan pembangunan.

Konsep *human security* bukan hanya melindungi, namun juga memperkuat masyarakat sebagai sarana mencapai keamanan. Masyarakat berkontribusi dengan mengidentifikasi dan menerapkan solusi terhadap ketidakamanan mereka sendiri. Konsep tersebut juga terkait dengan praktek pembangunan. Berdasarkan konsep *human security*, kemiskinan, ketimpangan merupakan akar penyebab dari kerentanan individu.<sup>30</sup>

Dapat disimpulkan bahwa pengertian *Human Security* adalah perlindungan keselamatan manusia melalui upaya keamanan lingkungan dan keamanan individu untuk memperoleh kesejahteraan hidup.

## 2.4. Ketahanan Wilayah

### 2.4.1. Pengertian

Konsep Ketahanan Wilayah pada prinsipnya dilatarbelakangi oleh pemikiran tentang konsep Ketahanan Nasional yang terbentuk melalui dinamika kehidupan rakyat Indonesia yang demikian kompleks. Rumusan konseptual Ketahanan Nasional menurut Wan Usman (2003 : 4-5) adalah :<sup>31</sup>

- a. Kekuatan apa "yang ada" pada suatu bangsa dan Negara sehingga ia mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya.
- b. Kekuatan apa "yang harus dimiliki" oleh suatu bangsa dan Negara sehingga ia selalu mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya, meskipun mengalami berbagai

<sup>30</sup> Aditya. *Opcit.*

<sup>31</sup> Wan Usman, dkk. *Daya Tahan Bangsa (Program Studi Pengkajian Ketahanan Nasional Program Pascasarjana Universitas Indonesia)*. Jakarta. 2003. Hlm.4 – 5.

gangguan, hambatan dan ancaman baik dari dalam maupun dari luar.

- c. Ketahanan (kemampuan) suatu bangsa untuk tetap jaya, mengandung makna keteraturan (*regular*) dan stabilitas, yang didalamnya terkandung potensi untuk terjadinya perubahan (*the stability idea of changes*).

Berdasarkan rumusan konseptual tersebut, Ketahanan Nasional dapat didefinisikan sebagai kondisi dinamis suatu bangsa, meliputi semua aspek kehidupan untuk tetap jaya, ditengah keteraturan dan perubahan yang selalu ada. Dari definisi ini tersirat didalamnya bahwa Ketahanan Nasional itu dapat berupa kondisi dinamis suatu bangsa, serta dapat pula merupakan metode untuk mencapai tujuan (*means and ends*) agar bangsa tetap jaya. Adapun aspek kehidupan yang dimaksud pada konsepsi Ketahanan Nasional terangkum dalam Astagatra yang terdiri dari Trigatra (3 aspek alamiah : geografi, sumber daya alam dan kependudukan) dan Pancagatra (5 aspek sosial : ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Pancagatra ini merupakan aspek kehidupan nasional yang menyangkut pergaulan hidup manusia dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan ikatan-ikatan, aturan-aturan atau norma-norma tertentu. Kelima aspek sosial ini mengandung unsur-unsur yang bersifat dinamis. Dalam aspek kehidupan nasional (Astagatra) tersebut, terjadi hubungan yang saling berkaitan secara utuh dan menyeluruh yang membentuk tata laku masyarakat dalam suatu sistem kehidupan nasional. Hubungan antara gatra dalam Trigatra adalah hubungan timbale balik dan serasi, selaras dan seimbang. Antara Trigatra dan Pancagatra, serta antara gatra-gatra itu sendiri terdapat hubungan timbal balik yang erat dinamakan korelasi dan interdependensi.<sup>32</sup> Dalam penelitian ini aspek yang relevan adalah aspek keamanan yang difokuskan pada unsur keamanan manusia (*human security*).

<sup>32</sup> Ansori. *Penambangan Pasir Di Wilayah Kepulauan Riau Dan Dampaknya Pada Ketahanan Wilayah*. PKN UI. 2007. Hlm 28 – 29.

Indra J. Piliang (dalam Bantarto Bandoro, editor : "Perspektif Baru Keamanan Nasional"), mengatakan bahwa dalam rangka mewujudkan Ketahanan Wilayah perlu pengembangan kemampuan daerah baik secara ekonomi, politik maupun budaya. Hal ini juga berdampak pada pembinaan Ketahanan Nasional, karena Ketahanan Wilayah akan mempengaruhi Ketahanan Nasional.<sup>33</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut, Soemarno Sodarsono dalam Edison (2006 : 83) mengemukakan bahwa Ketahanan Nasional yang merupakan suatu kondisi dinamik akan menjadi suatu kekuatan nyata dan efektif jika dibina secara bertahap melalui adanya Ketahanan Daerah / Wilayah, dimana Ketahanan Wilayah dibina melalui Ketahanan Lingkungan, selanjutnya Ketahanan Lingkungan dibina melalui Ketahanan Keluarga / Rumah Tangga dan pada akhirnya Ketahanan Keluarga akan bertumpu pada kekuatan-kekuatan unsurnya yaitu manusia yang memiliki Ketahanan Pribadi. Dalam kerangka pemikiran tersebut, Ketahanan Wilayah merupakan sub-sistem dari Ketahanan Nasional. Dengan demikian konsepsi Ketahanan Wilayah / Daerah memiliki pengertian analog dengan Ketahanan Nasional, yaitu kondisi dinamis suatu masyarakat Daerah / Wilayah yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan Daerah / Wilayah di dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, baik dari luar daerah maupun dari dalam daerah, dalam bentuk apapun, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan identitas, keutuhan, kelangsungan hidup masyarakat daerah.

Pendapat tersebut juga di dukung oleh Armaidly yang menjelaskan bahwa untuk mewujudkan Ketahanan Nasional diperlukan sistem penangkalan berlapis. Sistem ini berupa lingkaran-lingkaran yang

---

<sup>33</sup> Edison R. *Konflik Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dan Pengaruhnya Terhadap Ketahanan Daerah*. PKN UI. 2006. Hlm.82.

berpusat pada Ketahanan Pribadi tiap individu warga masyarakat, Ketahanan Daerah atau Wilayah dan Ketahanan Nasional.<sup>34</sup>

#### 2.4.2. Pembinaan Ketahanan Wilayah

R.M. Sunardi dalam Edison (2006 : 83) berpendapat bahwa pembinaan Ketahanan Wilayah/Daerah mencakup beberapa kegiatan pokok, yaitu :

- a. Mempertahankan dan memantapkan kondisi keuletan dan ketangguhan yang tercapai. Hal ini merupakan sesuatu yang dinamis, karena mencakup proses meningkatkan kualitas menuju ke arah yang lebih mantap atau seimbang, secara integral.
- b. Meningkatkan kondisi yang belum baik atau belum mantap.
- c. Penggalangan ATHG yang mempengaruhi kondisi keuletan dan ketangguhan daerah tersebut.

Pembinaan Ketahanan Wilayah dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana tingkat kondisi kesejahteraan dan keamanan yang telah dicapai, dengan menggunakan indikator tingkat pertumbuhan pembangunan, pemerataan pembangunan dan stabilitas Ketahanan Daerah. Hal ini dimaksudkan untuk menyiapkan rencana kedepan untuk mengembangkan kemampuan maksimal.

Untuk mengetahui tingkat Ketahanan Wilayah pada suatu waktu tertentu, sehingga pembinaannya bisa sesuai dengan kemampuan yang ada, maka diperlukan suatu metode tolak ukur ketahanan daerah, dengan landasan pemikiran antara lain :<sup>35</sup>

- a. Bahwa pembinaan ketahanan daerah mencakup unsur-unsur yang bersifat fisik dan abstrak.

<sup>34</sup> Armaidly Armawi. *Ketahanan Nasional Dan Pengembangannya*. Jurnal Panca Arga, edisi 2/Tahun 1. 2000. Hlm.22.

<sup>35</sup> Edison. *Ibid*. Hlm.84.

- b. Untuk mengukur kondisi ketahanan daerah perlu adanya penjabaran aspek kehidupan yaitu Astragatra menjadi unsur yang dominan dan parameter.
- c. Penjabaran Astragatra menjadi unsur dominan kemudian menjadi parameter dan sub-parameter berpegang pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, UUD 1945, Ketahanan Nasional dan Wawasan Nusantara.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan program relokasi masyarakat, maka tingkat ketahanan wilayah dapat diketahui melalui beberapa indikator sebagai tolak ukurnya sebagai berikut :

- a. Unsur pembinaan ketahanan wilayah yang dilaksanakan berupa pembangunan fasilitas fisik yaitu pembenahan infrastruktur lingkungan pada daerah aliran Sungai Ciliwung untuk kesejahteraan masyarakat Kota Jakarta, penyediaan lokasi pemukiman yang layak huni serta upaya penanggulangan ancaman banjir tahunan.
- b. Dimensi kesejahteraan dapat digunakan untuk mengukur ketahanan wilayah dengan menguraikan penjabaran aspek kehidupan masyarakat, seperti aspek sosial, ekonomi dan lain-lain.

## **BAB 3**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1. Tempat Dan Waktu Penelitian**

##### **3.1.1. Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di wilayah DKI Jakarta, khususnya pada lokasi rawan banjir permukiman penduduk bantaran Ciliwung yang akan direlokasi. Penetapan locus dari penelitian ini adalah Kawasan Kebon Baru Tebet Jakarta Selatan dan Pengadegan Pancoran Jakarta Selatan. Lokasi tersebut merupakan tempat yang direncanakan untuk pembangunan rumah susun yang dialokasikan sebagai permukiman baru bagi masyarakat bantaran Sungai Ciliwung yang direlokasi. Dua kawasan tersebut adalah lokasi DAS Ciliwung wilayah DKI Jakarta yang masuk dalam program relokasi.

##### **3.1.2. Waktu Penelitian**

Sedangkan perencanaan waktu yang ditetapkan untuk penelitian ini, akan dilaksanakan selama tiga bulan yaitu dari bulan Agustus sampai dengan bulan November 2010.

#### **3.2. Metode dan Teknik Pengumpulan Data**

##### **3.2.1. Metode Penelitian**

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini ditekankan pada pendekatan kuantitatif, namun juga tidak mengabaikan pendekatan kualitatif. Dengan pendekatan kuantitatif, penelitian dilakukan melalui teknik survei yang secara konseptual dipakai untuk mengukur hubungan dari variabel-variabel penelitian dan kemudian mengujinya secara statistik. Menurut pendapat Singarimbun (1989) yang dikutip oleh

An'anta Djamhari, survei adalah penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok, dengan maksud untuk penjelasan (*explanatory*) yakni untuk menjelaskan hubungan antara variabel-variabel penelitian.<sup>1</sup> Sedangkan pendekatan kualitatif yang dilaksanakan melalui kajian pustaka dan wawancara dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data dan informasi dari pembuat kebijakan program relokasi (Pemerintah) maupun LSM (sebagai organisasi control yang mengawasi pelaksanaan program-program pemerintah di masyarakat).

### 3.2.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggabungkan antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif, dilaksanakan melalui penelusuran data melalui pustaka dan kuesioner dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Penelusuran dokumen dan pustaka.
- b. Penetapan konstruk atau definisi konseptual yang bersumber dari analisis teoritis.
- c. Menyusun kisi-kisi instrumen penelitian dalam bentuk kuesioner yang dirangkum dalam instrumen penelitian berupa angket dengan menggunakan skala *Likert* (Skala 4).
- d. Menentukan jumlah sampel dari populasi yang telah ditentukan.
- e. Menguji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian.
- f. Menganalisis hasil atau temuan penelitian.

Selanjutnya untuk memperkuat dan mengecek validasi data hasil kuesioner, maka dapat dilengkapi dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

---

<sup>1</sup> An'anta Djamhari. *Peranserta Industri Dalam Program Kali Bersih Di DAS Ciliwung DKI Jakarta*. Program Pascasarjana UI. 1994. Hlm.63.

- a. Observasi, yaitu pengamatan yang dilakukan langsung pada obyek penelitian. Adapun yang menjadi obyek penelitian ini adalah masyarakat pemukim bantaran sungai Ciliwung yang wilayahnya ditetapkan sebagai tempat pelaksanaan program relokasi.
- b. Kepustakaan, yaitu memanfaatkan berbagai artikel, buku, peraturan / perundang-undangan, media massa, media elektronika dan lain sebagainya untuk memperoleh informasi, data dan teori-teori yang relevan dengan penelitian.
- c. Wawancara yang bertujuan memperoleh informasi yang relevan dan mendukung masalah penelitian.

### 3.2.3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yang disesuaikan dengan landasan konseptual penelitian. Penelitian ini menguraikan deskriptif tentang pengaruh program relokasi masyarakat bantaran sungai Ciliwung terhadap *human security*. Instrumen deskriptif adalah hasil pengumpulan data primer (kuesioner dan wawancara dengan responden) yang diperkuat dengan data sekunder (berupa keterangan dari pihak-pihak terkait, seperti LSM dan Pemerintah. Adapun hasil deskripsi ditunjukkan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi.

Analisis selanjutnya adalah menentukan hubungan antar variabel penelitian dengan penguraikan pengaruh variabel relokasi masyarakat dan variabel taat hukum terhadap *human security*. Proyeksi adanya pengaruh antar variabel penelitian tersebut diperoleh melalui tabulasi data jawaban responden penelitian. Dengan menguraikan jawaban responden terhadap kuesioner penelitian yang diperoleh melalui proyeksi tabulasi data kuesioner, maka akan dapat ditarik kesimpulan tentang persepsi masyarakat terhadap program relokasi. Sehingga

### 3.3. Unit Analisis, Populasi dan Sampel

#### 3.3.1. Unit Analisis

Unit analisis menurut pendapat Mochtar yang dikutip oleh Edison (2006 : 23) adalah suatu tertentu yang diperhitungkan sebagai obyek dalam suatu penelitian, disebut unit analisis oleh karena pada unit inilah yang akan dianalisis karakteristik, sifat atau semua variabel yang diteliti. Adapun unit analisis dalam penelitian ini adalah masyarakat bantaran Sungai Ciliwung di wilayah DKI Jakarta yang akan direlokasi.

#### 3.3.2. Populasi dan Sampel

##### a. Populasi Penelitian

Populasi penelitian ini adalah masyarakat yang bermukim di bantaran Sungai Ciliwung wilayah DKI Jakarta yang lokasi pemukimannya ditetapkan sebagai tempat pelaksanaan proyek relokasi. Secara rinci, populasi penelitian ini terdiri dari masyarakat bantaran DAS Ciliwung yang berdomisili di Kelurahan Cawang, Kelurahan Pengadegan, Kelurahan Cikoko, Kelurahan Bidara Cina, Kelurahan Kebon Baru, Kelurahan Bukit Duri, Kelurahan Kampung Melayu dan Kelurahan Kebon Manggis.<sup>2</sup>

##### b. Sampel

Sampel penelitian ini ditentukan dengan menggunakan *Cluster Sampling* (area sampling) yaitu jika populasi tersebar dalam beberapa wilayah yang masing-masing mempunyai ciri yang sama, maka salah satu atau beberapa wilayah dapat diambil secara acak sebagai sampel.<sup>3</sup> Adapun penentuan sampel penelitian ini adalah masyarakat Kelurahan Kebon Baru Tebet Jakarta Selatan dan masyarakat Pengadegan Pancoran Jakarta Selatan, dengan

<sup>2</sup> SP/Luther Ulang [Jakarta] Gubernur DKI Jakarta, Menko Kesra dan Mensos : Sekitar 350.000 jiwa dari 71.000 keluarga yang tinggal di sepanjang bantaran Kali Ciliwung antara Kebon Baru dan Manggarai, Jakarta Selatan akan direlokasi. <http://suarapembaruan.com/News/2009/12/05/jab02.htm>

<sup>3</sup> W. Gulo. *Metodologi Penelitian*. Penerbit PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2002. Hlm.93.

pertimbangan bahwa kawasan tersebut merupakan tempat yang direncanakan untuk pembangunan rumah susun sebagai lokasi pemukiman baru bagi masyarakat bantaran DAS Ciliwung yang akan direlokasi dan masyarakatnya pun akan direlokasi. Untuk menentukan besaran sampel yang akan diambil dalam penelitian ini, dapat diperoleh melalui data penduduk pada Tabel 3.1. dan Tabel 3.2.

**Tabel 3.1. Jumlah Penduduk Permukiman Rawan Banjir di Bantaran Sungai Ciliwung Kelurahan Kebon Baru<sup>4</sup>**

NO	RW	KK	JENIS KELAMIN		JUMLAH
			Laki-laki	Perempuan	
1.	01	735	1548	1403	2951
2.	02	653	1488	1301	2789
3.	04	1163	1982	1331	3313
4.	08	601	1487	1444	2931
5.	09	645	1361	1456	2817
6.	010	984	1360	1510	2870
JUMLAH		4799	9226	8445	17671

**Tabel 3.2. Jumlah Penduduk Permukiman Rawan Banjir di Bantaran Sungai Ciliwung Kelurahan Pengadegan<sup>5</sup>**

NO	RW	KK	JENIS KELAMIN		JUMLAH
			Laki-laki	Perempuan	
1.	01	788	2080	1721	3801
2.	02	605	1658	1127	2785
JUMLAH		1393	3738	2848	6586

Didasarkan pada lokasi yang telah ditetapkan dalam penelitian ini, maka besaran populasi dari penelitian ini dapat diketahui melalui data penduduk yang telah diuraikan pada kedua tabel diatas, yaitu : penjumlahan antara penduduk permukiman rawan banjir Kelurahan

<sup>4</sup> Laporan Hasil Kegiatan Pembinaan Pemerintahan Kelurahan Kebon Baru Kecamatan Tebet Jakarta Selatan, Juli 2010.

<sup>5</sup> Laporan Hasil Kegiatan Pembinaan Pemerintahan Kelurahan Pengadegan Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, Juli 2010.

Kebon Baru dan Kelurahan Pengadegan. Sehingga besaran populasi penelitian ini adalah  $17.671 + 6.586 = 24.257$  Jiwa.

Dalam penelitian ini, jumlah sampel yang akan ditarik sebagai responden ditentukan dengan menggunakan metode *Solvin* sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + e^2 \cdot N}$$

Keterangan :

$n$  = Jumlah Sampel

$N$  = Jumlah Populasi

$e^2$  = Taraf Kesalahan (0,01)

Dengan menggunakan rumus tersebut, maka jumlah sampel yang akan dijadikan responden dalam penelitian ini adalah :

$$\begin{aligned} n &= \frac{24.257}{1 + 0,01 \times 24.257} \\ &= 99,182 \\ &\text{Dibulatkan menjadi } 100 \end{aligned}$$

#### 3.4. Variabel Penelitian

Terdapat tiga variabel yang akan dianalisis dalam penelitian ini, terdiri dari satu variabel terikat (*dependent*) yang diberi simbol (Y) dan dua variabel bebas (*independent*) yang diberi simbol ( $X_1$  dan  $X_2$ ). Tiap variabel dibuatkan rumusan definisi yang terdiri dari definisi konseptual dan definisi operasional. Selanjutnya rumusan definisi tersebut dijadikan dasar pembuatan instrumen penelitian berupa kuesioner atau angket, yang menggunakan *rating scale*

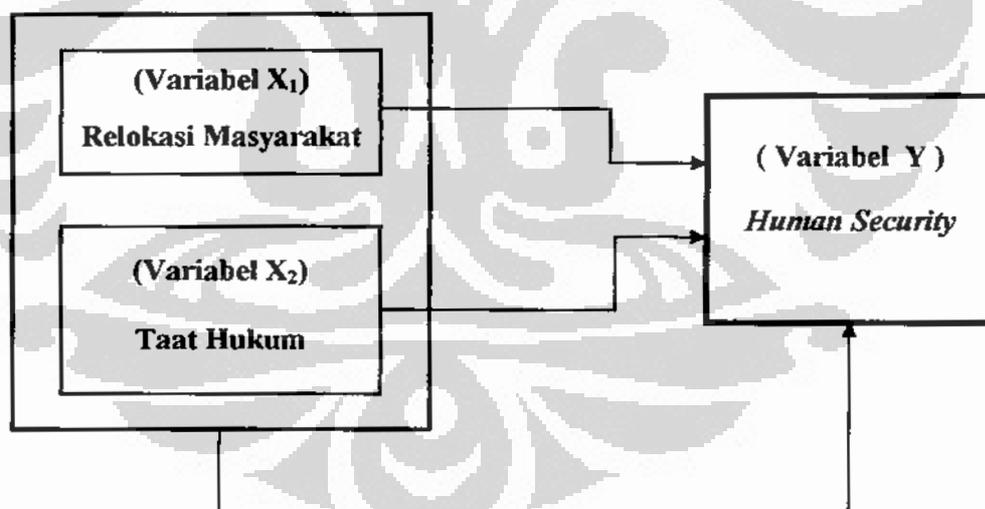
melalui penafsiran dalam angka yang menggunakan *Skala Likert* dengan empat pilihan nilai yang bertujuan untuk mengukur persepsi responden, sebagai berikut :

Sangat Setuju	: Skor 4
Setuju	: Skor 3
Tidak Setuju	: Skor 2
Sangat Tidak Setuju	: Skor 1

Adapun rincian variabel-variabel dalam penelitian ini adalah :

- a. Variabel bebas, terdiri dari :
  - $X_1$  : Relokasi Masyarakat.
  - $X_2$  : Taat hukum.
- b. Variabel terikat, adalah  $Y$  : *Human Security*.

Hubungan antara variabel-variabel tersebut dapat dilihat pada kerangka konseptual melalui gambar dibawah ini.



Gambar 3.1. Hubungan Antar Variabel

### 3.5. Instrumen Penelitian

Dengan menitik-beratkan pada pendekatan kuantitatif dalam penelitian ini, maka Instrumen penelitian sangat memegang peranan penting sebagai pedoman teknik pengumpulan data. Karena instrumen penelitian merupakan alat untuk mengukur fenomena yang dijadikan objek penelitian atau disebut juga sebagai variabel penelitian. Sehingga jumlah instrumen tentunya tergantung dari jumlah variabel dalam penelitian.

Sementara itu, agar variabel-variabel yang masih abstrak tersebut menjadi lebih kongret dan memungkinkan untuk dilakukan pengukuran (*measurable*), perlu adanya operasional variabel / konsep.<sup>6</sup> Berdasarkan variabel-variabel yang telah ditetapkan, maka dibuat operasional variabel dalam bentuk kisi-kisi.

### 3.5.1. Variabel Relokasi ( $X_1$ )

- a. Definisi konseptual : relokasi adalah penempatan kembali suatu kelompok masyarakat dari suatu tempat tinggal atau permukiman sebelumnya yang dipindahkan ke tempat baru yang sesuai dengan peruntukannya.
- b. Definisi operasional : skor total persepsi responden tentang penempatan kembali suatu kelompok masyarakat atau permukiman sebelumnya yang dipindahkan ke tempat baru yang sesuai dengan peruntukannya, yang diukur dengan menggunakan skala empat, yaitu sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju dan masing-masing dengan skor : 4, 3, 2, 1.
- c. Kisi-kisi Instrumen Penelitian Variabel Relokasi. Berdasarkan definisi konseptual dan definisi operasional yang dikaitkan dengan landasan teori, maka dibuat kisi-kisi instrumen penelitian variabel relokasi yang diuraikan dalam Tabel 3.3.

**Tabel 3.3. Kisi-kisi Variabel Relokasi Masyarakat**

---

<sup>6</sup> M. Mochtar. *Pengantar Metodologi Penelitian Jilid 1*. IIP Press. Jakarta. 1999. Hlm.109-110.

Dimensi	Indikator	Butir Indikator	Jumlah
Tempat Asal	Permukiman kumuh	1, 2, 3	3
	Penyempitan DAS Ciliwung	4, 5, 6	3
	Bahaya banjir	7, 8, 9	3
	Pencemaran air sungai	10, 11, 12	3
Tempat Tujuan	Rumah Susun	13, 14, 15	3
	Lokasi yang strategis	16, 17, 18	3
	Layak huni	19, 20, 21	3
	Terhindar dari bahaya banjir	22, 23, 24	3
Aturan Peruntukan	Sesuai dengan rencana tata ruang kota	25, 26, 27	3
	Lokasi yang disiapkan untuk kepentingan umum	28, 29, 30	3
	Disiapkan untuk permukiman masyarakat bantaran	31, 32, 33	3
	JUMLAH		33

### 3.5.2. Variabel Taat Hukum ( $X_2$ )

- a. Definisi konseptual : taat hukum adalah ketaatan terhadap keseluruhan aturan yang dibuat oleh pemerintah di suatu Negara, yang disertai dengan *reward* dan *punishment*.
- b. Definisi operasional : taat hukum adalah skor total persepsi responden tentang ketaatan terhadap keseluruhan aturan yang dibuat oleh pemerintah di suatu Negara, yang disertai dengan *reward* dan *punishment*, yang diukur dengan menggunakan skala empat, yaitu sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju dan masing-masing dengan skor : 4, 3, 2, 1.
- c. Kisi-kisi Instrumen Penelitian Variabel Taat Hukum. Berdasarkan definisi konseptual dan definisi operasional yang dikaitkan

dengan landasan teori, maka dibuat kisi-kisi instrumen penelitian variabel taat hukum yang diuraikan dalam Tabel 3.5.

**Tabel 3.4. Kisi-kisi Variabel Taat Hukum**

Dimensi	Indikator	Butir Indikator	Jumlah
Aturan Pemerintah	UU Pengelolaan Lingkungan Hidup	1, 2, 3	3
	Perizinan bangunan	4, 5, 6	3
	Penertiban Daerah Aliran Sungai	7, 8, 9	3
Reward	Kompensasi penggantian aset	10, 11, 12	3
	Bantuan dana kerohiman	13, 14, 15	3
	Fasilitas kepentingan umum	16, 17, 18	3
Punishment	Penggusuran	19, 20, 21	3
	Pencabutan hak atas tanah	22, 23, 24	3
	Pemindahan secara paksa	25, 26, 27	3
	JUMLAH		27

### 3.5.3. Variabel *Human Security* (Y)

- a. Definisi konseptual : *Human Security* adalah perlindungan keselamatan manusia melalui upaya keamanan lingkungan dan keamanan individu untuk memperoleh kesejahteraan hidup.
- b. Definisi operasional : *Human Security* adalah skor total persepsi responden tentang perlindungan keselamatan manusia melalui upaya keamanan lingkungan dan keamanan individu untuk memperoleh kesejahteraan hidup, yang diukur dengan menggunakan skala empat, yaitu sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju dan masing-masing dengan skor : 4, 3, 2, 1.

- c. Kisi-kisi Instrumen Penelitian Variabel *Human Security*. Berdasarkan definisi konseptual dan definisi operasional yang dikaitkan dengan landasan teori, maka dibuat kisi-kisi instrumen penelitian variabel *Human Security* yang diuraikan dalam Tabel 3.5.

**Tabel 3.5. Kisi-kisi Variabel *Human Security***

Dimensi	Indikator	Butir Indikator	Jumlah
Keamanan Lingkungan	Penanggulangan bahaya banjir	1, 2, 3	3
	Perlindungan dari dampak buruk kerusakan lingkungan	4, 5, 6	3
	Perlindungan dari penurunan kualitas lingkungan hidup	7, 8, 9	3
Keamanan Individu	Perlindungan manusia dari kekerasan	10, 11, 12	3
	Perlindungan dari intimidasi	13, 14, 15	3
	Terbebas dari rasa takut	16, 17, 18	3
Kesejahteraan	Fasilitas fisik (Rusun)	19, 20, 21	3
	Kebutuhan pokok	22, 23, 24	3
	Kesehatan	25, 26, 27	3
	JUMLAH		27

### 3.6. Uji Coba Instrumen Penelitian

Uji coba terhadap kuesioner sebagai instrumen penelitian dilaksanakan melalui uji validitas instrumen dan reliabilitas alat ukur yang dilakukan melalui *coding* atau pemberian bobot nilai (*Skor*) terhadap jawaban dari tiap pertanyaan dalam kuesioner. Dalam hal ini, pengukuran persepsi responden dilakukan dengan memberikan bobot nilai 4 (untuk jawaban Sangat Setuju), 3 (untuk jawaban Setuju), 2 (untuk jawaban Tidak Setuju) dan 1 (untuk jawaban Sangat

Tidak Setuju). Pengujian validitas dan reliabilitas adalah untuk menguji butir-butir pertanyaan yang ada pada sebuah angket, apakah sudah valid dan reliable. Jika butir-butir pertanyaan tersebut sudah bias mengukur faktornya, langkah selanjutnya adalah menguji faktor-faktor yang sudah valid untuk mengukur konstruk yang ada.

### 3.6.1. Uji Validitas

Sebelum instrument penelitian disebarkan kepada responden, maka terlebih dahulu harus dilakukan uji coba terhadap kuesioner dengan uji validitas instrument dan reliabilitas alat ukur. Pengujian validitas instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara uji validitas isi (*content validity*) dengan menggunakan rumus koefisien korelasi *Product Moment* oleh *Pearson*, sebagai berikut :<sup>7</sup>

$$r_{hitung} = \frac{n(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{n\sum X^2 - (\sum X)^2\} \{n\sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Keterangan :

- $r_{hitung}$  = koefisien korelasi ( $r_{xy}$ )
- X = skor responden untuk tiap instrumen
- Y = total skor tiap responden dari seluruh instrumen
- n = jumlah responden

Dari hasil perhitungan koefisien korelasi ( $r_{hitung}$ ) langsung dikonsultasikan pada tabel *Product Moment Pearson* dengan taraf kesalahan (*alpha*)  $\alpha = 0,05$  atau 5 %. Dengan ketentuan bahwa jika  $r_{hitung}$  lebih kecil dari  $r_{tabel}$ , maka instrument penelitian tersebut dapat dinyatakan Valid. Namun sebaliknya, apabila  $r_{hitung}$  lebih besar dari  $r_{tabel}$ , maka instrument penelitian tersebut dapat dinyatakan Invalid atau tidak valid (drop). Uji validitas instrument penelitian dilakukan pada variabel bebas  $X_1$  terhadap variabel terikat Y dan variabel bebas  $X_2$  terhadap variabel Y. Uji validitas dilakukan terhadap 30 responden, uji

<sup>7</sup> Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (Ed), *Metode Penelitian Survey*. LP3ES, Jakarta 1999. Hlm. 137.

dilakukan pada kuesioner variabel penelitian. Adapun uji validitas  $X_1$  terhadap  $Y$  dapat dilihat melalui tabel berikut :

**Tabel 3.6. Perhitungan Validitas Butir Variabel  $X_1$  dan  $Y$**

Nomor Responden	$X_i$	$Y$	$X_i^2$	$Y^2$	$X_i \cdot Y$
1	3	77	9	5929	231
2	4	78	16	6084	312
3	4	82	16	6724	328
4	3	80	9	6400	240
5	4	79	16	6241	316
6	4	78	16	6084	312
7	3	78	9	6084	234
8	3	77	9	5929	231
9	4	77	16	5929	308
10	3	78	9	6084	234
11	4	82	16	6724	328
12	4	80	16	6400	320
13	3	79	9	6241	237
14	3	78	9	6084	234
15	4	78	16	6084	312
16	3	77	9	5929	231
17	4	80	16	6400	320
18	3	79	9	6241	237
19	4	77	16	5929	308
20	3	78	9	6084	234
21	4	82	16	6724	328
22	4	79	16	6241	316
23	3	80	9	6400	240
24	3	79	9	6241	237
25	3	82	9	6724	246
26	4	78	16	6084	312
27	4	82	16	6724	328
28	3	80	9	6400	240
29	3	79	9	6241	237
30	4	78	16	6084	312
<b>JUMLAH</b>	<b>105</b>	<b>2371</b>	<b>375</b>	<b>187467</b>	<b>8309</b>

Data yang telah diuraikan pada tabel tersebut merupakan proyeksi yang termuat dalam tabulasi jawaban responden (lihat lampiran). Uji

validitas dilakukan dengan menggunakan rumus *Product Moment Pearson*, yang dihitung sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 r_{hitung} &= \frac{30(8323) - (104)(2397)}{\sqrt{\{30 \cdot 368 - (104)^2\} \{30 \cdot 191649 - (2397)^2\}}} \\
 &= \frac{249690 - 249288}{\sqrt{\{11040 - 10816\} \{5749470 - 5745609\}}} \\
 &= \frac{402}{\sqrt{224 \cdot 3861}} \\
 &= \frac{402}{\sqrt{864864}} \\
 &= \frac{402}{929,98} \\
 &= \mathbf{0,432}
 \end{aligned}$$

Pada taraf signifikansi  $\alpha = 0,05$  dengan jumlah sampel uji coba  $n = 30$  dengan ( $dk = 30 - 1$ , sebesar = 0,367). Hasil perhitungan validitas butir nomor, diperoleh besar koefisien korelasi sebesar  $r_{butir (1)} = 0,432$ . Besaran koefisien validitas instrumen penelitian Variabel  $X_1$  butir nomor 1 tersebut dikonsultasikan dengan Tabel *Product Moment Pearson*, diperoleh  $r_{tabel (29)} = 0,367$ . Ternyata  $r_{hitung} = 0,432 > r_{tabel} = 0,367$ . Karena harga  $r_{butir (1)} > r_{tabel}$ , maka dapat disimpulkan butir instrumen penelitian Variabel  $X_1$  nomor 1 adalah valid, artinya butir tersebut dapat digunakan untuk menjangar data variabel relokasi masyarakat.<sup>8</sup>

<sup>8</sup> Amirsyah Sabil. 2008. *Metodologi Penelitian : Instrumen Penelitian, Validitas Butir, Reliabilitas Butir*. Materi Perkuliahan. PKN Universitas Indonesia. Hlm.6.

Dengan menggunakan proses perhitungan yang sama, maka keseluruhan data koefisien korelasi validitas instrumen penelitian Variabel  $X_1$  dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.7. Hasil Uji Validitas Variabel  $X_1$**

Butir Instrumen	$r_{xy}$	$r_{tabel}$	Keterangan
Pernyataan No 1	0,432	0,367	Valid
Pernyataan No 2	0,241	0,367	Invalid
Pernyataan No 3	0,410	0,367	Valid
Pernyataan No 4	0,406	0,367	Valid
Pernyataan No 5	0,145	0,367	Invalid
Pernyataan No 6	0,363	0,367	Invalid
Pernyataan No 7	0,624	0,367	Valid
Pernyataan No 8	0,554	0,367	Valid
Pernyataan No 9	0,390	0,367	Valid
Pernyataan No 10	0,474	0,367	Valid
Pernyataan No 11	0,269	0,367	Invalid
Pernyataan No 12	0,392	0,367	Valid
Pernyataan No 13	0,315	0,367	Invalid
Pernyataan No 14	0,432	0,367	Valid
Pernyataan No 15	0,403	0,367	Valid
Pernyataan No 16	0,381	0,367	Valid
Pernyataan No 17	0,145	0,367	Invalid
Pernyataan No 18	0,478	0,367	Valid
Pernyataan No 19	0,394	0,367	Valid
Pernyataan No 20	0,436	0,367	Valid
Pernyataan No 21	0,390	0,367	Valid
Pernyataan No 22	0,431	0,367	Valid
Pernyataan No 23	0,349	0,367	Invalid
Pernyataan No 24	0,410	0,367	Valid
Pernyataan No 25	0,378	0,367	Valid
Pernyataan No 26	0,318	0,367	Invalid
Pernyataan No 27	0,402	0,367	Valid
Pernyataan No 28	0,570	0,367	Valid
Pernyataan No 29	0,444	0,367	Valid
Pernyataan No 30	0,453	0,367	Valid
Pernyataan No 31	0,325	0,367	Invalid
Pernyataan No 32	0,538	0,367	Valid
Pernyataan No 33	0,495	0,367	Valid

Dengan demikian diketahui bahwa dari 33 butir pernyataan dalam kuesioner Variabel  $X_1$  terdapat 73 % atau sebanyak 24 butir pernyataan dinyatakan valid sedangkan pernyataan yang tidak valid sebanyak 9 butir, terdiri dari pernyataan nomor : 2, 5, 6, 11, 13, 17, 23, 26 dan 31.

Sedangkan uji validitas  $X_2$  terhadap Y dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.8. Perhitungan Validitas Butir Variabel  $X_2$  dan Y**

Nomor Responden	$X_i$	Y	$X_i^2$	$Y^2$	$X_i \cdot Y$
1	4	79	16	6241	316
2	3	78	9	6084	234
3	4	82	16	6724	328
4	4	80	16	6400	320
5	3	79	9	6241	237
6	3	78	9	6084	234
7	4	81	16	6561	324
8	4	77	16	5929	308
9	4	79	16	6241	316
10	3	78	9	6084	234
11	3	82	9	6724	246
12	3	80	9	6400	240
13	4	81	16	6561	324
14	3	78	9	6084	234
15	4	78	16	6084	312
16	4	77	16	5929	308
17	4	84	16	7056	336
18	3	79	9	6241	237
19	4	83	16	6889	332
20	3	78	9	6084	234
21	3	82	9	6724	246
22	4	79	16	6241	316
23	3	80	9	6400	240
24	3	79	9	6241	237
25	3	76	9	5776	228
26	3	78	9	6084	234
27	4	82	16	6724	328
28	3	74	9	5476	222
29	4	81	16	6561	324
30	3	78	9	6084	234
<b>JUMLAH</b>	<b>104</b>	<b>2380</b>	<b>368</b>	<b>188952</b>	<b>8263</b>

Berdasarkan data pada tabel diatas, maka diperoleh nilai-nilai sebagai berikut :  $n = 30$ ;  $\Sigma XY = 8263$ ;  $\Sigma X = 104$ ;  $\Sigma Y = 2380$ ;  $\Sigma X^2 = 368$ ;  $\Sigma Y^2 = 188952$ . Uji validitas dilakukan dengan menggunakan rumus *Product Moment Pearson*, yang dihitung sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 r_{hitung} &= \frac{30(8263) - (104)(2380)}{\sqrt{\{30 \cdot 368 - (104)^2\} \{30 \cdot 188952 - (2380)^2\}}} \\
 &= \frac{247890 - 247520}{\sqrt{\{11040 - 10816\} \{5668560 - 5664400\}}} \\
 &= \frac{370}{\sqrt{224 \cdot 4160}} \\
 &= \frac{370}{\sqrt{931840}} \\
 &= \frac{370}{965,32} \\
 &= \mathbf{0,383}
 \end{aligned}$$

Pada taraf signifikansi  $\alpha = 0,05$  dengan jumlah sampel uji coba  $n = 30$  dengan ( $dk = 30 - 1$ , sebesar = 0,367). Hasil perhitungan validitas butir nomor, diperoleh besar koefisien korelasi sebesar  $r_{butir (1)} = 0,383$ . Besaran koefisien validitas instrumen penelitian Variabel  $X_2$  butir nomor 1 tersebut dikonsultasikan dengan Tabel *Product Moment Pearson*, diperoleh  $r_{tabel (29)} = 0,367$ . Ternyata  $r_{hitung} = 0,383 > r_{tabel} = 0,367$ . Karena harga  $r_{butir (1)} > r_{tabel}$ , maka dapat disimpulkan butir instrumen penelitian Variabel  $X_2$  nomor 1 adalah valid, artinya butir tersebut dapat digunakan untuk menjaring data variabel taat hukum.

Dari 27 butir pernyataan dalam kuesioner Variabel  $X_2$  terdapat 78 % atau sebanyak 21 butir pernyataan dinyatakan valid sedangkan pernyataan yang tidak valid sebanyak 6 butir, terdiri dari pernyataan nomor : 4, 7, 12, 15, 21 dan 26. Adapun keseluruhan data koefisien korelasi validitas instrumen penelitian Variabel  $X_2$  dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.9. Hasil Uji Validitas Variabel  $X_2$**

<b>Butir Instrumen</b>	<b><math>r_{xy}</math></b>	<b><math>r_{tabel}</math></b>	<b>Keterangan</b>
Pernyataan No 1	0,383	0,367	Valid
Pernyataan No 2	0,371	0,367	Valid
Pernyataan No 3	0,413	0,367	Valid
Pernyataan No 4	0,287	0,367	Invalid
Pernyataan No 5	0,391	0,367	Valid
Pernyataan No 6	0,375	0,367	Valid
Pernyataan No 7	0,183	0,367	Invalid
Pernyataan No 8	0,401	0,367	Valid
Pernyataan No 9	0,371	0,367	Valid
Pernyataan No 10	0,388	0,367	Valid
Pernyataan No 11	0,375	0,367	Valid
Pernyataan No 12	0,296	0,367	Invalid
Pernyataan No 13	0,395	0,367	Valid
Pernyataan No 14	0,392	0,367	Valid
Pernyataan No 15	0,320	0,367	Invalid
Pernyataan No 16	0,427	0,367	Valid
Pernyataan No 17	0,411	0,367	Valid
Pernyataan No 18	0,369	0,367	Valid
Pernyataan No 19	0,377	0,367	Valid
Pernyataan No 20	0,407	0,367	Valid
Pernyataan No 21	0,185	0,367	Invalid
Pernyataan No 22	0,379	0,367	Valid
Pernyataan No 23	0,398	0,367	Valid
Pernyataan No 24	0,430	0,367	Valid
Pernyataan No 25	0,342	0,367	Valid
Pernyataan No 26	0,311	0,367	Invalid
Pernyataan No 27	0,421	0,367	Valid

Dengan menggunakan proses perhitungan sama, uji validitas terhadap Variabel *Human Security* (Y) diperoleh hasil : bahwa dari 27 butir pernyataan yang terdapat pada kuesioner Variabel Y, terdapat 18 % atau sebanyak 22 butir pernyataan dinyatakan valid sedangkan pernyataan yang tidak valid sebanyak 5 butir, terdiri dari pernyataan nomor : 6, 10, 14, 15 dan 19.

### 3.6.2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas terjemahan dari kata *reliability* yang mengandung arti keterpercayaan atau keterandalan. Dalam hal ini konsep reliabilitas adalah sejauh mana suatu pengukuran dapat dipercaya, artinya pengukuran terhadap kelompok subyek yang sama akan diperoleh hasil yang relatif sama.

Setelah uji validitas, instrumen penelitian juga diuji reliabilitasnya untuk mengetahui tingkat reliabilitas keseluruhan item sebagai satu kesatuan instrumen, sehingga hasilnya dianggap mewakili aspek-aspek yang diukurnya. Perhitungan koefisien reliabilita instrumen variabel penelitian menggunakan rumus *Alpha Cronbach* sebagai berikut :<sup>9</sup>

$$Alpha (r_{xx}) = \left( \frac{k}{k-1} \right) \left( \frac{(\sigma_y^2) - (\sum \sigma_x^2)}{\sigma_y^2} \right)$$

Keterangan :

- $Alpha (r_{xx})$  = Koefesien reliabilitas yang dicari.  
 $k$  = Jumlah butir pertanyaan atau pernyataan yang valid.  
 $\sum \sigma_x^2$  = Jumlah varian skor butir (Variabel X).  
 $\sigma_y^2$  = Varian skor total (Variabel Y).

<sup>9</sup> Amirsyah. *Ibid.* Hlm.7-8.

Adapun, Varians dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$s^2 = \frac{\sum X^2 - \frac{(\sum X)^2}{n}}{n}$$

Keterangan :

- $s^2$  = Varians butir yang dicari.  
 $\sum X^2$  = Jumlah kuadrat skor setiap butir.  
 $(\sum X)^2$  = Jumlah skor setiap butir dikuadratkan.  
 $n$  = Jumlah responden.

Secara empirik, tinggi rendahnya reliabilitas ditunjukkan oleh suatu angka yang disebut koefisien reliabilitas, yaitu koefisien korelasi antara pada dua tes yang paralel yang dikenakan kepada sekelompok individu yang sama. Semakin tinggi koefisien korelasi, berarti konsistensi antara hasil pengenaan dua tes tersebut semakin baik dan hasil ukur kedua tes tersebut semakin reliable. Koefisien korelasi antara dua variabel dilambangkan dengan huruf r. Apabila skor pada tes pertama diberi lambang X dan skor pada tes kedua yang paralel diberi lambang  $X^1$ , maka koefisien korelasi antara kedua tes tersebut adalah  $r_{xx}$  sebagai koefisien reliabilitas.

Selain itu, untuk mengetahui tingkat realibilitas instrumen dalam penelitian ini dapat juga dibandingkan dengan katagori tingkat reliabilitas instrumen sebagai berikut :

- 0,800 – 1,000 = Sangat tinggi.  
 0,600 – 0,799 = Tinggi.  
 0,400 – 0,599 = Sedang.  
 0,200 – 0,399 = Rendah.  
 0,200 = Sangat rendah.

Jika tingkat reliabilitas instrumen menunjukkan katagori sangat tinggi, tinggi atau sedang maka instrumen tersebut dinyatakan reliable. Sebaliknya, jika tingkat reliabilitas instrumen menunjukkan katagori rendah atau sangat rendah maka instrumen tersebut dinyatakan tidak reliable. Adapun uji Reliabilitas Variabel  $X_1$  terhadap Y dapat dilihat melalui tabel berikut :

**Tabel 3.10. Perhitungan Reliabilitas Variabel  $X_1$**

Nomor Responden	$X_i$	$X_i^2$	Y	$Y^2$
1	4	16	77	5929
2	3	9	78	6084
3	3	9	82	6724
4	4	16	80	6400
5	3	9	79	6241
6	4	16	78	6084
7	4	16	78	6084
8	4	16	77	5929
9	4	16	77	5929
10	3	9	78	6084
11	3	9	82	6724
12	4	16	80	6400
13	3	9	79	6241
14	4	16	78	6084
15	4	16	78	6084
16	4	16	77	5929
17	4	16	73	5329
18	3	9	79	6241
19	4	16	77	5929
20	3	9	75	5625
21	3	9	82	6724
22	4	16	79	6241
23	4	16	74	5476
24	3	9	79	6241
25	3	9	82	6724
26	3	9	78	6084
27	4	16	82	6724
28	3	9	75	5625
29	3	9	85	7225
30	4	16	78	6084
<b>JUMLAH</b>	<b>106</b>	<b>382</b>	<b>2356</b>	<b>185222</b>

Berdasarkan data pada tabel diatas, maka diperoleh nilai-nilai sebagai berikut :  $n = 30$ ;  $\sum X_i^2 = 382$ ;  $(\sum X)^2 = (106)^2 = 11236$ . Uji Reliabilitas dilakukan dengan menggunakan rumus *Alpha Cronbach*, namun terlebih dahulu harus mengetahui nilai varian yang dihitung sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \sigma^2 &= \frac{\sum X^2 - \frac{(\sum X)^2}{n}}{n} = \frac{382 - \frac{11236}{30}}{30} \\ &= \frac{382 - 374,53}{30} = \frac{7,466}{30} = 0,249 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut diperoleh besar varians butir 1 sebesar  $\sigma^2_{\text{butir 1}} = 0,249$ . Untuk butir 2 sampai dengan butir nomor terakhir dilakukan perhitungan dengan cara yang sama dan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.11. Rangkuman Varians Butir Variabel  $X_1$**

Nomor Butir	$X_i$	$X_i^2$	Y	$Y^2$	Varians $\sigma^2$
$\sigma^2_{\text{butir 1}}$	106	382	2356	185222	0.249
$\sigma^2_{\text{butir 2}}$	104	370	2356	185222	0.316
$\sigma^2_{\text{butir 3}}$	101	357	2356	185222	0.567
$\sigma^2_{\text{butir 4}}$	102	360	2356	185222	0.441
$\sigma^2_{\text{butir 5}}$	100	352	2356	185222	0.622
$\sigma^2_{\text{butir 6}}$	104	374	2356	185222	0.449
$\sigma^2_{\text{butir 7}}$	102	366	2356	185222	0.641
$\sigma^2_{\text{butir 8}}$	104	378	2356	185222	0.582
$\sigma^2_{\text{butir 9}}$	99	351	2356	185222	0.812
$\sigma^2_{\text{butir 10}}$	100	356	2356	185222	0.756
$\sigma^2_{\text{butir 11}}$	101	363	2356	185222	0.765
$\sigma^2_{\text{butir 12}}$	98	348	2356	185222	0.928

Nomor Butir	$X_i$	$X_i^2$	Y	$Y^2$	Varians $\sigma^2$
$\sigma^2$ butir 13	99	353	2356	185222	0.876
$\sigma^2$ butir 14	94	326	2356	185222	1.048
$\sigma^2$ butir 15	101	361	2356	185222	0.698
$\sigma^2$ butir 16	98	346	2356	185222	0.862
$\sigma^2$ butir 17	101	361	2356	185222	0.698
$\sigma^2$ butir 18	102	368	2356	185222	0.706
$\sigma^2$ butir 19	97	341	2356	185222	0.912
$\sigma^2$ butir 20	98	344	2356	185222	0.795
$\sigma^2$ butir 21	104	374	2356	185222	0.449
$\sigma^2$ butir 22	106	382	2356	185222	0.248
$\sigma^2$ butir 23	101	361	2356	185222	0.698
$\sigma^2$ butir 24	104	370	2356	185222	0.315
JUMLAH				$\Sigma Y^2 =$	15.433

Dari tabel di atas, diperoleh nilai  $\sigma_y^2$  sebagai berikut :  $\Sigma Y^2 = 185222$ ;  
 $(\Sigma Y)^2 = (2356)^2 = 5550736$ ;  $n = 30$ ;  $\sigma_y^2 = 156,915$

$$\begin{aligned} \sigma_y^2 &= \frac{189732 - \frac{(2356)^2}{30}}{30} = \frac{189732 - 185024,5}{30} \\ &= \frac{4707,466}{30} = 156,915 \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan tersebut diperoleh besar varian total ( $\sigma_y^2$ ), sebesar = 156,915. Selanjutnya besaran varian total dan besaran jumlah varians butir variabel relokasi masyarakat ( $X_1$ ) dimasukkan ke dalam rumus *Alpha Cronbach* berikut :

$$\begin{aligned} \text{Alpha } (r_{xx}) &= \left( \frac{24}{24-1} \right) \left( \frac{156,915 - 15,433}{156,915} \right) \\ &= (1,0434) (0,901648) = 0,83644 \end{aligned}$$

Harga koefisien reliabilitas sebesar 0,84 menunjukkan bahwa reliabilitas instrumen penelitian Variabel Relokasi Masyarakat dapat dikategorikan memiliki reliabilitas yang sangat tinggi.

Sedangkan uji Reliabilitas Variabel  $X_2$  terhadap Y, dilakukan dengan proses perhitungan yang sama. Adapun data varians butir Variabel  $X_2$  dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.12. Rangkuman Varians Butir Variabel  $X_2$**

Nomor Butir	$X_i$	$X_i^2$	Y	$Y^2$	Varians $\sigma^2$
$\sigma^2$ butir 1	105	382	2356	185222	0.258
$\sigma^2$ butir 2	103	370	2356	185222	0.645
$\sigma^2$ butir 3	103	357	2356	185222	0.946
$\sigma^2$ butir 4	106	360	2356	185222	0.449
$\sigma^2$ butir 5	107	352	2356	185222	0.712
$\sigma^2$ butir 6	62	374	2356	185222	0.862
$\sigma^2$ butir 7	106	366	2356	185222	0.316
$\sigma^2$ butir 8	105	378	2356	185222	0.425
$\sigma^2$ butir 9	111	351	2356	185222	0.521
$\sigma^2$ butir 10	104	356	2356	185222	0.549
$\sigma^2$ butir 11	98	363	2356	185222	0.528
$\sigma^2$ butir 12	59	348	2356	185222	0.316
$\sigma^2$ butir 13	96	353	2356	185222	0.493
$\sigma^2$ butir 14	111	326	2356	185222	0.921
$\sigma^2$ butir 15	54	361	2356	185222	0.726
$\sigma^2$ butir 16	107	346	2356	185222	0.846
$\sigma^2$ butir 17	102	361	2356	185222	0.306
$\sigma^2$ butir 18	110	368	2356	185222	0.822
$\sigma^2$ butir 19	53	341	2356	185222	0.679
$\sigma^2$ butir 20	50	344	2356	185222	0.589
$\sigma^2$ butir 21	106	374	2356	185222	0.949
<b>JUMLAH</b>				$\sum \sigma_{xi}^2 =$	12.858

Dari tabel di atas, diperoleh nilai  $\sigma_y^2$  sebagai berikut :  $\Sigma Y^2 = 185222$ ;  
 $(\Sigma Y)^2 = (2356)^2 = 5550736$ ;  $n = 30$ ;  $\sigma_y^2 = 156,915$

Selanjutnya besaran varian total dan besaran jumlah varians butir variabel taat hukum ( $X_2$ ) dimasukkan ke dalam rumus *Alpha Cronbach* berikut :

$$\begin{aligned} \text{Alpha } (r_{xx}) &= \left( \frac{k}{k-1} \right) \left( \frac{(\sigma_y^2) - (\Sigma \sigma_x^2)}{\sigma_y^2} \right) \\ &= \left( \frac{21}{21-1} \right) \left( \frac{156,915 - 12,858}{156,915} \right) \\ &= (1,05) (0,901648) \\ &= \mathbf{0,963961} \end{aligned}$$

Harga koefisien reliabilitas sebesar 0,96 menunjukkan bahwa reliabilitas instrumen penelitian Variabel Taat Hukum ( $X_2$ ) dapat dikategorikan memiliki reliabilitas yang sangat tinggi.

Uji Reliabilitas terhadap instrumen penelitian Variabel Y yang dilakukan melalui proses perhitungan yang sama, maka diperoleh Harga koefisien reliabilitas sebesar 0,81 menunjukkan bahwa reliabilitas instrumen penelitian Variabel *Human Security* (Y) dapat dikategorikan memiliki reliabilitas yang sangat tinggi.

Adapun hasil uji validitas dan reliabilitas terhadap instrumen penelitian yang terdiri dari Variabel Relokasi Masyarakat ( $X_1$ ), Variabel Taat Hukum ( $X_2$ ) dan Variabel *Human Security* (Y), dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel 3.13. Hasil Uji Instrumen Penelitian**

No.	Variabel	Butir yang layak	Butir yang dihapus	Koefisien Reliabilitas
1.	X <sub>1</sub>	1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33	2, 5, 6, 11, 13, 17, 23, 26, 31.	0,84
2.	X <sub>2</sub>	1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27	4, 7, 12, 15, 21, 26.	0,96
3.	Y	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27	6, 10, 14, 15, 19.	0,81

## **BAB 4**

### **GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN**

#### **4.1. Karakteristik DKI Jakarta**

##### **4.1.1. Sejarah Jakarta**

Jakarta pertama kali dikenal sebagai salah satu pelabuhan Kerajaan Sunda pada abad ke-5 yang bernama Sunda Kelapa, berlokasi di muara Sungai Ciliwung. Penetapan hari jadi Jakarta tanggal 22 Juni oleh Sudiro (Walikota Jakarta tahun 1956) adalah berdasarkan tragedi pendudukan pelabuhan Sunda Kelapa oleh Fatahillah pada tahun 1527. Fatahillah mengganti nama kota tersebut menjadi Jayakarta yang berarti "Kota Kemenangan". Pada masa pendudukan Belanda tahun 1619 melalui VOC yang dipimpin oleh Jan Pieterszoon Coen menduduki Jayakarta dan kemudian mengubah namanya menjadi Batavia. Masa penjajahan Jepang yang dimulai pada tahun 1942, nama Batavia pun diganti kembali menjadi Djakarta untuk menarik hati penduduk pada Perang Dunia II. Kota ini juga merupakan tempat dilangsungkannya Proklamasi Kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 1945.

Sebelum tahun 1959, Djakarta merupakan bagian dari Provinsi Jawa Barat dan hingga tahun 1959, status Kota Djakarta mengalami perubahan dari sebuah kotapraja di bawah Walikota ditingkatkan menjadi daerah tingkat satu (Dati I) yang dipimpin oleh Gubernur pertama yaitu dr. Sumarno Sastroadmodjo seorang dokter tentara. Semenjak dinyatakan sebagai Ibukota, penduduk Jakarta melonjak sangat pesat akibat kebutuhan tenaga kerja pemerintahan yang hamper semua terpusat di Jakarta.

##### **4.1.2. Geografis Jakarta**

Jakarta terdiri dari daratan rendah dengan ketinggian rata-rata 7 meter diatas permukaan laut, terletak pada posisi 6°12' Lintang Selatan dan 106°48' Bujur Timur. Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1227

Tahun 1989, luas wilayah Provinsi DKI Jakarta adalah 7.659,02 km<sup>2</sup>, terdiri dari daratan seluas 661,52 km<sup>2</sup>, termasuk 110 pulau di Kepulauan Seribu dan lautan seluas 6.997,50 km<sup>2</sup>.

Provinsi DKI Jakarta terbagi menjadi 5 Wilayah Kotamadya dan satu Kabupaten administratif, yakni Kotamadya Jakarta Pusat dengan luas 47,90 km<sup>2</sup>, Jakarta Utara dengan luas 142,20 km<sup>2</sup>, Jakarta Barat dengan luas 126,15 km<sup>2</sup>, Jakarta Selatan dengan luas 145,73 km<sup>2</sup> dan Kotamadya Jakarta Timur dengan luas 187,73 km<sup>2</sup>, serta Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu dengan luas 11,81 km<sup>2</sup>.

Di sebelah utara membentang pantai sepanjang 35 km, yang menjadi tempat bermuaranya 13 sungai dan 2 kanal. Disebelah selatan dan timur berbatasan dengan kota Depok, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi, sebelah barat dengan kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang, serta di sebelah utara dengan Laut Jawa.

#### 4.1.3. Geologis Jakarta

Secara geologis, seluruh dataran terdiri dari endapan *Pleistocene* yang terdapat pada  $\pm 50$  m di bawah permukaan tanah. Bagian selatan terdiri atas lapisan *alluvial*, sedang dataran rendah pantai merentang ke bagian pedalaman sekitar 10 km. Dibawahnya terdapat lapisan endapan yang lebih tua yang tidak tampak pada permukaan tanah karena tertimbun seluruhnya oleh endapan *alluvium*. Di wilayah bagian utara baru terdapat pada kedalaman 10 – 25 m, makin ke selatan permukaan keras semakin dangkal 8 – 15 m. Pada bagaian tertentu juga terdapat lapisan permukaan tanah yang keras dengan kedalaman 40 m.

#### 4.1.4. Klimatologis Jakarta

Jakarta memiliki suhu udara yang panas dan kering atau beriklim tropis. Terletak di bagian barat Indonesia, Jakarta mengalami puncak musim penghujan pada bulan Januari dan Februari dengan rata-rata curah hujan 350 mm dengan suhu rata-rata 27 °C. Curah hujan antara bulan Januari dan awal Februari sangat tinggi, pada saat itulah Jakarta dilanda banjir

setiap tahunnya dan puncak musim kemarau pada bulan Agustus dengan rata-rata curah hujan 60 mm. Bulan September dan awal Oktober adalah hari-hari yang sangat panas di Jakarta, suhu udara dapat mencapai 40° C, suhu rata-rata tahunan berkisar antara 25° – 38° C atau 77° – 100° F, dengan tingkat kelembaban udara mencapai 73,0 – 78,0 persen dan kecepatan angin rata-rata mencapai 2,2 m/detik – 2,5 m/detik.

#### 4.1.5. Demografis Jakarta

Faktor dominan yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk DKI Jakarta adalah turunnya angka kematian bayi disamping migrasi dalam jumlah yang cukup besar karena pengaruh daya tarik kota Jakarta sebagai pusat administrasi pemerintahan, ekonomi, keuangan dan bisnis. Dilihat dari struktur umur, penduduk DKI Jakarta sudah mengarah ke “penduduk tua”, artinya proporsi “penduduk muda” yaitu yang berumur 0 – 14 tahun sudah mulai menurun. Bila pada tahun 1990, proporsi penduduk muda masih sebesar 31,9 persen, maka pada tahun 2006 proporsi ini menurun menjadi 23,8 persen. Sepanjang tahun 2002 – 2006, proporsi penduduk umur muda tersebut relatif stabil, yaitu sekitar 23,8 persen. Sebaliknya proporsi penduduk usia lanjut (65 tahun keatas) naik dari 1,5 persen pada tahun 1990 menjadi 2,2 persen pada tahun 2000. Tahun 2006, proporsi penduduk usia lanjut mengalami kenaikan menjadi 3,23 persen. Kenaikan penduduk lansia mencerminkan adanya kenaikan rata-rata usia harapan hidup, yaitu dari 72,79 tahun pada tahun 2002 menjadi 74,14 tahun pada tahun 2006.<sup>1</sup>

#### 4.1.6. Perumahan Rakyat

Dalam lima tahun terakhir telah dapat dibebaskan tanah untuk rumah susun seluas 673.927 m<sup>2</sup> dan telah dibangun rumah susun sewa sebanyak 3.436 unit. Di samping itu, juga telah dilakukan penataan lingkungan pada 79,64 % RW kumuh.

<sup>1</sup> Perda DKI Jakarta No.1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2007-2012.

Masalah yang dihadapi dalam urusan perumahan rakyat berkaitan dengan belum sesuainya lahan yang tersedia dengan arahan RT / RW, mahalnya pembebasan lahan dan rendahnya kesadaran penghuni rumah susun sederhana dalam memenuhi kewajibannya. Di samping itu, masih ditemukan warga masyarakat yang tinggal di kawasan kumuh, bantaran kali, di bawah jalan layang dan jalur kereta api.

## **4.2. Karakteristik Daerah Aliran Sungai Ciliwung (DAS) Ciliwung**

### **4.2.1. Sejarah Sungai Ciliwung**

Taqyudiin dalam penelitiannya mengenai sumberdaya air di daerah aliran sungai Ciliwung (2004 : 86) memberikan uraian mengenai penyebutan nama sungai Ciliwung yang berbeda-beda. Sungai Ciliwung pada naskah kuno dan peta-peta kuno teridentifikasi menurut penulisan toponimnya dengan penulisan Cihaliwan dalam naskah perjalanan Bujangga Manik dari Kelapa ke Pakuan (pada baris 140 k.l tahun 1500). Naskah sunda tersebut diperoleh atas kebaikan Prof. Dr. A. Teeuw dari kumpulan naskah Dr. Noorduyn dalam Adolf Heuken, SJ. (1999). Penyebutan sungai Ciliwung yang lain terdapat juga di peta Batavia Environs 1885 (J. Vos Batavia, 1987) dengan penulisan Tjiliwoeng.

Sungai Ciliwung adalah sebuah sungai besar di Pulau Jawa. Kota-kota yang dilintasi Ciliwung ini adalah kota Bogor, Kabupaten Bogor, Depok dan Jakarta. Hulu sungai ini berada di dataran tinggi yang terletak di perbatasan Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur atau tepatnya di Gunung Gede, Gunung Pangrango dan daerah Puncak. Setelah melewati bagian timur Kota Bogor. Sungai ini mengalir ke utara, disisi barat Jalan Raya Jakarta – Bogor, sisi timur Depok dan memasuki wilayah Jakarta sebagai batas alami wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Di daerah Manggarai aliran sungai Ciliwung banyak dimanipulasi untuk mengendalikan banjir. Jalur aslinya mengalir melalui daerah Cikini, Gondangdia, hingga Gambir. Namun setelah pintu air Istiklal, jalur lama tidak ditemukan lagi karena dibuat kanal-

kanal seperti di sisi barat jalan Gunung Sahari dan Kanal Molenvliet di antara Jalan Gajah Mada dan Jalan Veteran. Di Manggarai, di buat banjir Kanal Barat yang mengarah ke barat, lalu membelok ke utara melewati Tanah Abang, Tomang, Jembatan Lima hingga ke Pluit.

#### 4.2.2. Topografis Sungai Ciliwung

Bagian hilir DAS Ciliwung termasuk wilayah Jakarta merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata  $\pm 7$  meter dpl. Luas wilayah berdasarkan SK Gubernur No. 1227 tahun 1989 adalah daratan seluas 661,52 Km<sup>2</sup> dan berupa lautan seluas 6.977,5 Km<sup>2</sup>, terdapat tidak kurang dari 110 buah pulau yang tersebar di Kepulauan Seribu, terdapat pula 27 buah sungai/saluran/kanal yang digunakan sebagai sumber air minum, usaha perikanan dan pendukung perkotaan.

Dilihat dari keadaan topografinya, kota Jakarta memiliki posisi yang relatif datar ke arah utara dan sedikit bergelombang ke arah selatan. Ketinggian tanah dari daerah pantai sampai ke daerah Banjir Kanal Barat hanya berkisar 0 – 10 meter dpl, sedangkan kemiringan medan mencapai kurang dari 0,5 %. Selanjutnya dari Banjir Kanal Barat ke batas paling selatan dari wilayah DKI Jakarta ketinggiannya berkisar 10 – 15 meter dpl dan kemiringan medan berkisar 0,5 – 1,5 %.

Topografi Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung memanjang dari selatan 6°47' LS (Lintang Selatan) hingga pantai utara pulau Jawa 6°05' LS dan 105°47' – 107°00' BT (Bujur Timur). Daerah yang dilalui sungai Ciliwung dari hulu ke hilir meliputi wilayah Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok dan wilayah DKI Jakarta (Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Utara dan sebagian Jakarta Timur).

#### 4.2.3. Sumber Air Sungai Ciliwung

Sumber air sungai Ciliwung berasal dari tangkapan air hujan dan mata air. Meskipun mata air yang berasal dari resapan air hujan di lapisan tanah yang kemudian keluar di mata air tersebut. Dapat dikatakan asal air di mata air sebenarnya dari air hujan yang tidak

langsung mengalir ke sungai aliran permukaan. Sungai ini bersumber dari Gunung Telaga (Mandalawangi) dan bermuara di Laut Jawa. Aliran pokok sungai menyerupai bentuk L, dengan ruas yang pendek ada di bagian hulu, mengalir dari arah Timur ke Barat sedang ruas yang panjang mengalir dari arah selatan ke utara.

Pada dasarnya, sungai Ciliwung berasal dari Desa Tugu dan mengalir melalui Kota Bogor ke Jakarta dan bermuara ke Teluk Jakarta. Panjang sungai Ciliwung hingga ke pintu air Manggarai adalah 117 Km dengan rata-rata kemiringan dari hulu adalah 2.908 m dpl dan hingga ke Manggarai adalah 8 m dpl. Disepanjang sungai Ciliwung terdapat beberapa bendungan yang berfungsi untuk pengairan, yaitu bendungan Ciratim yang mengairi areal persawahan seluas 142 Ha, bendungan Cisasuseupan yang mengairi persawahan seluas 2.681 Ha, bendungan Cibanon mengairi persawahan seluas 652 Ha dan bendungan Bantarjati mengairi persawahan seluas 200 Ha (BPN Dafi II Bogor, 1993). Bentuk DAS Ciliwung Hulu lebih menyerupai bentuk setengah radial atau kipas. Karakteristik utama dari DAS seperti ini adalah anak-anak sungai mengalir terkonsentrasi ke satu titik di sekitar darah katulampa / Ciawi. Corak DAS Ciliwung hulu ini memberikan bibit banjir yang besar dan fluktuatif dititik pertemuan anak-anak sungai, karena waktu konsentrasi anak-anak sungai relative seragam. Outlet DAS Ciliwung bagian Hulu di Katulampa merupakan Inlet bagi DAS Ciliwung bagian Tengah. DAS Ciliwung Tengah dengan luas 13.763 Ha, pada dasarnya memiliki bentuk memanjang menyerupai saluran pipa terbuka. Dengan bentuk seperti ini dan kondisi fisiografi yang relatif bergelombang, maka factor retardasi aliran di bagian tengah ini cukup lemah sehingga aliran sungai dan aliran permukaan (run-off) yang melaluinya berlangsung cepat menuju ke hilir. Di DAS Ciliwung bagian tengah ini banyak dijumpai daerah depresi antara bukit-bukit dimana anak sungai mengalir.

Keadaan iklim secara umum, beriklim panas dengan suhu maksimum udara berkisar  $33,9^{\circ}\text{C}$  pada siang hari dan suhu minimum udara berkisar  $22,2^{\circ}\text{C}$  pada malam hari. Suhu rata-rata tahunan  $27,1^{\circ}\text{C}$ .

Sungai Ciliwung sebenarnya terbentuk dari rangkaian aliran air permukaan (run off) yang berada di wilayah tangkapan air berupa alur-alur jaringan sungai. Alur-alur tersebut menyatu menjadi aliran besar sungai Ciliwung yang mengalir ke utara menuju muara sungai Ciliwung Sunda Kelapa di pantai utara Jakarta. Rangkaian anak-anak sungai masing-masing menunjukkan jaringan yang dapat diukur kerapatan sungainya.

#### **4.2.4. Jenis Tanah Sungai Ciliwung**

Jenis tanah yang berada di DAS Ciliwung diantaranya yaitu jenis tanah Aluvial, Andosol, Latosol dan Regosol. Hampir 90 % DAS Ciliwung tertutup dengan jenis tanah Latosol. Adapun di bagian hulu di pegunungan jenis tanahnya Andosol dan Regosol (mendekati puncak gunung Pangrango), sedangkan di bagian hilir berjenis tanah Alluvial. (PPT Bogor, 1990). DAS Ciliwung Hulu terdapat 3 jenis tanah yaitu Regosol, Andosol dan Latosol. Di bagian tengah DAS seluruhnya berjenis tanah Latosol dan di bagian hilir DAS berjenis tanah Latosol dan Alluvium.

#### **4.2.5. Sistem Pengendalian Banjir**

Dari 13 sungai yang mengalir di Jakarta, Ciliwung memiliki dampak yang paling luas ketika musim hujan karena sungai tersebut mengalir melalui tengah kota Jakarta dan melintasi banyak perkampungan, perumahan padat dan permukiman kumuh. Sungai ini juga dianggap sungai yang paling parah mengalami perusakan dibandingkan sungai-sungai lain yang mengalir di Jakarta. Selain karena DAS di bagian Hulu di Puncak dan Bogor yang rusak, DAS di Jakarta juga banyak mengalami penyempitan dan pendangkalan yang mengakibatkan potensi penyebab banjir di Jakarta menjadi besar.

Sistem pengendalian banjir sungai Ciliwung mencakup pembuatan sejumlah pintu air / pos pengamatan banjir, yaitu di Katulampa (Bogor), Depok, Manggarai, serta Pintu Air Istiklal. Pemerintah pernah merencanakan untuk membangun waduk di Ciawi di Gadog, Megamendung, Bogor sebagai cara untuk mengendalikan aliran sejak dari bagian hulu.

Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung terbagi dalam tiga wilayah, sebagai berikut :

- a. DAS Ciliwung bagian Hulu seluas 14.876 Ha, yang terbentang mulai dari hulu sampai Stasiun Pengamat Air Sungai (SPAS) Katulampa, meliputi sebagian Kecamatan Kedunghalang, Ciawi dan Cisarua.
- b. DAS Ciliwung bagian Tengah seluas 13.763 Ha, yang terbentang mulai dari SPAS Katulampa hingga batas wilayah Depok dan DKI Jakarta, meliputi sebagian Kecamatan Kedunghalang, Cibinong dan Kota Administratif Depok.
- c. DAS Ciliwung bagian Hilir seluas 8.200 Ha, meliputi wilayah Kecamatan Depok, Kecamatan Cimanggis dan DKI Jakarta.

Aliran sungai Ciliwung digolongkan dalam 3 zona tinggi, dengan ciri sebagai berikut :

- a. Daerah selatan dengan tinggi permukaan 1000 – 1800 m dpl, daerah ini adalah daerah pegunungan yang meliputi Kecamatan Cisarua dibatasi oleh Gunung Pangrango, Gunung Gede, Megamendung dan Hambalang.
- b. Daerah tengah adalah daerah yang bergelombang dan berbukit-bukit dengan tinggi permukaan 200 – 1000 mdpl, meliputi Kecamatan Ciawi, Kodya Bogor dan Kedunghalang. Di daerah ini dijumpai banyak daerah depresi antar bukit-bukit dengan anak-anak sungai mengalir dan bermuara di sungai Ciliwung.

- c. Daerah utara adalah dataran rendah dengan topografi landau dan tinggi permukaan 0 – 200 m dpl. Daerah ini meliputi Kecamatan Cibinong, Kodya Depok, Kecamatan Cimanggis dan Jakarta.

Secara geografis DAS Ciliwung Hulu terletak pada kedudukan  $6^{\circ}02' - 6^{\circ}55'$  LS dan  $106^{\circ}35' - 107^{\circ}$  BT. Sungai ini mengalir melalui 3 wilayah Kecamatan, yaitu Kecamatan Cisarua, Kecamatan Ciawi dan Kecamatan Kedunghalang. Berdasarkan wilayah DAS, daerah aliran Ciliwung Hulu terbagi atas 4 Sub DAS yaitu Sub DAS Ciseek, Sub DAS Cisarua/Cibogo, Sub DAS Ciliwung Hulu dan Sub DAS Ciseusepan/Cisukabirus.

DAS Ciliwung merupakan satu dari beberapa DAS yang tergolong kritis dan termasuk DAS super-prioritas karena memiliki karakteristik sebagai berikut :

- a. Wilayah hilir DAS Ciliwung mencakup daerah Ibukota Negara (DKI Jakarta) yang sangat kaya akan berbagai aset nasional dan permukiman penduduk.
- b. Kerusakan wilayah hulu DAS Ciliwung tidak semata-mata sebagai akibat dari kegiatan pertanian, tetapi juga oleh tumbuhnya permukiman dan prasarana lainnya yang tidak berwawasan lingkungan.
- c. Wilayah hulu DAS Ciliwung merupakan kawasan wisata yang terus berkembang sehingga hal itu mengakibatkan terjadinya tekanan terhadap sumberdaya air menjadi semakin berlanjut.

## BAB 5

### ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

#### 5.1. Analisis Pengaruh Program Relokasi Masyarakat Terhadap *Human Security*.

Daerah bantaran sungai Ciliwung tidak pernah lepas dari masalah banjir yang melanda apabila hujan besar mengguyur wilayah tersebut. Selama bertahun-tahun masyarakat hidup dengan kondisi demikian dan fenomena banjir menjadi sesuatu yang dimaklumi oleh warga yang bermukim di bantaran sungai tersebut. Pemerintah beranggapan bahwa solusi terbaik bagi permasalahan ini adalah pemindahan seluruh warga dari wilayah banjir ke tempat yang lebih baik. Hal ini diperlukan, agar kegiatan normalisasi DAS Ciliwung dapat dilaksanakan untuk mengatasi banjir yang sering kali melanda wilayah DKI Jakarta. Berkaitan dengan hal tersebut, dibangunlah rumah susun sebagai sarana dari program relokasi yang direncanakan oleh pemerintah untuk memindahkan masyarakat bantaran sungai Ciliwung di wilayah DKI Jakarta.

Dengan kepadatan penduduk yang sangat tinggi, dapat dikatakan bahwa permukiman penduduk di wilayah bantaran sungai Ciliwung tepatnya di Kelurahan Kebon Baru dan Pengadegan Jakarta Selatan, menyebar padat dan merata di setiap lahan permukiman. Bahkan ada sebagian penduduk yang tinggal pada lokasi-lokasi yang sebenarnya kurang layak untuk ditempati seperti misalnya pada pinggiran sungai Ciliwung yang memiliki resiko banjir yang sangat tinggi. Dari data yang diperoleh dalam penelitian ini, terdapat kurang-lebih 9,27 % atau 2.985 jiwa tinggal di pinggir kali dan jumlah ini merupakan sebagian dari katagori bantaran sungai yang tentu jumlahnya akan lebih banyak lagi. Dari hasil tabulasi data jawaban responden berkaitan dengan kondisi tempat asal, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menempati bangunan semi permanen yang rata-rata berupa bangunan petak yang berukuran kecil (respons jawaban responden dapat dilihat pada indikator

pernyataan 1 dan 2 dalam tabulasi jawaban responden kuesioner variabel relokasi masyarakat, yang terdapat pada lampiran).

Secara keseluruhan, ditinjau dari tingkat migrasi penduduk pada lokasi penelitian dapat dikatakan memiliki mobilitas penduduk yang relatif tinggi. Pertambahan penduduk daerah tersebut selain dipengaruhi oleh urbanisasi masyarakat baik yang berasal dari dalam kota Jakarta sendiri, juga berasal dari luar kota. Hal ini menyebabkan tingginya kepadatan penduduk, hingga mengakibatkan meluasnya permukiman penduduk di sekitar bantaran sungai Ciliwung. Banyak masyarakat yang membangun rumah huniannya bukan lagi hanya dipinggir sungai, namun sudah berkembang ke badan sungai. Dari 100 responden dalam penelitian ini, terdapat 69 % atau 69 responden yang memberikan respons bahwa kebutuhan akan tempat tinggal adalah alasan mereka untuk mendirikan rumah di bantaran sungai Ciliwung. Bila dikaitkan dengan *human security*, hal ini merupakan fenomena yang mencerminkan bahwa desakan kebutuhan akan tempat tinggal membuat manusia tidak lagi memperhatikan akan pentingnya keselamatan hidup. Karena dengan mendirikan rumah di bantaran sungai tanpa memperhatikan aspek keamanan lingkungan, justru akan membawa efek yang sangat membahayakan manusia itu sendiri.

Kondisi permukiman awal di bantaran sungai Ciliwung yang dilatarbelakangi oleh ancaman bahaya banjir yang selama ini dianggap menjadi hal biasa oleh masyarakatnya. Hal ini diakui oleh masyarakat dilokasi tempat penelitian, dalam kuesioner penelitian menyangkut hal tersebut tercantum tiga pernyataan indikator bahaya banjir, yaitu : pernyataan pertama (bahaya banjir sering kali melanda permukiman di bantaran Ciliwung), dari 100 responden, terdapat 98 responden yang mengakuinya. Pernyataan kedua (banjir bukan merupakan ancaman bahaya bagi warga bantaran Ciliwung, karena sering mengalaminya), terdapat 79 responden yang menyetujui pernyataan tersebut. Pernyataan ketiga (bila banjir datang, saya selalu mengungsi ke posko banjir yang disediakan oleh kelurahan). Pernyataan tersebut merupakan salah satu upaya penanggulangan banjir di kawasan tersebut yang telah dikoordinir oleh pemerintah kelurahan dengan mengikutsertakan masyarakat. Kondisi tempat

permukiman di bantaran sungai Ciliwung sebagai tempat hunian awal juga diperparah oleh kurangnya kesadaran warga akan pentingnya menjaga kebersihan sungai dengan tidak membuang sampah ke sungai. Seringnya masyarakat untuk membuang sampah ke sungai tersebut juga dipengaruhi oleh kebiasaan yang dilakukan warga hingga sulit sekali untuk dihilangkan.

Dalam kaitannya dengan permasalahan yang melatarbelakangi kondisi lokasi permukiman awal masyarakat bantaran sungai Ciliwung, maka pemerintah mencanangkan program relokasi. Untuk itu, pembangunan rumah susun sebagai lokasi permukiman baru yang akan digunakan sebagai tempat hunian masyarakat bantaran Ciliwung. Berdasarkan data yang terangkum dari tabulasi jawaban responden menyangkut hal tersebut, terlihat bahwa masyarakat bantaran sungai Ciliwung sebagian besar kurang menghendaki terlaksananya program relokasi. Dari 100 responden dalam penelitian ini, terdapat 91 responden yang menyatakan keberatan untuk tinggal di rumah susun dengan alasan bahwa tinggal di rumah susun akan sangat merepotkan dan harus membayar biaya sewa. Selain itu masyarakat bantaran Ciliwung pun merasa bahwa tinggal di rumah susun tidak sesuai dengan budaya yang selama ini dijalani.

Dengan adanya program relokasi, diharapkan rumah susun yang akan dijadikan sebagai tempat permukiman tujuan bagi masyarakat bantaran sungai Ciliwung berlokasi tidak jauh dari tempat permukiman awal, selain itu juga diharapkan agar mudah menjangkau sentra ekonomi seperti pasar. Karena masyarakat bantaran Ciliwung sebagian besar bermata pencaharian di lokasi pasar Jatinegara, sehingga harapan mereka agar lokasi permukiman yang baru juga tidak jauh dari tempat kerjanya. Dari 100 responden, terdapat 63 responden yang menyatakan bahwa hal tersebut sangat penting dan menjadi harapan utama masyarakat bantaran sungai Ciliwung yang akan dikenakan program relokasi. Adanya fasilitas hidup yang menjanjikan di rumah susun merupakan salah satu faktor yang harus dipertimbangkan oleh masyarakat bantaran Ciliwung untuk bersedia direlokasi. Bila dibandingkan dengan kondisi permukiman yang saat ini mereka huni, pada dasarnya dengan adanya rumah susun akan dapat memperbaiki kualitas hidup warga.

Penentuan lokasi pembangunan rumah susun yang akan digunakan tentunya dilakukan dengan pertimbangan agar terhindar dari ancaman bahaya banjir. Karena pada dasarnya setiap manusia memiliki keinginan untuk hidup tenang, terhindar dari berbagai ancaman. Bagi masyarakat bantaran sungai Ciliwung, adanya langkah penanggulangan bahaya banjir merupakan harapan hidup yang selama ini diidamkan. Berkaitan dengan hal ini, terdapat pernyataan dalam kuesioner penelitian variabel relokasi yang menyatakan bahwa keinginan masyarakat bantaran sungai Ciliwung agar terhindar dari bahaya banjir yang dapat menyebabkan korban jiwa. Sehingga menjadi salah satu motivasi untuk bersedia mengikuti program relokasi ke rumah susun.

Lokasi permukiman yang baru sebagai tempat dibangunnya rumah susun untuk hunian masyarakat bantaran sungai Ciliwung yang akan di relokasi, diyakini sesuai dengan rencana tata ruang kota Jakarta. Dengan demikian rumah susun sebagai tempat permukiman yang baru sifatnya adalah permanen. Sehingga kemungkinan besar tidak akan ada lagi ancaman pemindahan dan masyarakatnya yang tinggal di tempat tersebut pun akan merasa nyaman. Berkaitan dengan hal tersebut, melalui penelitian ini diperoleh data jawaban responden bahwa dari 100 responden terdapat 64 responden yang memiliki keyakinan bahwa apabila mereka tinggal di rumah susun yang telah disediakan oleh pemerintah, maka tidak akan ada lagi ancaman bahaya banjir dan ancaman penggusuran.

Pada dasarnya upaya pemerintah untuk merelokasi masyarakat bantaran sungai Ciliwung pada lokasi yang telah ditentukan merupakan langkah untuk mewujudkan kesejahteraan melalui penyediaan sarana kepentingan umum. Rumah susun yang akan ditempati oleh warga bantaran sungai Ciliwung adalah sarana kepentingan umum yang harus dipergunakan sebaik-baiknya. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, melalui penelitian ini diperoleh data bahwa terdapat 42 responden yang menyatakan bahwa rumah susun merupakan sarana kepentingan umum yang harus dipergunakan sebaik mungkin. Apabila dibandingkan dengan responden yang memiliki respons sebaliknya, maka dapat disimpulkan bahwa rumah susun bukan menjadi satu-satunya solusi yang diharapkan oleh masyarakat bantaran sungai Ciliwung sebagai tempat hunian.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diproyeksikan prosentase jawaban responden terhadap kuesioner penelitian variabel relokasi ( $X_1$ ) yang terdiri dari tiga dimensi (tempat asal, tempat tujuan dan aturan peruntukan) yang didalamnya terdapat 24 indikator, sebagai berikut :

**Tabel 5.1. Penilaian Responden Terhadap Kuesioner Variabel  $X_1$**

Dimensi Indikator	Skor	Prosentase
Tempat Asal	335.75	39.71
Tempat Tujuan	258.67	30.59
Aturan Peruntukan	251.14	29.70
<b>Jumlah</b>	<b>845.56</b>	<b>100.00</b>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa komposisi pengaruh program relokasi masyarakat terhadap *human security* didominasi oleh kondisi tempat permukiman asal masyarakat bantaran sungai Ciliwung dengan nilai prosentase 39,71. Hal ini menjadi salah satu pertimbangan yang mendominasi pemikiran warga bantaran sungai Ciliwung terhadap penilaian program relokasi. Sementara penilaian responden terhadap kondisi tempat tujuan dari program relokasi yaitu rumah susun menduduki peringkat kedua dari dominasi prosentase yaitu 30,59. Sedangkan dimensi aturan peruntukan pada kuesioner variabel  $X_1$  memperoleh prosentase 29,7 dari penilaian responden. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh program relokasi terhadap *human security* dilatarbelakangi oleh kondisi permukiman masyarakat bantaran sungai Ciliwung yang kumuh dan tidak tertata dengan baik mengakibatkan terjadinya penyempitan DAS Ciliwung hingga menyebabkan banjir di wilayah DKI Jakarta. Untuk menanggulangi hal tersebut, melalui program relokasi memungkinkan untuk melaksanakan penertiban guna mewujudkan normalisasi DAS Ciliwung sehingga keselamatan manusia dari lingkungan yang berbahaya dapat lebih terjamin. Pada dasarnya program relokasi masyarakat bantaran sungai Ciliwung memiliki tujuan selain untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat juga bertujuan untuk menjamin *human security* warga DKI Jakarta secara umum dari bahaya banjir yang sering mengancam.

## 5.2. Analisis Pengaruh Taat Hukum Terhadap *Human Security*.

Secara umum upaya penanggulangan bahaya banjir yang sering melanda wilayah DKI Jakarta dapat diatasi apabila normalisasi sungai Ciliwung dapat dilaksanakan dengan baik. Sebelum melakukan normalisasi, maka terlebih dahulu perlu dilakukan langkah penertiban daerah aliran sungai atau wilayah bantaran dari bangunan-bangunan atau permukiman yang tidak pada tempatnya. Sementara itu, perlu difikirkan kembali untuk melaksanakan penertiban harus disediakan tempat atau lokasi permukiman baru yang dapat menampung masyarakat bantaran sungai Ciliwung. Tujuan akhir dari hal tersebut adalah untuk mewujudkan *human security* masyarakat bantaran sungai Ciliwung dari ancaman bahaya banjir secara khusus dan *human security* masyarakat DKI Jakarta secara umum.

Berkaitan dengan penertiban daerah aliran sungai, adanya kesadaran dari masyarakat bantaran sungai Ciliwung menjadi faktor yang sangat berpengaruh. Melalui kesadaran yang diwujudkan dengan sikap taat hukum dari masyarakat bantaran tersebut, maka akan mempermudah terlaksananya program relokasi. Hal ini diketahui melalui jawaban responden terhadap kuesioner variabel taat hukum, bahwa sebagian besar responden penelitian menyadari akan pentingnya penataan kembali permukiman penduduk di bantaran sungai Ciliwung. Dari 100 responden, terdapat 65 responden yang menyatakan bahwa tinggal di pinggir kali dengan kondisi lingkungan yang kumuh dan tidak tertata rapih sangat berbahaya dan tidak nyaman. Dalam hal ini sikap taat hukum masyarakat bantaran sungai Ciliwung pada kenyataannya juga dilatarbelakangi oleh faktor kebutuhan hidup manusia. Pentingnya rumah sebagai tempat tinggal untuk perlindungan diri dan keluarga, bagi masyarakat bantaran sungai Ciliwung menjadi hal yang harus terpenuhi walaupun harus mendirikan rumah di lokasi bantaran kali.

Banyaknya bangunan semi permanen yang digunakan sebagai tempat tinggal oleh masyarakat bantaran sungai Ciliwung, yang terkesan kumuh karena dibangun dengan bahan seadanya. Dengan demikian kurangnya perhatian masyarakat akan pentingnya memiliki perizinan terhadap tempat

tinggalnya pun memperoleh jumlah yang cukup banyak. Dari hasil penelitian yang terangkum dalam rekapitulasi jawaban responden terhadap kuesioner variabel  $X_2$  tentang butir pernyataan mengenai legalisasi dan perizinan bangunan di bantaran sungai Ciliwung, terlihat bahwa sebagian besar masyarakatnya tidak memiliki kelengkapan administrasi perumahan dan aset tanah yang dimiliki.

Disisi lain terdapat kenyataan yang sangat kontras, tidaklah mudah merelokasi warga hunian bantaran sungai Ciliwung yang diyakini menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir di Jakarta, karena para penghuni permukiman tersebut sudah lama menetap disana. Rencana relokasi sebagai upaya penertiban permukiman di bantaran sungai Ciliwung, menjadi isu yang kurang menarik bagi warganya, karena kebanyakan dari mereka merasa kurang mampu untuk membayar biaya sewa Rusun. Sikap masyarakat bantaran sungai Ciliwung yang sebagian besar menyakini bahwa hal tersebut benar, mereka cenderung untuk menolak anjuran pemerintah. Dengan kondisi seperti ini, ketaatan hukum dari masyarakat sulit untuk dicapai. Karena mereka sudah tidak percaya lagi kepada pemerintah, hingga bersikap apatis dan cenderung untuk tidak menghiraukan kaidah ketaatan hukum.

Berkaitan dengan penerapan program relokasi masyarakat bantaran sungai Ciliwung yang telah berdasarkan pada peraturan dan perundang-undangan tentang kepentingan umum dan kelestarian lingkungan hidup, maka sikap masyarakat yang taat hukum dapat diwujudkan dengan kesediaannya untuk mengikuti program tersebut. Disamping itu manfaat yang akan diperoleh masyarakat bantaran sungai Ciliwung akan banyak dirasakan, seperti : penggantian aset tanah dan bangunan, pemberian dana kerohiman atau bantuan pindah ke pemukiman baru yang telah ditentukan oleh pemerintah. Sebaliknya, *punishment* atau pemberian sanksi juga akan dirasakan oleh masyarakat bantaran sungai Ciliwung yang tidak memiliki kesadaran akan pentingnya hal tersebut untuk semata-mata mewujudkan kepentingan umum yaitu penanggulangan bahaya banjir di wilayah DKI Jakarta. Dengan kesediaan masyarakat untuk mentaati aturan, juga akan sangat bermanfaat untuk jaminan terselenggaranya fasilitas kepentingan umum yang dapat dirasakan oleh

seluruh warga. Prosentase jawaban responden terhadap kuesioner penelitian variabel taat hukum ( $X_2$ ) yang terdiri dari tiga dimensi (aturan pemerintah, reward dan punishment) yang didalamnya terdapat 21 indikator butir pernyataan, dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut :

**Tabel 5.2. Penilaian Responden Terhadap Kuesioner Variabel  $X_2$**

Indikator	Skor	Prosentase
Aturan Pemerintah	335.57	36.28
Reward	357.29	38.63
Punishment	232	25.08
Jumlah	924.86	100.00

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa komposisi pengaruh taat hukum masyarakat terhadap *human security* didominasi oleh *reward* dengan nilai prosentase sebesar 38,63. Hal ini menjadi salah satu respons masyarakat bantaran sungai ciliwung terhadap program relokasi dengan mengambil sikap taat hukum untuk memperoleh manfaat yang baik untuk kepentingan umum. Sementara penilaian responden terhadap aturan pemerintah dari variabel taat hukum menduduki peringkat kedua dari dominasi prosentase yaitu 36,28. Sedangkan dimensi *punishment* pada kuesioner variabel  $X_2$  memperoleh prosentase 25,08 dari penilaian responden. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh taat hukum terhadap *human security* dilatarbelakangi oleh pertimbangan bahwa kesadaran hukum yang diwujudkan dengan sikap taat hukum oleh masyarakat akan sangat membantu kelancaran bagi terselenggaranya program relokasi masyarakat sebagai upaya penanggulangan ancaman bahaya banjir di wilayah DKI Jakarta.

Sedangkan penilaian responden terhadap kuesioner penelitian Variabel Y, dapat dilihat melalui prosentase jawaban responden terhadap kuesioner penelitian variabel *human security* (Y) yang terdiri dari tiga dimensi (keamanan lingkungan, keamanan individu dan kesejahteraan) yang

didalamnya terdapat 22 indikator butir pernyataan, dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut :

**Tabel 5.3. Penilaian Responden Terhadap Kuesioner Variabel Y**

Indikator	Skor	Prosentase
Keamanan Lingkungan	309.63	35.71
Keamanan Individu	270.5	31.20
Kesejahteraan	286.88	33.09
Jumlah	867.00	100.00

Melalui data pada tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa komposisi penilaian responden terhadap variabel *human security* di dominasi oleh dimensi keamanan lingkungan yang memiliki nilai prosentase 35,71. Hal ini menunjukkan bahwa respons masyarakat bantaran sungai Ciliwung terhadap *human security* lebih besar dilatarbelakangi oleh pertimbangan keamanan lingkungan. Sementara penilaian responden terhadap kesejahteraan dari variabel *human security* menduduki peringkat kedua dari dominasi prosentase yaitu 33,09. Sedangkan dimensi keamanan individu pada kuesioner variabel Y memperoleh nilai prosentase 31,20 dari penilaian responden penelitian.

### 5.3. Persepsi Masyarakat Bantaran Tentang Normalisasi DAS Ciliwung

Perlu diketahui bahwa fenomena yang terjadi pada masyarakat bantaran sungai Ciliwung tidak sepenuhnya memenuhi apa yang telah diharapkan oleh pemerintah. Pada umumnya masyarakat bantaran sungai Ciliwung kurang memberikan respons yang memuaskan terhadap program relokasi. Hal ini dapat dilihat melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti bersama Bapak Beli Bachtiar (54 Tahun) warga Pengadegan RW 02 bantaran sungai Ciliwung, sebagai berikut :

Peneliti (P), Responden (R)

P : Bapak udah pernah dengar soal rumah susun yang diusulin oleh pemerintah ?

- R : Pernah mas, katanya sih mereka itu petugas dari DKI yang pada mau tau apakah warga sini mau di relokasi. Soalnya kata mereka sepanjang bantaran kali Ciliwung ini bakalan mau di benahin supaya engga jadi penyebab banjir lagi.
- P : Terus setelah tau penjelasan dari mereka, Bapak mau ga tinggal di rumah susun ?
- R : Engga mau, ga kuat bayarnya mas, kan nanti tiap bulannya kita harus bayar sewa, belum lagi kalau ada kebakaran pasti ribet naik-turun tangganya. Terus banyak contoh rumah susun yang ga sesuai dengan keinginan warga, yang ada malah dipindah tanganin untuk orang-orang yang mampu bayar padahal kan rusun itu bukan buat mereka.
- P : Bapak, apa engga bosan ngalamin kebanjiran kalo terus tinggal di sini ?
- R : Cape si cape, tapi apa boleh buat, kami kan udah puluhan tahun tinggal di sini, lagi pula pemerintah ma paling Cuma ngomong doang. Dulu katanya kali ini mau dibenerin, tapi sampe sekarang ga jadi-jadi tuh.
- P : Kira-kira warga lain mau ga Pak, disuruh pindah ke rumah susun ?
- R : Ya engga mau lah, kalo ganti ruginya engga setimpal, kecuali kalau tinggal di rumah susun bisa gratis.

Sebenarnya masyarakat sudah menyadari bahaya tinggal di daerah bantaran sungai Ciliwung, namun tampaknya mereka tidak mempunyai pilihan lain untuk pindah. Padahal selama bermukim di daerah bantaran sungai tersebut, seringkali mereka mengalami ancaman bahaya banjir yang melanda lokasi permukimannya. Ancaman bahaya banjir yang menuntut kerugian harta benda bahkan korban jiwa, tidak membuat masyarakat bantaran sungai Ciliwung untuk meninggalkan lokasi permukiman mereka. Hal ini dilatarbelakangi oleh kondisi ekonomi yang menuntut mereka untuk tetap hidup di lokasi tersebut.

Masyarakat bantaran sungai Ciliwung, pada umumnya berprinsip bahwa lokasi permukiman yang saat ini ditempati sudah menjadi lingkungan yang sangat erat dan sulit dipisahkan dengan kehidupan mereka. Banjir yang seringkali melanda permukiman mereka adalah hal wajar yang biasa mereka alami. Adanya upaya pemerintah dalam hal penanggulangan banjir dengan melakukan penertiban DAS yang mengharuskan masyarakat bantaran sungai Ciliwung untuk direlokasi, dianggap sebagai ancaman oleh warga bantaran.

Ditambah lagi dengan seringnya pemerintah memberikan janji-janji kepada masyarakat dalam hal mengatasi permasalahan Ciliwung, membuat mereka menjadi skeptis bahkan antipati terhadap berbagai program pemerintah menyangkut normalisasi sungai.

Kondisi inilah yang menjadi penyebab belum terlaksananya kegiatan normalisasi sungai Ciliwung yang didalamnya terdapat rencana program relokasi dalam rangka penertiban DAS. Terkesan bahwa, pemerintah mengalami kebingungan tentang bagaimana dan darimana memulai langkah persuasif kepada masyarakat bantaran sungai Ciliwung agar memiliki persepsi yang sama dengan pemerintah untuk bersedia mengikuti program relokasi guna mendukung upaya penertiban DAS.

Bila hal ini dibiarkan terus-menerus terjadi tanpa ada penyelesaian yang tepat dari pemerintah, maka dapat dipastikan banjir akan terus melanda DKI Jakarta. Kondisi ini berpotensi menjadi ancaman terhadap keamanan manusia dari lingkungan yang berbahaya. Karena faktor keamanan manusia merupakan bagian dari aspek kehidupan yang terlingkup dalam Ketahanan Wilayah, maka respons negatif masyarakat bantaran terhadap rencana relokasi akan berimplikasi negatif terhadap Ketahanan Wilayah di Provinsi DKI Jakarta.

Relokasi masyarakat bantaran sungai Ciliwung merupakan program yang direncanakan oleh pemerintah dalam rangka normalisasi DAS untuk penanggulangan banjir yang sering kali melanda wilayah DKI Jakarta. Pada prinsipnya rencana tersebut sangat dibutuhkan oleh seluruh masyarakat DKI Jakarta, agar fenomena banjir dapat teratasi dan tidak lagi menjadi ancaman bagi keselamatan warga Jakarta. Karena dengan merelokasi masyarakat bantaran sungai, maka program normalisasi DAS Ciliwung dapat dilaksanakan. Hal ini berguna untuk mengembalikan fungsi sungai sebagai tempat mengalirnya air. Dengan penertiban DAS dari permukiman penduduk, diharapkan dapat mewujudkan upaya keselamatan warga bantaran dari bahaya banjir. Sehingga faktor keamanan manusia yang merupakan bagian dari upaya penanggulangan banjir untuk menjamin keselamatan masyarakat bantaran sungai Ciliwung memperoleh perhatian yang utama. Dalam kaitannya dengan

Ketahanan Wilayah, keamanan manusia merupakan salah satu aspek yang diprioritaskan oleh pemerintah untuk menanggulangi banjir, dan harus dilakukan dengan merelokasi masyarakat yang bermukim di bantaran sungai.

Banjir di kawasan DAS Ciliwung masih terjadi, karena terdapat beberapa titik di sepanjang DAS dan Kanal yang sempit oleh permukiman liar dan berupa meander atau kelokan yang menyerupai kantong. Untuk mengatasinya akan dilakukan relokasi, pembebasan lahan untuk pelebaran kanal dan pembuatan sodetan. Menurut pihak Pemdan DKI, permukiman liar sepanjang DAS Ciliwung telah menyempitkan badan sungai. Beberapa tahun lalu telah ada upaya relokasi beberapa ribu KK (Kepala Keluarga) di bantaran ke Rumah Susun, namun permukiman liar itu muncul lagi.

Guna mengatasi hal tersebut, pemerintah berencana untuk membuat sodetan di aliran sungai Ciliwung yang memungkinkan pembangunan Rusun sebagai lokasi tempat tinggal masyarakat bantaran. Dengan membuat sodetan, maka ruas sungai di dua daerah tersebut masing-masing akan memendek sekitar 2,5 Km. Sedangkan panjang sodetan kira-kira hanya 200 meter. Untuk membuat sodetan akan dibebaskan lahan sepanjang itu dan lebarnya 20 meter, dengan system ganti rugi. Selanjutnya ruas sungai yang ditutup, nantinya akan direklamasi dan dijadikan permukiman. Kawasan bekas sungai itu akan dibangun rumah susun sederhana yang disewakan dengan tarif murah.

Disinyalir bahwa masyarakat yang bermukim di daerah bantaran sungai menjadi penyebab banjir di Jakarta. Ciliwung sebagai salah satu dari 13 sungai yang ada di Jakarta, menjadi pusat perhatian pemerintah untuk melakukan penertiban sebagai langkah normalisasi DAS. Penertiban Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung merupakan langkah yang diambil oleh pemerintah dalam upaya untuk menanggulangi permasalahan banjir di wilayah DKI Jakarta. Permasalahan yang sering timbul di daerah bantaran sungai pada umumnya adalah berkembangnya bangunan liar serta permukiman kumuh. Daerah bantaran sungai Ciliwung dengan komunitas penduduknya yang relatif besar merupakan wilayah yang sangat rawan dengan banjir, setiap kali Jakarta di guyur hujan deras. Masyarakat yang tinggal di sana selama bertahun-tahun

telah terbiasa bahkan dapat dikatakan sudah akrab dengan fenomena banjir yang sering melanda wilayah permukiman mereka. Melalui informasi yang diperoleh dari penelitian ini, ternyata bahwa masyarakat yang bermukim di bantaran sungai Ciliwung telah sering kali diupayakan oleh pemerintah untuk pindah ke permukiman yang menurut pemerintah lebih baik yaitu Rusun (Rumah Susun).

Namun masyarakat bantaran sungai Ciliwung tidak bersedia menerima usulan upaya pemerintah tersebut. Pertimbangan-pertimbangan yang diajukan pemerintah mengenai tingkat kehidupan yang selayaknya akan lebih baik dari memilih tetap bermukim di bantaran sungai, system sanitasi yang juga lebih memadai, serta beberapa pertimbangan dalam lingkup kehidupan lainnyapun tidak menjadi bahan pertimbangan masyarakat. Pada umumnya masyarakat bantaran sungai Ciliwung lebih memilih untuk tetap bermukim didaerah tersebut, yang pada saat ini sudah menjadi lahan tempat kehidupan mereka berlangsung, walaupun tetap menghadapi realita bahwa banjir akan selalu rawan menyapu permukiman mereka.

Hal ini dapat dilihat dari sikap masyarakat bantaran Ciliwung yang enggan untuk pindah ke rumah susun yang akan disediakan oleh pemerintah. Mereka merasa bahwa tawaran pemerintah untuk memindahkan mereka ke rumah susun adalah hal yang tidak tepat, karena anggapan mereka bahwa kehidupan di dalam rumah susun akan sangat menyulitkan mereka, baik dari segi ekonomi, sosial maupun budaya. Tentunya mereka khawatir karena faktor ekonomi yang akan menghambat kehidupan mereka, setiap bulan mereka harus memberikan uang sewa agar tetap dapat tinggal di rumah susun. Dari segi sosial, mereka merasa akan terlalu rumit jika harus tinggal di rumah susun, karena bentuk dari rumah susun tersebut tidak mendukung penghuninya memiliki kenyamanan dan keamanan yang seutuhnya. Misalnya jika terjadi kebakaran maka akan mengancam banyak sekali jiwa, karena bentuk rumah susun yang bertingkat dan tidak memudahkan penghuninya untuk dengan cepat bisa keluar dari tempat tinggalnya. Dari segi budaya, tentunya mereka akan merasa terkejut tinggal ditempat yang mungkin aneh menurut mereka karena Rusun tersebut terdiri dari bangunan bertingkat dimana mereka harus siap

untuk saling berbagi, baik tempat, privasi maupun kenyamanan. Suara *Pembaruan Daily*, dalam tulisan Ujang Zaelani/Antara (14 / 11), memberikan gambaran normalisasi di mata warga bantaran sebagai berikut :

Hujan adalah hal yang tidak disukai sebagian besar penghuni bantaran kali di Jakarta. “Ya, saat hujan turun hati pasti cemas, takut kali meluap”, tutur Sidik (70), warga RT 07 / RW 03 Kel. Kampung Melayu, Kec. Jatinegara Jakarta Timur. Selama menetap di sepanjang bantaran kali Ciliwung, rumah Sidik sudah biasa terendam. Saat banjir besar awal 2007 lalu, rumah yang hanya berjarak 2 meter dari tepi Ciliwung nyaris hilang, tenggelam. Selama 30 tahun, Sidik telah menjadi penghuni tetap bantaran Ciliwung. Dalam kondisi uzur dan sakit-sakitan, sementara bantuan evakuasi belum datang, orang-orang seperti Sidik rawan menjadi korban karena kedinginan atau lama terendam. Beban kecemasan Sidik bertambah beberapa pekan belakangan. Bukan hanya soal hujan atau kemungkinan banjir kiriman, melainkan adanya kabar penggusuran penghuni bantaran kali, “Orang susah seperti saya mau tinggal di mana kalau digusur” katanya.

Bangunan liar di bantaran membuat lebar kali menyempit sehingga dituding sebagai biang keladi banjir. Pemprov DKI pun mengumandangkan penertiban penghuni pinggir kali alias normalisasi Ciliwung. Bahkan, kata Sidik : setiap Gubernur yang menjabat pernah melontarkan pernyataan akan melaksanakan penertiban permukiman kumuh di bantaran kali.

Tetangga Sidik, Romli (43) berpendapat bahwa rencana Pemprov DKI menertibkan permukiman liar hanya sebuah angan-angan meski sempat pernah ada program bernama Normalisasi Kali Ciliwung. “Kabar penertiban bantaran kali selalu muncul saat banjir datang, nanti kalau sudah tidak ada hujan dan banjir pasti kabar itu hilang. Buktinya hingga sekarang tidak ada penertiban” ungkap Romli.

Lain lagi pendapat Padri (42), ia mengungkapkan pernah beberapa kali ada petugas datang mengukur tanah “katanya sih mau melebarkan kali meskipun sampai sekarang rencana itu tidak jadi” ujar Padri.

Bagaimana bila Pemprov DKI benar-benar menggusur permukiman di bantaran Ciliwung ? Sembilan warga yang kebetulan siang itu berkumpul dan berbincang dengan SP menyatakan jawaban berbeda. Separuh dari mereka setuju direlokasi ketempat lain. Hanya saja mereka tidak suka tinggal di rumah susun. Sementara itu, beberapa orang lainnya merasa berat untuk dipindah karena sudah puluhan tahun tinggal disana.

Said (46), dalam perbincangan itu adalah salah seorang warga yang tidak setuju penertiban. Lantang ia mengatakan akan

menentang pemerintah jika seenaknya menggusur permukiman mereka tanpa uang kompensasi setimpal. Alasannya, mereka telah membayar PBB setiap tahun dan dalam jangka waktu lama. Di samping itu, Said merasa tanah yang mereka tempati sekarang ini merupakan tanah warisan turun-temurun. Said menolak pendapat yang menyamakan kondisi tanah yang mereka tinggali seperti tanah yang dikontrakan kepada mereka.

Mengenai pembayaran PBB, Sekretaris Daerah Pemprov DKI Jakarta, Muhayat mengatakan “pembayaran oleh warga yang bermukim di bantaran kali memang sudah seharusnya, bayar PBB kan kewajiban setiap warga Negara. Tapi bukan berarti warga yang bayar PBB memiliki hak atas tanah itu”. (Hotman Siregar).<sup>1</sup>

Sebenarnya masyarakat bantaran Sungai Ciliwung telah menyadari akan bahaya banjir yang setiap saat dapat melanda daerah permukimannya. Namun mereka tampaknya tidak mempunyai pilihan lain untuk pindah. Padahal selama menempati daerah bantaran sungai tersebut, musibah banjir kerap melanda permukiman mereka. Puluhan nyawa manusia melayang, harta benda pun tak terselamatkan.

Daerah bantaran sungai Ciliwung tidak pernah lepas dari masalah banjir, selama bertahun-tahun masyarakatnya hidup dengan kondisi demikian. Telah menjadi sesuatu yang dimaklumi oleh warga bantaran sungai tersebut, apabila banjir datang melanda permukiman mereka hingga menimbulkan berbagai kesulitan. Di sisi lain pemerintah berpandangan bahwa hal itu dikarenakan oleh andil warga yang tidak memperhatikan dan memelihara lingkungan dengan baik. Contohnya dengan mendirikan bangunan sebagai tempat bermukim di bantaran bahkan di badan sungai. Hal ini sangat berbahaya, bukan saja akan menimbulkan ancaman terhadap keselamatan jiwa manusia yang bermukim di lokasi tersebut tetapi juga sebagai penyebab banjir yang efeknya meluas dirasakan oleh masyarakat Jakarta secara umum.

Dengan demikian pemerintah beranggapan bahwa solusi terbaik bagi masalah tersebut adalah merelokasi masyarakat bantaran sungai

---

<sup>1</sup> <http://groups.yahoo.com/group/nasional-list/message/83949>

Ciliwung ke tempat yang lebih baik, yaitu rumah susun. Pemerintah mengupayakan hal tersebut dengan memperkenalkan ide tinggal di rumah susun kepada warga. Dengan pendekatan persuasif diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya hal tersebut sebagai langkah penanggulangan bahaya banjir. Tujuan dari upaya pemerintah antara lain untuk memperlancar kegiatan penertiban umum wilayah kota Jakarta yang bebas dari permukiman liar dan membangun tata ruang kota yang didasarkan pada perencanaan. Upaya tersebut tidak akan terlaksana, jika masyarakat bantaran Ciliwung sendiri tidak kooperatif dan mendukung. Rencana program relokasi masyarakat ke Rusun sepertinya merupakan kebijakan yang pro rakyat.

Namun warga masyarakat yang bermukim di bantaran sungai Ciliwung ternyata tidak begitu tertarik mendengar hal-hal yang berkaitan dengan pengendalian banjir. Hal ini dilatarbelakangi oleh dua hal, yaitu : pertama, program pengendalian banjir dikhawatirkan akan menggusur tempat tinggal mereka. Perlu diketahui bahwa banyak warga yang telah mendiami wilayah itu selama bertahun-tahun dan hingga saat ini mereka tidak bersedia pindah dilokasi permukiman yang bentuk dan suasananya asing dari tempat kediamannya sekarang. Kedua, janji-janji pemerintah untuk membenahi bantaran sungai Ciliwung tidak pernah terwujud. Kekecewaan warga kepada pemerintah, timbul karena pada satu sisi menakuti warga dengan rencana-rencana penggusuran. Di sisi lain masyarakat bantaran sungai Ciliwung sering diberikan janji-janji kosong tentang pembenahan bantaran kali Ciliwung, seperti rencana pembangunan tembok sepanjang kali Ciliwung untuk menghindari pendangkalan dan rencana program penghijauan di sepanjang bantaran untuk menghindari penggerusan dinding sungai.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa rencana program relokasi masyarakat bantaran sungai Ciliwung berpengaruh negatif terhadap Ketahanan Wilayah di Provinsi DKI Jakarta. Berlandaskan pada pemikiran bahwa sikap skeptis dan antipati warga bantaran

terhadap rencana program relokasi yang menyebabkan terbengkalainya penanggulangan banjir di wilayah DKI Jakarta hingga menimbulkan kerugian harta benda bahkan nyawa. Hal ini memperlemah kondisi Ketahanan Wilayah di provinsi tersebut, khususnya berkaitan dengan aspek keamanan manusia. Dampak terhadap hal tersebut juga dapat meluas pada berbagai aspek kehidupan masyarakat DKI Jakarta, seperti ekonomi. Dengan adanya banjir yang seringkali melanda wilayah DKI Jakarta mengakibatkan tersendatnya mobilitas ekonomi yang membutuhkan sarana aktivitas transportasi darat. Karena fenomena banjir juga seringkali mengakibatkan terjadinya kemacetan lalu-lintas.

Untuk itu, dibutuhkan langkah persuasif yang tepat oleh pemerintah agar rencana program relokasi dapat diterima oleh masyarakat bantaran sungai Ciliwung. Hal ini bertujuan untuk memperkuat kondisi Ketahanan Wilayah DKI Jakarta.

#### **5.4. Penertiban Daerah Bantaran Sungai Dalam Rangka Normalisasi DAS Ciliwung**

Normalisasi sungai Ciliwung merupakan upaya yang bertujuan untuk mengembalikan fungsi sungai sebagai saluran air yang meliputi kegiatan penataan bantaran sungai. Proyek normalisasi sungai Ciliwung sebagai salah satu langkah pemerintah untuk menanggulangi banjir yang sering kali melanda wilayah DKI Jakarta. Pada dasarnya hal tersebut merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan Ketahanan Wilayah di provinsi tersebut, yang memfokuskan diri pada aspek keamanan. Dalam hal ini, keamanan manusia menjadi prioritas utama agar terhindar dari bahaya banjir. Apabila banjir dapat tertanggulangi dengan baik, maka akan banyak manfaat yang dapat diperoleh dari program normalisasi DAS Ciliwung. Manfaat tersebut antara lain dapat berupa penataan kembali tata ruang kota Jakarta secara tepat, kembalinya fungsi sungai untuk mencegah banjir, peningkatan kesejahteraan masyarakat bantaran sungai Ciliwung untuk memperoleh tempat hunian yang layak berupa Rusun. Namun demikian, masih banyak hambatan yang dihadapi untuk mewujudkan hal tersebut, diantaranya persoalan pembebasan lahan dan

anggaran yang terbatas. Berkaitan dengan hal tersebut, berikut ini proyeksi wawancara yang dilakukan oleh peneliti di kantor Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) dengan Kepala Seksi Sungai Dan Pantai Ibu Dina, sebagai berikut :

Bila melihat kondisi banjir di Jakarta Bu, bantaran Sungai Ciliwung yang banyak permukiman warga. Dari pemberitaan di Koran, di TV direncanakan akan mau direlokasi warganya. Jadi apakah mungkin benar bahwa program relokasi ini akan dilaksanakan bu ?

Jadi kita gini, kita akan melaksanakan rencana namanya program penataan kali ciliwung. Yang disebut Total Solution For Ciliwung, luasnya dari Manggarai ke arah Hulu sampai dengan tol tb simatupang, dimana tujuan kita adalah untuk menata kawasan kali ciliwung itu untuk mengembalikan kapasitas air sungai ciliwung dengan dibit yang kita rencanakan. Untuk mengembalikan kapasitas tersebut, perlu lebar sungai rencana sesuai dengan disain, dimana saat ini lebar exkipping dengan permukiman-permukiman penduduk itu antara 5 – 7 m sehingga jika kita ingin memperlebar sungai ciliwung itu sampai dengan 50 m, itu kita harus merelokasi penduduk yang mungkin bukan dikatakan tinggal di bantaran tapi sudah tinggal di badan kali.

Sudah bukan tinggal di bantaran ya bu, tapi di badan kali.

Iya di badan kali. Bisa dikatakan bahwa warga yang tinggal di Kampung Pulo bukan tinggal dibantaran kalinya, melainkan sudah tinggal di badan kali bukan di bantaran lagi. Tahap awal memang kita akan merelokasi masyarakat yang tinggal di daerah sudetan yaitu di kawasan kebon Baru dan Pengadegan. Itu kita, Tahap awal kita akan membebaskan lahan di situ sebagai sudetan itu di dua titik, kemudian akan dibayarkan ganti rugi baru akan merelokasi. Kemudian kita sebagai pihak balai atau pihak dibawah kementerian PU hanya melaksanakan konstruksinya. Dan semua ini hanya tinggal menunggu legalisasinya yaitu perpres, Saat ini kita hanya tinggal menunggu dasar hukumnya yaitu perpers tentang penataan kali ciliwung yang masih digodok di kementerian kesra. Dari 9 tahap total solution for ciliwung, relokasi menempati tahap ketiga.

Dari wawancara yang telah diproyeksikan diatas, dapat diketahui bahwa program relokasi kesungguhan pemerintah untuk melaksanakan program relokasi sebagai salah satu langkah yang terlingkup dalam *total solution for Ciliwung* untuk menanggulangi permasalahan banjir di wilayah DKI Jakarta. Adanya pemikiran baru yang inovatif tentang penentuan lokasi permukiman dengan memanfaatkan areal sudetan di sungai Ciliwung merupakan alternatif pemecahan masalah yang sekaligus sebagai solusi untuk menjawab keinginan masyarakat agar mereka di relokasi tidak jauh dari tempat permukiman awal

yaitu sekitar bantaran sungai Ciliwung. Disamping itu, dengan pembuatan sudetan sebagai lokasi pembangunan rumah susun untuk masyarakat bantaran sungai Ciliwung merupakan alternatif terbaik efisiensi penyediaan lahan untuk kepentingan umum. Hal ini sekaligus telah menjawab tuntutan masyarakat akan tempat hunian yang juga tidak terlalu jauh dari tempat kerja mereka. Sebagian besar masyarakat bantaran sungai Ciliwung bermata pencarian pada sektor informal di pasar Jatinegara.

Untuk itulah pemerintah merasa optimis akan keberhasilan terlaksananya program relokasi masyarakat bantaran sungai Ciliwung dalam rangka penertiban DAS untuk menanggulangi bahaya banjir yang dapat mengancam *human security* di wilayah DKI Jakarta.

MediaIndonesia.com dalam tulisan Christina Natalia (Kamis, 9 Oktober 2010) merekam wawancaranya dengan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane / BBWSCC, (Jakarta, Rabu 09/10) yang mengatakan bahwa :

“Proyek normalisasi sungai Ciliwung akan dilaksanakan, tapi kami masih terhambat masalah pembebasan lahan dan dana. Untuk tanah mana saja yang masih harus dibebaskan kami tunggu dari Pemerintah Provinsi DKI. Kami perlu lakukan pembebasan lahan karena banyak warga yang sudah bertahun-tahun menghuni area bantaran sungai bahkan area sungai itu sendiri. Padahal idealnya ada jarak antara bantaran sungai dengan areal permukiman. Proyek normalisasi Ciliwung akan dimulai pada Januari tahun depan dan ditargetkan selesai pada 2014 dengan alokasi dana sekitar Rp. 100 miliar. Dalam rancangan normalisasi, Kali Ciliwung yang berliku nantinya akan diluruskan, sisa lahan pelurusan digunakan untuk memperluas kali sehingga dapat menampung kapasitas air yang lebih besar”.

Proyek normalisasi dan revitalisasi sungai Ciliwung dilakukan setelah terbitnya Keputusan Presiden tentang *Total Solution for Ciliwung*. Dalam keputusan tersebut, terdapat Sembilan langkah yang akan dilaksanakan untuk menormalisasi dan merevitalisasi sungai Ciliwung, yaitu memukiman warga bantaran sungai, membangun rumah susun sederhana sewa (Rusunawa), memindahkan warga ke Rusunawa diiringi dengan pemberdayaan sosial, normalisasi sungai yang melintasi kawasan Bukit Duri dan Kampung Melayu, penambahan pintu air Manggarai, menaikkan tinggi jembatan di Kanal Banjir Barat (KBB), merevitalisasi kawasan Ciliwung lama yang melintas dari

Manggarai hingga Istiqlal, menghubungkan Ciliwung – Cipinang agar memiliki kapasitas daya tampung air sebesar 50 – 60 kubik perdetik dan konservasi.<sup>2</sup>

Solusi total untuk normalisasi dan revitalisasi sungai Ciliwung diperkirakan selesai pada 2014. Tahap awal pekerjaan dilakukan dengan membangun sodetan di kawasan Kebon Baru Tebet Jakarta Selatan. Sodetan itu akan ditimbun untuk dijadikan sebagai kawasan pembangunan Rusunawa bagi warga yang sebelumnya bermukim di bantaran sungai. Rusunawa tersebut akan dibangun oleh Kementerian Perumahan Rakyat, pembuatan sodetan dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum sedangkan pembebasan tanah menjadi tanggung jawab Pevrov DKI Jakarta.

Dengan demikian, terdapat dua hal penting dalam pelaksanaan Normalisasi Sungai Ciliwung, yaitu relokasi masyarakat bantaran sungai dan penertiban DAS. Kedua hal tersebut menjadi langkah utama yang harus dilaksanakan oleh pemerintah, untuk mengatasi permasalahan banjir di wilayah DKI Jakarta. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah telah menyediakan alokasi anggaran yang berasal dari bantuan Bank Dunia sebesar Rp. 100 miliar untuk normalisasi dan revitalisasi sungai Ciliwung, yang meliputi pembebasan lahan dan pembangunan fisik. MediaIndonesia.com dalam tulisan Dani Prasetya (kamis, 19 Agustus 2010) merekam wawancaranya dengan Direktur Sungai dan Pantai Kementerian Pekerjaan Umum, Pitoyo Subandrio (Jakarta, rabu 18/8) yang mengatakan bahwa :

“Saya sudah memegang Rp. 100 miliar. Nanti akan dibagi dua, Rp.60 miliar dipegang Gubernur untuk pembebasan lahan, sisanya Rp.40 miliar akan dipakai PU untuk uang muka membuat sodetan”.<sup>3</sup>

Dengan demikian, dapat kita ketahui bahwa sebenarnya langkah normalisasi sungai Ciliwung sudah dapat dilakukan. Namun kondisi dilapangan sangat

---

<sup>2</sup> <http://www.mediaindonesia.com/read/2010/10/09/174025/38/5/-Normalisasi-Ciliwung-Cisadanc-Terhambat-Pembebasan-Lahan>

<sup>3</sup> <http://www.mediaindonesia.com/rcad/2010/08/19/163076/38/5/Pemerintah-Sediakan-Rp100-Miliar-untuk-Normalisasi-Ciliwung->

berbeda dengan rencana pemerintah yang ingin merelokasi masyarakat bantaran berkaitan dengan penertiban DAS untuk normalisasi sungai Ciliwung.

Rencana penertiban DAS Ciliwung dari permukiman penduduk yang terdapat dibantaran sungai tersebut, dinilai tidak efektif, bila tidak diikuti oleh penegakan hukum yang tegas oleh Pemerintah. Untuk itu pemerintah perlu menyiapkan program penataan bantaran sungai Ciliwung secara detail sebelum melakukan relokasi masyarakat yang tinggal dilokasi tersebut. Hal ini diungkapkan oleh pengamat tata kota dari tata ruang dari Universitas Indonesia, Untung Widodo pada hari Selasa, 12 Januari 2010 (Warta Kota, 14 Januari 2010), sebagai berikut :

“Rencana penertiban bantaran sungai Ciliwung rawan penyimpangan. Biasanya setelah dipindahkan ke lokasi baru, warga akan berupaya kembali lagi karena mereka sudah biasa tinggal di bantaran kali, makan, minum, bekerja dan berkeluarga di sana. Setelah ditertibkan dan direlokasi, harus ada penegakan hukum yang tegas agar tidak ada yang kembali ke bantaran”.

Upaya penertiban sungai Ciliwung terkait dengan program pengerukan dan penataan 13 sungai di Jakarta mendapat bantuan dana luar negeri. Untuk melancarkan program tersebut, Kementerian Koordinator Kesra pun akan turun tangan untuk membantu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menertibkan hunian di bantaran Sungai Ciliwung. Dalam hal ini, penerapan hukum / Peraturan dan Perundang-undangan sangat diperlukan. Berkaitan dengan hal tersebut, beliau berpendapat bahwa :

“Penertiban dengan cara merelokasi warga bantaran kali Ciliwung tidak memberi pendidikan hukum yang baik bagi masyarakat, sebab warga biasa menilai mereka dapat saja melanggar aturan untuk mendapatkan tempat tinggal di Jakarta misalnya dengan menempati bantaran kali. Toh mereka akan mendapatkan tempat tinggal seperti Rumah Susun Sewa (Rusunawa) seperti yang dijanjikan pemerintah. Namun setelah diberikan ternyata yang tinggal di Rusunawa ya bukan mereka itu. Jadi kebijakan relokasi itu rawan penyimpangan, sementara mereka yang patuh aturan tidak mendapatkan akses mendapat rumah murah yang layak”.

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta William Amadeus Yani, menyatakan bahwa :

“Sebaiknya dilakukan audit terhadap permukiman masyarakat di tempat terlarang. Perlu pendekatan secara manusiawi, tapi jangan sampai masyarakat harus melanggar aturan untuk mendapatkan fasilitas tempat tinggal. Itu akan menimbulkan masalah baru”.

Disamping itu, DPD DKI Jakarta mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk segera menertibkan permukiman liar yang ada di bantaran sungai Ciliwung. Keberadaan permukiman liar yang ada di bantaran sungai tersebut dinilai membahayakan penghuninya dan pemicu banjir. Anggota DPD DKI Jakarta Djan Faridz, mengatakan :

“Normalisasi sungai Ciliwung menjadi tidak efektif karena Pemprov DKI masih membiarkan permukiman liar bercokol di bantaran kali tersebut. Menurutnya permukiman liar termasuk penyumbang sampah domestic yang bisa mengakibatkan aliran air terhambat. Karena itu, Pemprov harus segera menertibkan permukiman liar di sekitar sungai sebelum melaksanakan proyek pengerukan 13 sungai di Jakarta. Paling lambat pada tahun 2012, sungai Ciliwung harus bersih dari permukiman liar. Ini tidak bisa ditawar-tawar lagi kalau normalisasi sungai mau berhasil (disampaikan sesuai melakukan pertemuan dengan Bappeda DKI yang membahas rancangan Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) di Balai Kota. Sosialisasi penertiban bantaran sungai Ciliwung harus segera dilakukan agar masyarakat dapat mengetahuinya. Sosialisasi dilakukan sebagai upaya persuasif untuk menghindari bentrokan dengan warga. Selain itu warga harus dilibatkan untuk membersihkan sungai. Sebab saat ini di bantaran sungai Ciliwung sudah terjadi pendangkalan akibat limbah rumah tangga yang langsung dibuang ke sungai = bagaimana mau mengatasi banjir kalau permukiman dan sampah di sungai tidak dikeruk dan dibersihkan (23/6/2010 sumber : Republika 24/6/2010)”.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo memberikan tanggapan sebagai berikut :

“Saya kira, mari kita sama-sama melihat kondisi objektif di lapangan dengan realistis. Kalau bisa saya setuju-setuju saja. Kita kan tidak boleh menggunakan cara-cara lama”. Tentunya kita sepakat untuk melaksanakan penertiban dengan cara-cara yang lebih harmonis, yang penting lagi perlu ada perhitungan mau ditampung dimana setelah penertiban”.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) DKI Jakarta, Peni Susanti menyebutkan saat ini di sepanjang sungai Ciliwung terdapat 109 titik tumpukan sampah. Titik tumpukan sampah tersebut tersebar

di 75 Kelurahan di sepanjang sungai Ciliwung. Sebagian dari titik-titik tumpukan sampah yang tersebar itu tidak bisa diakses oleh truck-truck pengangkut sampah sehingga sulit untuk ditangani. Pada 2010 ini, sebanyak 12 titik sampah dari total 109 yang ada sudah bisa ditangani. Artinya, masih terdapat 97 titik yang belum tertangani dengan baik. Kedepan kita akan terus melakukan penanganan hingga titik-titik dampak tersebut hilang dari Ciliwung. Terkait kebijakan untuk penertiban permukiman sekitar 5.000 Kepala Keluarga yang berada di sepanjang sungai yang akan dinormalisasi, Kepala Bappeda DKI, Sarwo Handayani, mengatakan bahwa :

“Pihaknya akan menerapkan mekanisme Resettlement Policy Framework (RPF), yaitu akan disiapkan permukiman baru bagi warga pemilik KTP DKI atau pemberian dana kerohiman bagi mereka yang ditertibkan. Mereka yang tidak memiliki KTP DKI akan ditawarkan untuk kembali ke kampung halamannya”.

Normalisasi sungai Ciliwung merupakan upaya yang bertujuan untuk mengembalikan fungsi sungai sebagai saluran air yang meliputi kegiatan penataan bantaran sungai. Proyek normalisasi sungai Ciliwung sebagai salah satu langkah pemerintah untuk menanggulangi banjir yang sering kali melanda wilayah DKI Jakarta.

## BAB 6

### PENUTUP

#### 6.1. Kesimpulan

Ada beberapa hal yang dapat disimpulkan sebagai temuan dalam penelitian ini, yaitu :

- a. Penertiban DAS adalah langkah yang harus dilaksanakan dalam rangka normalisasi sungai Ciliwung, yang bertujuan untuk mengembalikan fungsi sungai sebagai saluran air yang meliputi kegiatan penataan bantaran sungai. Proyek normalisasi sungai Ciliwung sebagai salah satu langkah pemerintah untuk menanggulangi banjir, juga mengharuskan dilaksanakannya langkah penertiban permukiman dan relokasi masyarakat bantaran sungai tersebut. Rencana program relokasi masyarakat bantaran sungai Ciliwung sampai dengan saat ini masih belum terlaksana dengan baik.
- b. Program relokasi masyarakat yang bermukim di bantaran sungai Ciliwung, pada dasarnya memiliki tujuan untuk menghindarkan masyarakat Jakarta dari bahaya banjir yang dapat menyebabkan korban jiwa. Dalam hal ini, aspek keamanan manusia dari lingkungan yang berbahaya merupakan upaya untuk meningkatkan Ketahanan Wilayah di provinsi tersebut, yang memfokuskan diri pada aspek keamanan.
- c. Program relokasi masyarakat bantaran sungai Ciliwung ke Rusun sepertinya merupakan kebijakan yang pro rakyat. Namun warga masyarakat yang bermukim di bantaran sungai Ciliwung ternyata tidak begitu tertarik mendengar hal-hal yang berkaitan dengan pengendalian banjir. Hal ini dilatarbelakangi oleh dua hal, yaitu : pertama, program pengendalian banjir dikhawatirkan akan menggusur tempat tinggal mereka. Perlu diketahui bahwa banyak warga yang telah mendiami wilayah itu selama bertahun-tahun dan hingga saat ini mereka tidak

bersedia pindah dilokasi permukiman yang bentuk dan suasananya asing dari tempat kediamannya sekarang. Kedua, janji-janji pemerintah untuk membenahi bantaran sungai Ciliwung tidak pernah terwujud. Kekecewaan warga kepada pemerintah, timbul karena pada satu sisi menakuti warga dengan rencana-rencana penggusuran. Di sisi lain masyarakat bantaran sungai Ciliwung sering diberikan janji-janji kosong tentang pembenahan bantaran kali Ciliwung, seperti rencana pembangunan tembok sepanjang kali Ciliwung untuk menghindari pendangkalan dan rencana program penghijauan di sepanjang bantaran untuk menghindari penggerusan dinding sungai.

- d. Daerah bantaran sungai Ciliwung tidak pernah lepas dari masalah banjir, selama bertahun-tahun masyarakatnya hidup dengan kondisi demikian. Telah menjadi sesuatu yang dimaklumi oleh warga bantaran sungai tersebut, apabila banjir datang melanda permukiman mereka hingga menimbulkan berbagai kesulitan. Di sisi lain pemerintah berpandangan bahwa hal itu dikarenakan oleh andil warga yang tidak memperhatikan dan memelihara lingkungan dengan baik. Contohnya dengan mendirikan bangunan sebagai tempat bermukim di bantaran bahkan di badan sungai. Hal ini sangat berbahaya, bukan saja akan menimbulkan ancaman terhadap keselamatan jiwa manusia yang bermukim di lokasi tersebut tetapi juga sebagai penyebab banjir yang efeknya meluas dirasakan oleh masyarakat Jakarta secara umum.
- e. Masyarakat bantaran sungai Ciliwung, pada umumnya berprinsip bahwa lokasi permukiman yang saat ini ditempati sudah menjadi lingkungan yang sangat erat dan sulit dipisahkan dengan kehidupan mereka. Banjir yang seringkali melanda permukiman mereka adalah hal wajar yang biasa mereka alami. Adanya upaya pemerintah dalam hal penanggulangan banjir dengan melakukan penertiban DAS yang mengharuskan masyarakat bantaran sungai Ciliwung untuk direlokasi, dianggap sebagai ancaman oleh warga bantaran. Ditambah lagi dengan seringnya pemerintah memberikan janji-janji kepada masyarakat dalam

hal mengatasi permasalahan Ciliwung, membuat mereka menjadi skeptis bahkan antipati terhadap berbagai program pemerintah menyangkut normalisasi sungai.

- f. Kondisi inilah yang menjadi penyebab belum terlaksananya kegiatan normalisasi sungai Ciliwung yang didalamnya terdapat rencana program relokasi dalam rangka penertiban DAS. Bila hal ini dibiarkan terus-menerus terjadi tanpa ada penyelesaian yang tepat dari pemerintah, maka dapat dipastikan banjir akan terus melanda DKI Jakarta. Kondisi ini berpotensi menjadi ancaman terhadap keamanan manusia dari lingkungan yang berbahaya. Karena faktor keamanan manusia merupakan bagian dari aspek kehidupan yang terlingkup dalam Ketahanan Wilayah, maka respons negatif masyarakat bantaran terhadap rencana relokasi akan berimplikasi negatif terhadap Ketahanan Wilayah di Provinsi DKI Jakarta.

### 6.1. Saran

Berdasarkan pada temuan yang diperoleh dari penelitian ini, maka terdapat beberapa saran yang dapat dikemukakan, yaitu :

- a. Apabila banjir dapat tertanggulangi dengan baik, maka akan banyak manfaat yang dapat diperoleh dari program normalisasi DAS Ciliwung. Manfaat tersebut antara lain dapat berupa penataan kembali tata ruang kota Jakarta secara tepat, kembalinya fungsi sungai untuk mencegah banjir, peningkatan kesejahteraan masyarakat bantaran sungai Ciliwung melalui program relokasi untuk memperoleh tempat hunian yang layak berupa Rusun. Keamanan manusia menjadi prioritas utama agar terhindar dari bahaya banjir. Agar hal tersebut dapat terlaksana, maka diperlukan adanya sinergi antar institusi pemerintahan seperti PU, Kesra, Depsos dll, dengan mengikut-sertakan masyarakat bantaran sungai Ciliwung supaya memiliki kesadaran akan pentingnya hal tersebut.

- b. Terdapat dua hal penting dalam pelaksanaan Normalisasi Sungai Ciliwung, yaitu relokasi masyarakat bantaran sungai dan penertiban DAS. Kedua hal tersebut menjadi langkah utama yang harus dilaksanakan oleh pemerintah, untuk mengatasi permasalahan banjir di wilayah DKI Jakarta.
- c. Berkaitan dengan rencana program relokasi masyarakat bantaran sungai Ciliwung, terlebih dahulu pemerintah perlu melakukan sosialisasi yang dapat dilaksanakan oleh Pemprov. DKI Jakarta beserta Kementerian terkait yang berkompeten terhadap program tersebut. Hal ini bertujuan untuk menetralsir pandangan skeptis masyarakat bantaran sungai Ciliwung yang merasa terancam dengan adanya rencana program relokasi.
- d. Salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah untuk mengimplementasikan rencana program relokasi adalah mental penghuni Rusun untuk memasuki kultur yang baru dan belum pernah dirasakan sebelumnya oleh masyarakat bantaran sungai Ciliwung. Bagi warga yang harus relokasi perlu mendapatkan bimbingan pra-konstruksi dan pasca-konstruksi. Hal ini sangat penting untuk menghindari cultural shock (gegar budaya) bagi masyarakat bantaran sungai yang akan direlokasi.
- e. Pemerintah sudah seharusnya memiliki kesadaran bahwa upaya normalisasi sungai Ciliwung untuk menanggulangi banjir di wilayah DKI Jakarta, tidak dapat berdiri sendiri namun membutuhkan partisipasi dari seluruh pihak. Untuk itulah perlunya rencana komprehensif untuk penanggulangan banjir. Hal tersebut telah dituangkan dalam *Total Solution for Ciliwung*, yang akan dijadikan sebagai pedoman bagi pemerintah dalam mengatasi banjir. Tentunya hal tersebut akan terlaksana dengan baik melalui partisipasi masyarakat bantaran sungai Ciliwung.
- f. Penyelesaian banjir di wilayah DKI Jakarta sering kali dilakukan secara parsial-sektoral dan reaktif. Mempertimbangkan persoalan banjir

dengan mengetahui keterkaitan antar banyak faktor, antara lain kondisi geografis cekungan Jakarta, pemadatan tanah akibat pembangunan infrastruktur dan pemukiman, eksploitasi berlebihan air tanah dalam, pencemaran air diseluruh badan sungai serta pemukiman penduduk disepanjang bantaran sungai Ciliwung, mengharuskan kita berfikir kembali dengan pola yang lebih komprehensif. Persoalan ini tidak bisa diselesaikan dengan hanya mengandalkan satu pihak saja seperti Pemda DKI, pihak swasta, pihak masyarakat termasuk lembaga swadaya masyarakat saja, melainkan harus ditanggulangi secara bersamaan dengan memperhatikan berbagai aspek kehidupan.



## DAFTAR REFERENSI

### Buku

- An'amta Djamhari. 1994. *Peranserta Industri Dalam Program Kali Bersih Di DAS Ciliwung DKI Jakarta*. Program Pascasarjana UI.
- Andy Rizal Umbara. (2003) *Kajian Relokasi Pemukiman Kumuh Nelayan Ke Rumah Susun Kedaung Kelurahan Sukamaju*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Armaidly Armawi. *Ketahanan Nasional Dan Pengembangannya*. Jurnal Panca Arga, edisi 2/Tahun 1. 2000.
- Anto Dajan. 1996. *Pengantar Statistik II*. LP3ES. Jakarta.
- Edison R. (2006). *Konflik Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dan Pengaruhnya Terhadap Ketahanan Daerah*. PKN UI.
- Kusnanto Anggoro. (2002). *Perumusan Kembali Keamanan Nasional : definisi, lingkup, perspektif*. Bahan diskusi Focus FGroup Discussion, WGD-SR ProPatria. Indonesian Working Group on Security Sector Reform-ProPatria.
- Kuswartojo, Tjuk dan Suparti Amir Salim. (1997). *Perumahan dan Pemukiman Yang Berwawasan Lingkungan*. Direktorat Jenderal pendidikan Dan Kebudayaan Jakarta.
- Koesnadi Hardjosoemantri. (2001). *Hukum Dan Lingkungan Hidup Di Indonesia*. Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta.
- M. Mochtar. 1999. *Pengantar Metodologi Penelitian Jilid . IIP Press*. Jakarta.
- Philipus M. Hadjon. (1993). *Pengantar Hukum Perizinan*. Yuridika. Surabaya.
- Petunjuk Perencanaan Kawasan Perumahan Kota Departemen Pekerjaan Umum Republik Indonesia, Tahun 1987 Jakarta.
- Ridlo. (2001). Mohamad Agung. *Kemiskinan di Perkotaan*. Penerbit Unissula Press. Semarang.

- R.M. Sunardi. (2004). *Pembinaan Ketahanan Bangsa Dalam Rangka Memperkokoh Keutuhan Negara Kesatuan RI*. PT. Kuatemita Adidarma. Jakarta
- Sekjen Dewan Ketahanan Nasional. (2010). *Keamanan Nasional, Sebuah Konsep dan Sistem Keamanan bagi bangsa Indonesia*. Jakarta.
- Soemarno Soedarsono.(1997). *Ketahanan Pribadi dan Keluarga Sebagai Tumpuan Ketahanan Nasional*. Intermasa. Jakarta
- Sugiyono. 2004. *Metode Penelitian Bisnis*. IKAPI. Jakarta
- Supranto. 1990. *Pengantar Ilmu Statistik*. Citra Umbara. Bandung.
- Sugiarto Wirjosiswojo. (1993). *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pola Permukiman Penduduk Di Daerah Alur Sungai (Studi Kasus Ciliwung)*. Magister Ilmu Lingkungan Pascasarjana UI. Jakarta.
- Syafruddin Apidiani. (2002) *Program Relokasi Penduduk Tepian Sungai Karang Mumus Kota Samarinda*. FISIP UI. Jakarta.
- Taqyuddin, *Pengelolaan Sumberdaya Air Di Daerah Aliran Sungai Ciliwung*. Magister Humaniora Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya. Universitas Indonesia. 2004.
- Ujiyanto Singgih Prayitno. (2004). *Modal Sosial Dan Ketahanan Ekonomi Keluarga Miskin (Studi Sosiologi Pada Komunitas Bantaran Sungai Ciliwung)*. Jakarta.
- Wan Usman, dkk. (2003). *Daya Tahan Bangsa (Program Studi Pengkajian Ketahanan Nasional Program Pascasarjana Universitas Indonesia)*. Jakarta.
- Yudohusodo, Siswono. Et, al. (1991). *Rumah Untuk Seluruh Rakyat*. Yayasan Padamu Negeri. Jakarta.

## Tesis

- Andy Rizal Umbara. 2003. *Kajian Relokasi Pemukiman Kumuh Nelayan Ke Rumah Susun Kedaung Kelurahan Sukamaju*. Tesis. Semarang: Universitas Diponegoro

Erman Rajagukguk dan Ridwan Khairandy. 2001. *Hukum dan Lingkungan Hidup di Indonesia (T. Gayus Lumbun : Peran Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup)*. Tesis. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Koesnadi Hardjosoemantri. 2001. *Hukum Dan Lingkungan Hidup Di Indonesia*. Tesis. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Sugiarto Wirjosiswojo. 1993. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pola Permukiman Penduduk Di Daerah Alur Sungai (Studi Kasus Ciliwung)*. Tesis. Jakarta: Magister Ilmu Lingkungan Pascasarjana Universitas Indonesia

Ansori. 2007. *Penambangan Pasir Di Wilayah Kepulauan Riau Dan Dampaknya Pada Ketahanan Wilayah*. Tesis. Jakarta: PKN Universitas Indonesia

Edison R. 2006. *Konflik Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dan Pengaruhnya Terhadap Ketahanan Daerah*. Tesis. Jakarta: PKN UI.

An'amta Djamhari. 1994. *Peranserta Industri Dalam Program Kali Bersih Di DAS Ciliwung DKI Jakarta*. Tesis. Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia.

### **Peraturan dan Perundang-undangan**

Kepres No.32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung

Perda DKI Jakarta No.1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2007-2012.

### **Materi Kuliah**

Amirsyah Sahil. 2008. *Metodologi Penelitian : Instrumen Penelitian, Validitas Butir, Reliabilitas Butir*. Materi Perkuliahan. PKN Universitas Indonesia

## Sumber Internet

Aditya Muharram dan Willy Aditya. *Human Security*.  
<http://bellaciaolaliberta.blogspot.com/2010/02/human-security.html> (Diunduh  
14 Februari 2010)

Edy Prasetyono. 2003. *Human Security*. Laporan Ketua Departemen Hubungan  
Internasional,  
[www.propatria.or.id/download/Paper%20Diskusi/human\\_security\\_ep.pdf](http://www.propatria.or.id/download/Paper%20Diskusi/human_security_ep.pdf).  
(Diunduh Februari 2010)

Kristiadi. 2003. *National Security, Human Security, HAM dan Demokrasi*.  
[http://www.propatria.or.id/download/Paper%20Diskusi/human\\_security\\_dan\\_ham\\_jk.pdf](http://www.propatria.or.id/download/Paper%20Diskusi/human_security_dan_ham_jk.pdf). (Diunduh Februari 2010)

Pusat dan DKI Sepakat Relokasi. Penduduk Bantaran Ciliwung.  
<http://megapolitan.kompas.com/read/2010/01/11/2248540/> (Diunduh Senin, 11  
Januari 2010 | 22:48 WIB)

<http://bataviase.co.id/content/relokasi-dilakukan-secara-bermartabat>.

[http://www.propatria.or.id/download/Paper%20Diskusi/perumusan\\_kembali\\_kamnas\\_ka.pdf](http://www.propatria.or.id/download/Paper%20Diskusi/perumusan_kembali_kamnas_ka.pdf)

<http://suarapembaruan.com/News/2009/12/05/Jabotabe/jab02.htm> SP/Luther  
Ulang [Jakarta]

<http://megapolitan.kompas.com/read/2010/01/11/2248540/Pusat.dan.DKI.Sepakat.Relokasi.Penduduk.Bantaran.Ciliwung>.  
Senin, 11 Januari 2010 | 22:48  
WIB.

<http://bataviase.co.id/content/relokasi-dilakukan-secara-bermartabat>. (Diunduh  
Senin, 7 Desember 2009)





## UNIVERSITAS INDONESIA

### Data Responden

Nama : .....

Alamat : .....

.....

Jenis Kelamin : .....

Umur : .....

Pendidikan : .....

### Petunjuk Pengisian

Untuk menjawab pertanyaan kuesioner ini cukup dengan memberi tanda lingkaran ( O ) pada skor jawaban anda di kolom sebelah kanan yang mengandung arti sebagai berikut :

SS = Sangat Setuju (bobot skor 4)  
S = Setuju (bobot skor 3)  
TS = Tidak Setuju (bobot skor 2)  
STS = Sangat Tidak Setuju (bobot skor 1)

Contoh pengisian jawaban dari pertanyaan kuesioner, sebagai berikut :

NO	PERTANYAAN	SS	S	TS	STS
1.	Program relokasi merupakan salah satu kebijakan Pemerintah untuk mengatasi banjir tahunan.	4	3	2	1

Semua jawaban anda adalah benar, selama dijawab, tentunya dengan mempertimbangkan kenyataan yang anda alami selama ini.

Jakarta, .....

Responden

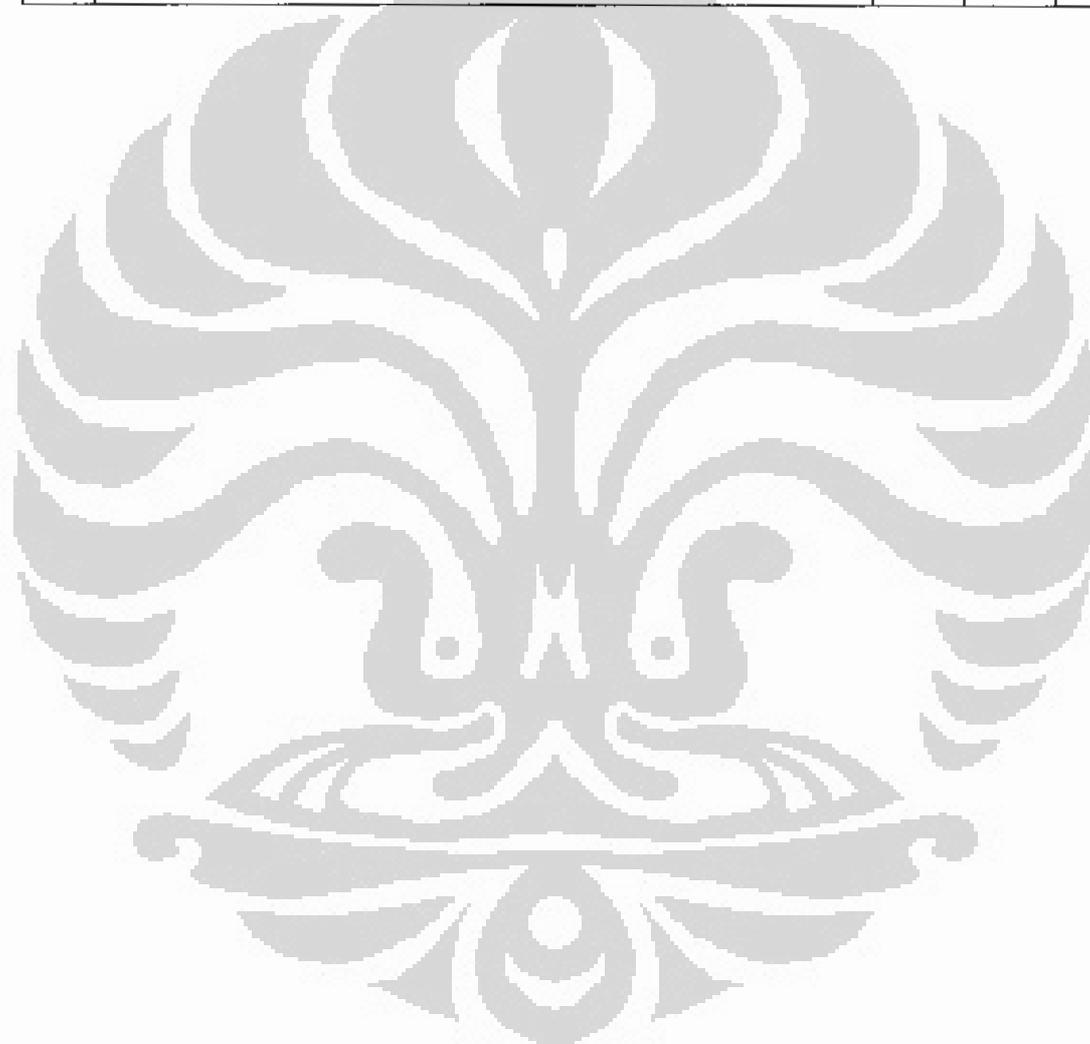
\_\_\_\_\_  
( Nama Jelas )

**Kuesioner 1 : Variabel Relokasi Masyarakat**

Berikan tanda lingkaran ( O ) pada skor jawaban anda di kolom sebelah kanan.

NO	PERNYATAAN	SS	S	TS	STS
1.	Saya menempati bangunan semi permanen di bantaran sungai Ciliwung.	4	3	2	1
2.	Saya menghuni bangunan petak dengan ukuran yang kecil.	4	3	2	1
3.	Kebutuhan akan tempat tinggal adalah alasan saya untuk mendirikan rumah di bantaran sungai Ciliwung.	4	3	2	1
4.	Bahaya banjir sering kali melanda permukiman yang saya tempati.	4	3	2	1
5.	Banjir bukan merupakan ancaman bahaya bagi saya warga bantaran Ciliwung, karena sering mengalaminya.	4	3	2	1
6.	Bila banjir datang, saya selalu mengungsi ke posko banjir yang disediakan oleh Kelurahan.	4	3	2	1
7.	Kadang-kadang saya suka membuang sampah ke kali Ciliwung.	4	3	2	1
8.	Kali Ciliwung pun sering kali saya gunakan untuk tempat pembuangan limbah rumah tangga.	4	3	2	1
9.	Saya keberatan untuk tinggal di rumah susun, karena harus membayar biaya sewa.	4	3	2	1
10.	Saya akan tinggal di rumah susun karena terlihat moderen.	4	3	2	1
11.	Saya ingin lokasi permukiman yang baru, letaknya tidak jauh dari tempat ini.	4	3	2	1
12.	Saya menghendaki lokasi permukiman yang mudah menjangkau pasar.	4	3	2	1
13.	Fasilitas rumah susun pasti akan lebih lengkap dari permukiman yang saya tempati sekarang.	4	3	2	1
14.	Belum tentu fasilitas permukiman yang akan saya tempati akan lebih baik dari permukiman yang saat ini kami huni.	4	3	2	1
15.	Saya ingin lingkungan yang sehat di tempat permukiman yang baru.	4	3	2	1
16.	Terhindar dari bahaya banjir merupakan keinginan saya dengan tinggal di rumah susun.	4	3	2	1
17.	Saya tidak ingin terus-menerus dihantui oleh ancaman banjir yang dapat merenggut korban jiwa.	4	3	2	1
18.	Lokasi permukiman yang baru, saya yakin sesuai dengan rencana tata ruang kota Jakarta.	4	3	2	1
19.	Saya ingin permukiman yang akan ditempati nanti tidak akan lagi harus mengalami ancaman pemindahan.	4	3	2	1
20.	Lokasi yang akan dibangun sebagai tempat permukiman baru untuk kepentingan umum.	4	3	2	1

NO	PERNYATAAN	SS	S	TS	STS
21.	Saya tahu Lokasi yang disiapkan untuk kepentingan umum seperti rumah susun untuk masyarakat bantaran Ciliwung.	4	3	2	1
22.	Saya menyadari bahwa rumah susun yang akan ditempati adalah sarana kepentingan umum yang harus dipergunakan dengan sebaik-baiknya.	4	3	2	1
23.	Keinginan saya untuk tetap tinggal di wilayah bantaran sungai Ciliwung, karena permukiman baru tidak sesuai dengan kebutuhan hidup saya.	4	3	2	1
24.	Dengan adanya penertiban di bantaran Ciliwung, saya tidak akan rela bila rumah yang saya huni dibongkar tanpa ada ganti rugi yang sesuai.	4	3	2	1

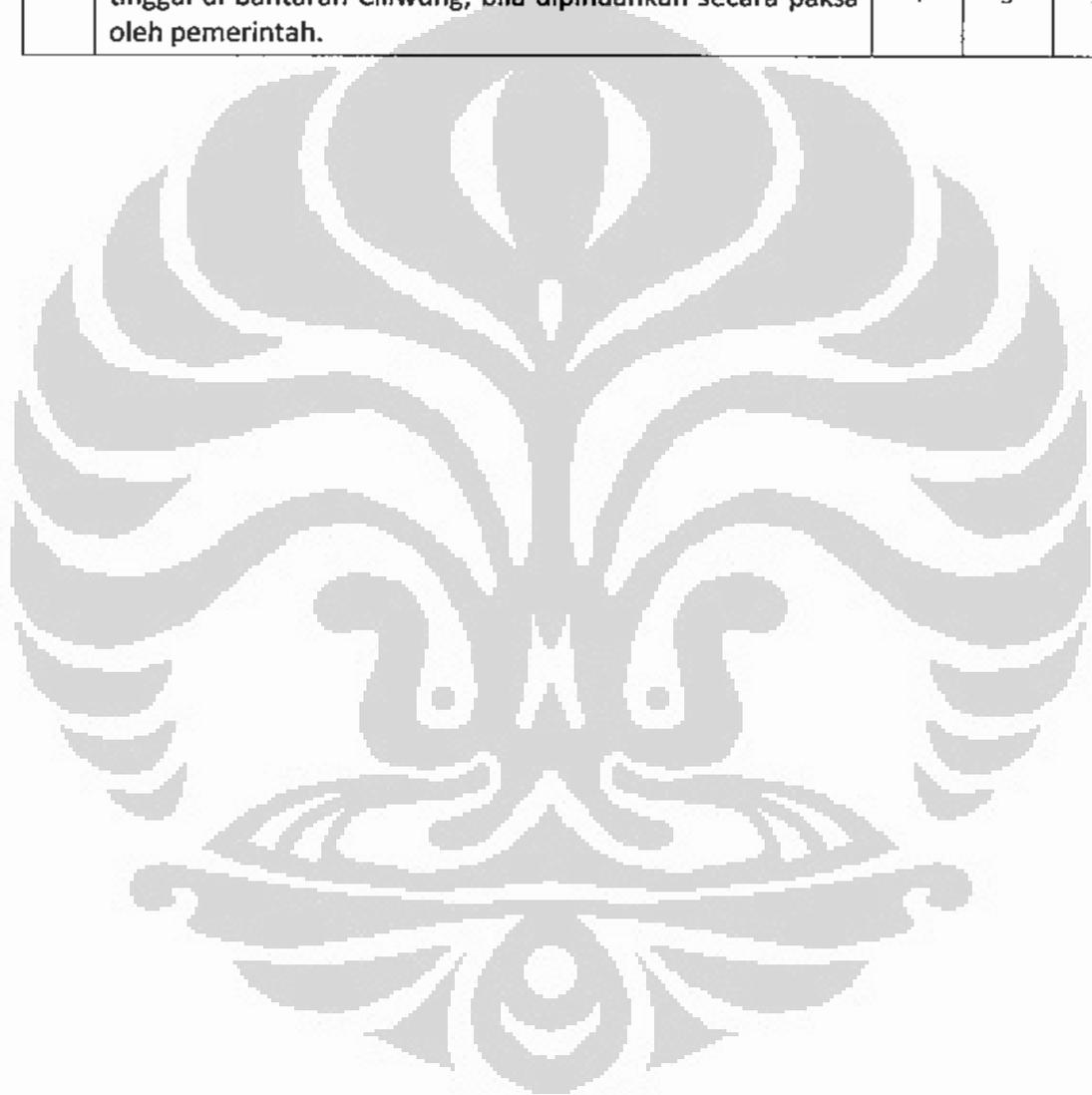


**Kuesioner 2 : Variabel Taat Hukum**

Berikan tanda lingkaran ( O ) pada skor jawaban anda di kolom sebelah kanan.

NO	PERTANYAAN	SS	S	TS	STS
1.	Saya mengetahui bahwa menempati bangunan di pinggir kali Ciliwung sangat berbahaya.	4	3	2	1
2.	Saya merasa lingkungan permukiman di bantaran kali Ciliwung sudah tidak sehat karena kumuh.	4	3	2	1
3.	Saya tinggal di lingkungan permukiman yang masih belum tertata rapih.	4	3	2	1
4.	Karena bangunan tempat tinggal saya tidak permanen, jadi saya tidak memiliki surat izin bangunan.	4	3	2	1
5.	Saya pernah mengurus perizinan tinggal di bantaran sungai Ciliwung.	4	3	2	1
6.	Bila penertiban DAS Ciliwung dianggap dapat mengatasi banjir, saya akan mentaatinya.	4	3	2	1
7.	Saya ikut dalam kegiatan-kegiatan perbaikan kali Ciliwung bersama warga yang lain.	4	3	2	1
8.	Saya bersedia untuk mentaati aturan penertiban DAS Ciliwung bila mendapatkan penggantian aset yang wajar.	4	3	2	1
9.	Sebaiknya kompensasi penggantian aset tanah dan bangunan disesuaikan dengan harga pasar.	4	3	2	1
10.	Bagi masyarakat yang tidak memiliki kelengkapan surat penting tanah dan bangunan, hendaknya diberikan dana kerohiman.	4	3	2	1
11.	Saya ingin bantuan dana kerohiman diberikan agar kami dapat mengikuti kemauan pemerintah untuk direlokasi.	4	3	2	1
12.	Saya sering menggunakan fasilitas MCK umum di bantaran sungai Ciliwung dan saya pun bertanggung jawab untuk menjaga kebersihannya.	4	3	2	1
13.	Saya juga sering menggunakan pompa air milik bersama di lingkungan bantaran Ciliwung.	4	3	2	1
14.	Bila banjir datang, saya dan keluarga segera mengungsi ke pos penanggulangan banjir untuk wilayah Kelurahan kami.	4	3	2	1
15.	Saya tidak ingin digusur, karena itu saya ikut melaksanakan setiap kegiatan yang diprogramkan oleh pemerintah untuk masyarakat bantaran sungai Ciliwung.	4	3	2	1
16.	Saya tidak menghendaki tindakan pemerintah melakukan penggusuran terhadap bangunan yang selama ini kami tempati.	4	3	2	1
17.	Saya tidak ingin mengalami pencabutan hak atas tanah jika tidak mentaati aturan penertiban DAS Ciliwung.	4	3	2	1

NO	PERNYATAAN	SS	S	TS	STS
18.	Menurut saya, pencabutan hak atas tanah adalah langkah terakhir yang dapat diambil oleh pemerintah.	4	3	2	1
19.	Saya ingin pemerintah melaksanakan kewajibannya dahulu untuk mewujudkan keinginan masyarakat Ciliwung, sebelum melakukan pencabutan hak atas tanah warga.	4	3	2	1
20.	Saya menentang upaya pemerintah untuk melakukan pemindahan secara paksa kepada masyarakat bantaran sungai Ciliwung.	4	3	2	1
21.	Saya tidak akan bersedia direlokasi karena sudah lama tinggal di bantaran Ciliwung, bila dipindahkan secara paksa oleh pemerintah.	4	3	2	1



### Kuesioner 3 : Variabel *Human Security*

Berikan tanda lingkaran ( O ) pada skor jawaban anda di kolom sebelah kanan.

NO	PERTANYAAN	SS	S	TS	STS
1.	Saya mengetahui bahwa bahaya banjir dapat menyebabkan ancaman keamanan lingkungan yang dapat membawa korban jiwa.	4	3	2	1
2.	Banjir yang sering kali saya alami merupakan akibat dari lingkungan bantaran kali yang tidak tertata dengan baik.	4	3	2	1
3.	Saya sering ikut bersama warga bantran Ciliwung untuk memberikan bantuan penanggulangan banjir.	4	3	2	1
4.	Saya sering mengikuti kegiatan Ciliwung Bersih yang dimotori oleh warga bantaran sungai Ciliwung.	4	3	2	1
5.	Saya mengharapkan upaya pemerintah memberikan perlindungan dari dampak kerusakan lingkungan sungai.	4	3	2	1
6.	Saya sudah tidak dapat lagi mencari ikan di kali Ciliwung, karena airnya sudah dipenuhi oleh limbah dan kotoran.	4	3	2	1
7.	Dahulu bantaran sungai Ciliwung yang saya tempati bersih dan airnya dapat digunakan untuk air minum.	4	3	2	1
8.	Sekarang saya sulit sekali mendapatkan pohon-pohon hijau di pinggir kali Ciliwung, karena sudah dijadikan sebagai tempat untuk mendirikan bangunan.	4	3	2	1
9.	Saya tidak mengharapkan upaya penertiban yang dilakukan oleh pemerintah dilaksanakan dengan jalan kekerasan.	4	3	2	1
10.	Masyarakat bantaran Ciliwung membutuhkan perlindungan dari kekerasan yang mungkin terjadi dalam penertiban daerah aliran sungai Ciliwung.	4	3	2	1
11.	Saya pernah diperingatkan untuk segera pindah dari permukiman di bantaran sungai Ciliwung.	4	3	2	1
12.	Saya khawatir terhadap upaya pemerintah untuk menanggulangi banjir justru akan membuat resah warga.	4	3	2	1
13.	Saya ingin terbebas dari rasa takut terhadap ancaman bahaya banjir.	4	3	2	1
14.	Saya ingin terbebas dari rasa takut, karena harus meninggalkan permukiman di bantaran Ciliwung ini.	4	3	2	1
15.	Saya mengetahui bahwa tinggal di rumah susun banyak sekali aturannya.	4	3	2	1
16.	Saya tidak sependapat bahwa rumah susun yang disiapkan untuk masyarakat bantaran Ciliwung merupakan jawaban yang tepat untuk merelokasi kami.	4	3	2	1
17.	Saya tahu bahwa Rumah adalah kebutuhan pokok manusia sebagai tempat tinggal dan berlindung.	4	3	2	1
18.	Saya membutuhkan rumah sebagai tempat tinggal yang layak untuk dihuni.	4	3	2	1
19.	Saya membangun rumah sebagai tempat berlindung untuk keluarga.	4	3	2	1
20.	Tempat hunian yang sehat, juga saya butuhkan untuk menjamin kesejahteraan hidup.	4	3	2	1
21.	Saya berobat ke Puskesmas, karena biaya pengobatan yang murah dapat saya peroleh disana.	4	3	2	1
22.	Saya juga membawa anak saya ke pos pelayanan kesehatan untuk balita (Posyandu) untuk memperoleh imunisasi.	4	3	2	1

## PANDUAN WAWANCARA

### A. Untuk Masyarakat / Tokoh Masyarakat Bantaran Ciliwung

#### 1. Domisili

- a. Apakah Bapak/Ibu/Saudara/i bermukim di wilayah bantaran sungai Ciliwung ini ?
- b. Apakah anda penduduk asli di wilayah ini ?
- c. Sudah berapa lamakah anda tinggal di bantaran sungai Ciliwung ?
- d. Sudahkah anda memperoleh KTP (Kartu Tanda Penduduk) sebagai bukti bahwa anda adalah anggota masyarakat di sini ?

#### 2. Lingkungan Hidup

- a. Apakah anda merasa bahwa lingkungan permukiman yang anda tempati pada saat ini, sudah sesuai dengan dapat memberikan kenyamanan ?
- b. Melihat kondisi lingkungan permukiman bantaran Sungai Ciliwung yang anda tempati, bahaya apakah yang sering dialami oleh masyarakat di lingkungan ini ?
- c. Alasan apa yang anda miliki hingga memilih untuk tetap tinggal di bantaran sungai Ciliwung ?
- d. Bahaya lingkungan apa yang sering dialami oleh masyarakat yang bermukim di bantaran sungai ini ?
- e. Melihat bantaran sungai Ciliwung yang banyak dipenuhi oleh sampah, apakah warga di kawasan ini sering membuang sampah di sungai tersebut ?
- f. Apabila kawasan ini akan ditertibkan oleh pemerintah untuk mewujudkan normalisasi sungai Ciliwung, apa yang akan anda lakukan ?
- g. Pemerintah berencana akan merelokasi masyarakat bantaran sungai Ciliwung ke rumah susun, apakah anda bersedia mengikuti program tersebut ?

#### 3. Permukiman

- a. Apakah lokasi permukiman yang anda tempati pada saat ini memberikan kenyamanan hidup ?
- b. Fasilitas apakah yang terdapat pada lingkungan permukiman yang anda tempati pada saat ini ?

- c. Apakah permukiman yang anda tempati sudah memiliki tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi ?
- d. Apakah lokasi permukiman anda yang terletak di bantaran Sungai Ciliwung sering mengalami banjir ?
- e. Mungkinkah padatnya permukiman di bantaran Ciliwung membuat aliran sungai menjadi tidak lancar hingga menyebabkan banjir ?
- f. Untuk mencegah bahaya banjir, apakah diperlukan lokasi permukiman baru bagi masyarakat bantaran Sungai Ciliwung ?
- g. Haruskah penentuan lokasi permukiman baru tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan letak yang tidak terlalu jauh dengan lokasi permukiman awal ?
- h. Apakah konsep permukiman seperti Rusun (Rumah Susun) dapat diterima oleh masyarakat bantaran Sungai Ciliwung ?

#### **4. Kebutuhan Hidup**

- a. Apakah Rusun sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat bantaran Ciliwung akan tempat tinggal yang terbebas dari bahaya banjir ?
- b. Dapatkah pembangunan RUsun yang letaknya tidak jauh dari lokasi permukiman awal masyarakat bantaran Ciliwung akan memperbesar minat masyarakat untuk bersedia direlokasi ?
- c. Apakah letak Rusun di lokasi yang tidak terlalu jauh dengan lokasi permukiman awal dapat memungkinkan masyarakat bantaran Ciliwung untuk tidak kehilangan mata pencaharian hidupnya ?

#### **5. Keamanan**

- a. Dengan program relokasi, apakah keamanan masyarakat bantaran Ciliwung agar terhindar dari bahaya banjir dapat terwujud ?
- b. Apakah terdapat gangguan keamanan di lingkungan anda berkaitan dengan rencana relokasi yang akan dilaksanakan ?
- c. Gangguan keamanan seperti apakah yang ada di lingkungan saudara ?
- d. Hal-hal apa sajakah yang telah dilakukan oleh pemerintah setempat dalam rangka mensosialisasikan rencana relokasi di lingkungan tempat tinggal anda ?
- e. Adakah unsur paksaan yang dilakukan pemerintah setempat berkaitan dengan rencana pelaksanaan program relokasi ?

## **B. Untuk Aparatur Negara / Pemerintah**

### **1. Kementerian Pekerjaan Umum (Dirjen Sumber Daya Air - Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung - Cisadane).**

- a. Untuk mengatasi bahaya banjir yang sering kali melanda wilayah DKI Jakarta hal-hal apa saja yang telah dilakukan oleh Pemerintah Pusat khususnya Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum yang diwakili oleh Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung - Cisadane ?
- b. Adakah rencana terpadu yang akan dilaksanakan untuk mengatasi bahaya banjir di wilayah DKI Jakarta ?
- c. Sejauhmanakah kegiatan yang sudah dilaksanakan menyangkut rencana penanggulangan bahaya banjir khususnya pada DAS (Daerah Aliran Sungai) Ciliwung di wilayah DKI Jakarta ?
- d. Bagaimanakah mekanisme pelaksanaan relokasi masyarakat bantaran Ciliwung yang bertujuan untuk melaksanakan normalisasi DAS dalam rangka upaya penanggulangan banjir di wilayah DKI Jakarta ?

### **2. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta**

- a. Apakah telah dilaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang rencana pembangunan Sodeban untuk lokasi Rusun sebagai tempat tinggal masyarakat bantaran Ciliwung yang akan direlokasi ?
- b. Kegiatan apa saja yang telah dilaksanakan dalam rangka sosialisasi rencana relokasi masyarakat bantaran Ciliwung ?
- c. Hal-hal apa yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan rencana program relokasi masyarakat bantaran Ciliwung agar terlaksananya normalisasi DAS untuk meminimalisir banjir di Jakarta ?



# **LAMPIRAN 2**

## **UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS PRA PENELITIAN**

## UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS

TABULASI JAWABAN RESPONDEN UNTUK KUESIONER  
VARIABEL RELOKASI MASYARAKAT (X1)

RESPONDEN	PERTANYAAN																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	3	4	3	4	4	2	3	4	4	3	3	2	3	4	1	3	3
2	4	2	3	4	3	2	3	3	4	4	2	4	2	4	2	4	3
3	4	4	3	3	4	2	3	4	3	4	4	2	4	3	1	3	4
4	3	4	4	4	4	2	4	3	4	3	3	2	4	4	2	4	3
5	4	3	3	4	3	2	3	4	4	3	4	2	3	4	2	3	4
6	4	1	3	4	3	2	3	3	4	4	2	4	2	4	2	4	3
7	3	4	3	4	4	2	4	4	3	4	3	1	4	3	1	3	4
8	3	4	4	3	4	2	4	3	4	3	3	1	3	4	2	4	3
9	4	3	3	4	4	2	3	4	3	4	4	2	4	3	1	3	4
10	3	4	4	3	4	2	4	3	4	3	4	1	3	4	2	4	3
11	4	4	3	4	3	2	3	4	4	3	4	2	3	4	2	3	4
12	4	2	3	4	3	2	3	3	4	4	2	4	2	4	2	4	3
13	3	4	3	4	4	2	4	4	3	4	3	1	4	3	1	3	4
14	3	4	4	3	4	2	4	3	4	3	3	1	3	4	2	4	3
15	4	3	3	4	4	2	3	4	3	4	4	2	4	3	1	3	4
16	3	3	4	3	4	2	4	3	4	3	4	1	3	4	2	4	3
17	4	4	3	4	3	2	3	4	4	3	4	2	3	4	2	3	4
18	3	4	4	3	4	2	4	3	4	3	3	1	3	4	2	4	3
19	4	3	3	4	4	2	3	4	3	4	4	2	4	3	1	3	4
20	3	4	4	3	4	2	4	3	4	3	4	1	3	4	2	4	3
21	4	4	3	4	3	2	3	4	4	3	4	2	4	4	2	3	4
22	4	1	3	4	3	2	3	3	4	4	2	4	2	4	2	4	3
23	3	4	3	4	4	2	4	4	3	4	3	1	4	3	1	3	4
24	3	3	4	3	4	2	4	3	4	3	3	1	3	4	2	4	3
25	3	4	4	3	4	2	4	3	4	3	3	1	3	4	2	4	3
26	4	4	3	4	3	2	3	4	4	3	4	2	3	4	2	3	4
27	4	2	3	4	3	2	3	3	4	4	2	4	2	4	2	4	3
28	3	4	3	4	4	2	4	4	3	4	3	1	4	3	1	3	4
29	3	3	4	3	4	2	4	3	4	3	3	1	3	4	2	4	3
30	4	3	4	4	4	2	3	4	3	4	4	2	4	3	1	4	4
TOTAL	105	100	101	110	110	60	104	105	111	104	98	57	96	111	50	106	104
MEAN	3.5	3.33	3.37	3.67	3.67	2	3.47	3.5	3.7	3.47	3.27	1.9	3.2	3.7	1.67	3.53	3.47

PERTANYAAN															
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
3	2	1	3	1	2	3	1	3	2	2	2	3	3	2	4
4	1	2	3	1	1	4	2	4	1	2	2	4	3	2	3
3	2	2	4	2	2	3	2	3	2	1	2	3	3	2	4
4	3	2	4	2	2	4	2	4	3	2	1	3	4	2	4
3	2	1	3	2	2	3	2	4	2	3	2	4	3	2	3
4	1	2	3	1	1	4	2	4	1	2	2	4	3	2	3
3	1	2	4	2	1	3	1	3	2	1	2	3	3	1	4
4	2	1	4	1	2	3	1	4	2	2	1	3	4	2	4
4	2	2	3	2	2	4	2	3	2	1	2	4	3	2	3
4	2	1	4	1	2	3	1	4	4	2	1	3	4	3	4
3	2	1	3	2	2	3	2	4	2	3	2	4	3	2	3
4	1	2	3	1	1	4	2	4	1	2	2	4	3	2	3
3	1	2	4	2	1	3	2	3	2	1	2	3	3	1	4
4	2	1	4	1	2	3	1	4	2	2	1	3	4	2	4
4	2	2	3	2	2	4	2	3	2	1	2	4	3	2	3
3	2	1	4	1	2	3	1	3	4	2	1	3	4	3	4
3	2	1	3	2	2	3	2	4	2	3	2	4	3	2	3
4	2	1	4	1	2	3	1	4	2	2	1	3	4	2	4
4	2	2	3	2	2	4	2	3	2	1	2	4	3	2	3
4	2	1	4	1	2	3	1	4	4	2	1	3	4	3	4
3	2	2	3	2	2	4	2	4	2	3	2	4	4	2	3
4	1	2	3	1	1	4	2	4	1	2	2	4	3	2	3
3	1	2	4	2	1	3	2	3	2	1	2	3	3	1	4
4	2	1	4	1	2	3	1	4	2	2	1	3	4	2	3
4	2	1	4	1	2	3	1	4	2	2	1	3	4	2	4
3	2	1	3	2	2	3	2	4	2	3	2	4	3	2	3
4	1	2	3	1	1	4	2	4	1	2	2	4	3	2	3
3	1	2	4	2	1	3	1	3	2	1	2	3	3	1	4
4	2	1	4	1	2	3	1	4	2	2	1	3	4	2	4
4	1	2	3	2	2	4	2	3	2	1	2	4	3	2	3
108	51	46	105	45	51	101	48	109	62	56	50	104	101	59	105
3.6	1.7	1.53	3.5	1.5	1.7	3.37	1.6	3.63	2.07	1.8667	1.67	3.47	3.37	1.97	3.5

## UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS

TABULASI JAWABAN RESPONDEN UNTUK KUESIONER  
VARIABEL TAAT HUKUM (X2)

RESPONDEN	PERTANYAAN																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	4	2	3	1	2	3	2	4	4	3	4	4	4	3	3	3	2
2	3	4	4	3	4	2	4	3	4	3	4	1	3	4	2	4	3
3	4	4	3	4	3	3	4	4	3	4	3	2	4	4	2	3	4
4	4	2	3	4	3	2	3	3	4	4	2	4	2	4	2	4	3
5	3	4	3	4	4	2	4	4	3	4	3	1	4	3	1	3	4
6	3	4	4	3	4	2	4	3	4	3	3	1	3	4	2	4	3
7	4	3	3	4	4	2	3	4	3	4	4	2	4	3	1	3	4
8	4	3	4	4	4	2	3	4	3	4	4	2	4	3	1	4	4
9	4	2	3	4	3	2	3	3	4	4	2	4	2	4	2	4	3
10	3	4	3	4	4	2	4	4	3	4	3	1	4	3	1	3	4
11	3	4	4	3	4	2	4	3	4	3	3	1	3	4	2	4	3
12	3	4	4	3	4	2	4	3	4	3	3	1	3	4	2	4	3
13	4	3	3	4	3	2	3	4	3	4	4	2	4	3	1	3	4
14	3	4	4	3	4	2	4	3	4	3	4	1	3	4	2	4	3
15	4	4	3	4	3	2	3	4	4	3	4	2	3	4	2	3	4
16	4	3	4	3	4	2	4	3	4	3	4	2	3	4	2	4	3
17	4	4	3	4	3	2	3	4	4	3	4	2	3	4	2	3	4
18	3	4	4	3	4	2	4	3	4	3	3	1	3	4	2	4	3
19	4	3	3	4	3	2	3	4	3	4	4	2	4	3	1	3	4
20	3	4	4	3	4	2	4	3	4	3	4	1	3	4	2	4	3
21	3	4	3	4	3	2	3	4	4	3	4	2	4	4	2	3	4
22	4	2	4	4	3	2	3	3	4	4	2	4	2	4	2	4	3
23	3	4	3	4	4	2	4	4	3	4	3	1	4	3	2	3	4
24	3	4	4	3	4	2	4	3	4	3	3	1	3	4	2	4	3
25	3	4	4	3	4	2	4	3	4	3	3	1	3	4	2	4	3
26	3	4	4	3	4	2	4	3	4	3	3	1	3	4	2	4	3
27	4	2	3	4	3	2	4	4	4	4	2	4	2	4	2	4	3
28	3	4	3	4	4	2	4	4	3	4	3	2	4	3	1	3	4
29	4	4	3	4	3	2	3	4	4	3	4	2	3	4	2	3	4
30	4	2	3	4	4	2	3	3	4	4	2	4	2	4	2	4	3
TOTAL	105	103	103	106	107	62	106	105	111	104	98	59	96	111	54	107	102
MEAN	3.5	3.43	3.43	3.53	3.57	2.07	3.53	3.5	3.7	3.68	3.27	1.97	3.2	3.7	1.8	3.57	3.4

PERTANYAAN									
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
4	2	3	3	4	4	4	2	1	4
4	2	1	4	1	2	3	1	4	4
3	2	1	4	2	2	4	2	4	2
4	1	2	3	1	1	4	2	4	1
3	1	2	4	2	1	3	2	3	2
4	2	1	4	1	2	3	1	4	2
4	2	2	3	2	2	4	2	3	2
4	2	2	3	2	2	4	2	3	2
4	1	2	3	1	1	4	2	4	1
3	1	2	4	2	1	3	2	3	2
4	2	1	4	1	2	3	1	4	2
4	2	2	4	1	3	4	2	4	2
4	2	2	3	2	2	4	2	3	3
4	2	2	4	1	2	3	2	4	4
3	2	1	3	2	2	3	2	4	3
3	2	2	4	2	2	3	2	3	4
3	2	1	3	2	2	3	2	4	2
4	2	2	4	1	3	4	2	4	2
4	2	2	3	2	2	4	2	3	2
4	2	1	4	1	2	3	1	4	4
3	2	2	3	2	2	4	2	4	2
4	1	2	3	1	2	4	2	4	2
3	2	2	4	2	2	3	2	3	4
4	2	1	4	2	2	3	2	4	2
4	2	1	4	2	2	3	1	4	4
4	2	1	4	1	2	3	1	4	2
4	2	2	3	2	1	4	2	4	3
3	1	2	4	2	2	3	1	3	4
3	2	1	3	2	2	3	2	4	3
4	1	2	3	2	2	4	2	4	4
110	53	50	106	51	59	104	53	108	80
3.67	1.77	1.67	3.53	1.7	1.97	3.47	1.77	3.6	2.67

## UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS

TABULASI JAWABAN RESPONDEN UNTUK KUESIONER  
VARIABEL *HUMAN SECURITY* (Y)

RESPONDEN	PERTANYAAN																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	4	3	4	3	3	1	2	4	1	3	4	4	2	3	4	2	3
2	3	4	3	4	4	2	1	3	2	4	3	4	1	3	3	1	4
3	3	3	3	4	4	2	2	3	2	3	3	4	2	4	4	1	4
4	4	4	3	3	4	2	1	4	2	3	3	3	1	4	4	2	4
5	3	4	4	3	4	1	2	4	1	3	3	4	2	3	4	2	3
6	4	3	3	3	3	2	1	3	1	4	3	4	1	4	4	1	3
7	4	4	3	4	3	1	2	3	2	3	4	3	2	3	4	2	4
8	4	3	4	3	3	1	2	4	1	3	4	4	2	3	4	2	3
9	4	3	4	3	3	1	2	4	1	3	4	4	2	3	4	2	3
10	3	4	3	4	4	2	1	3	2	4	3	4	1	3	3	1	4
11	3	3	3	4	4	2	2	3	2	3	3	4	2	4	4	1	4
12	4	4	3	3	4	2	1	4	2	3	3	3	1	4	4	2	4
13	3	4	4	3	4	1	2	4	1	3	3	4	2	3	4	2	3
14	4	3	3	3	3	2	1	3	1	4	3	4	1	4	4	1	3
15	4	4	3	4	3	1	2	3	2	3	4	3	2	3	4	2	4
16	4	3	4	3	3	1	2	4	1	3	4	4	2	3	4	2	3
17	4	4	3	3	4	2	1	4	2	3	3	3	1	4	4	2	4
18	3	4	4	3	4	1	2	4	1	3	3	4	2	3	4	2	3
19	4	3	4	3	3	1	2	4	1	3	4	4	2	3	4	2	3
20	3	4	3	4	4	2	1	3	2	4	3	4	1	3	3	1	4
21	3	3	3	4	4	2	2	3	2	3	3	4	2	4	4	1	4
22	4	2	4	4	3	2	3	3	4	4	2	4	2	4	2	4	3
23	4	4	3	3	4	2	1	4	2	3	3	3	1	4	4	2	4
24	3	4	4	3	4	1	2	4	1	3	3	4	2	3	4	2	3
25	3	3	3	4	4	2	2	3	2	3	3	4	2	4	4	1	4
26	3	4	4	3	4	2	4	3	4	3	3	1	3	4	2	4	3
27	4	2	3	4	3	2	4	4	4	4	2	4	2	4	2	4	3
28	3	4	3	4	4	2	4	4	3	4	3	2	4	3	1	3	4
29	3	4	4	3	4	1	2	4	1	3	3	4	2	3	4	2	3
30	4	3	3	3	3	2	1	3	1	4	3	4	1	4	4	1	3
TOTAL	106	104	102	102	108	48	57	106	54	99	95	109	53	104	108	57	104
MEAN	3.53	3.47	3.4	3.42	3.6	1.6	1.9	3.53	1.8	3.3	3.17	3.63	1.77	3.47	3.6	1.9	3.47

PERTANYAAN										Jmlh
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
2	3	1	1	4	3	3	3	4	3	77
1	4	2	2	3	3	4	3	3	4	78
2	4	2	1	4	4	3	4	4	3	82
2	4	2	1	3	4	4	3	3	3	80
2	3	2	1	4	3	4	3	4	3	79
3	4	2	1	3	4	4	3	3	4	78
2	3	1	1	3	3	4	4	3	3	78
2	3	1	1	4	3	3	3	4	3	77
2	3	1	1	4	3	3	3	4	3	77
1	4	2	2	3	3	4	3	3	4	78
2	4	2	1	4	4	3	4	4	3	82
2	4	2	1	3	4	4	3	3	3	80
2	3	2	1	4	3	4	3	4	3	79
3	4	2	1	3	4	4	3	3	4	78
2	3	1	1	3	3	4	4	3	3	78
2	3	1	1	4	3	3	3	4	3	77
2	4	2	1	3	4	4	3	3	3	80
2	3	2	1	4	3	4	3	4	3	79
2	3	1	1	4	3	3	3	4	3	77
1	4	2	2	3	3	4	3	3	4	78
2	4	2	1	4	4	3	4	4	3	82
4	1	2	3	1	2	4	2	4	2	79
2	4	2	1	3	4	4	3	3	3	80
2	3	2	1	4	3	4	3	4	3	79
2	4	2	1	4	4	3	4	4	3	82
4	2	1	4	1	2	3	1	4	2	78
4	2	2	3	2	1	4	2	4	3	82
3	1	2	4	2	2	3	1	3	4	80
2	3	2	1	4	3	4	3	4	3	79
3	4	2	1	3	4	4	3	3	4	78
67	98	52	43	98	96	109	90	107	95	
2.23	3.27	1.73	1.43	3.27	3.2	3.63	3	3.57	3.17	



# **LAMPIRAN 3**

**TABULASI JAWABAN RESPONDEN**

**KUESIONER PENELITIAN**

**TABULASI JAWABAN RESPONDEN UNTUK KUESIONER  
VARIABEL RELOKASI MASYARAKAT (X<sub>1</sub>)**

RESPONDEN	PERNYATAAN																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	3	3	4	3	4	4	3	2	4	1	3	3	2	1	1	1	3
2	4	3	4	3	3	4	4	4	4	2	4	4	1	2	2	1	4
3	4	3	3	3	4	3	4	2	3	1	3	3	2	2	2	2	3
4	3	4	4	4	3	4	3	2	4	2	4	4	3	2	2	2	4
5	4	3	4	3	4	4	3	2	4	2	3	3	2	1	1	2	3
6	4	3	4	3	3	4	4	4	4	2	4	4	1	2	1	1	4
7	3	3	4	4	4	3	4	1	3	1	3	3	1	2	1	2	3
8	3	4	3	4	3	4	3	1	4	2	4	4	2	1	2	1	3
9	4	3	4	3	4	3	4	2	3	1	3	4	2	2	2	2	4
10	3	4	3	4	3	4	3	1	4	2	4	4	2	1	1	1	3
11	4	3	4	3	4	4	3	2	4	2	3	3	2	1	1	2	3
12	4	3	4	3	3	4	4	4	4	2	4	4	1	2	2	1	4
13	3	3	4	4	4	3	4	1	3	1	3	3	1	2	2	2	3
14	3	4	3	4	3	4	3	1	4	2	4	4	2	1	2	1	3
15	4	3	4	3	4	3	4	2	3	1	3	4	2	2	1	2	4
16	3	4	3	4	3	4	3	1	4	2	4	3	2	1	1	1	3
17	4	3	4	3	4	4	3	2	4	2	3	3	2	1	1	2	3
18	3	4	3	4	3	4	3	1	4	2	4	4	2	1	2	1	3
19	4	3	4	3	4	3	4	2	3	1	3	4	2	2	2	2	4
20	3	4	3	4	3	4	3	1	4	2	4	4	2	1	1	1	3
21	4	3	4	3	4	4	3	2	4	2	3	3	2	2	1	2	4
22	4	3	4	3	3	4	4	4	4	2	4	4	1	2	2	1	4
23	3	3	4	4	4	3	4	1	3	1	3	3	1	2	2	2	3
24	3	4	3	4	3	4	3	1	4	2	4	4	2	1	2	1	3
25	3	4	3	4	3	4	3	1	4	2	4	4	2	1	1	1	3
26	4	3	4	3	4	4	3	2	4	2	3	3	2	1	1	2	3
27	4	3	4	3	3	4	4	4	4	2	4	4	1	2	1	1	4
28	3	3	4	4	4	3	4	1	3	1	3	3	1	2	2	2	3
29	3	4	3	4	3	4	3	1	4	2	4	4	2	1	2	1	3
30	4	4	4	3	4	3	4	2	3	1	4	4	1	2	1	2	4
31	4	3	4	3	4	4	3	2	4	1	3	3	2	1	1	1	3
32	3	3	4	3	3	4	4	4	4	2	4	4	1	2	2	1	4
33	3	3	3	3	4	3	4	2	3	1	3	3	2	2	2	2	3
34	4	4	4	4	3	4	3	2	4	2	4	4	3	2	2	2	4
35	3	3	4	3	4	4	3	2	4	2	3	3	2	1	1	2	3
36	4	3	4	3	3	4	4	4	4	2	4	4	1	2	1	1	4
37	4	3	4	4	4	3	4	1	3	1	3	3	1	2	1	2	3
38	3	4	3	4	3	4	3	1	4	2	4	4	2	1	2	1	3
39	3	3	4	3	4	3	4	2	3	1	3	4	2	2	2	2	4
40	4	4	3	4	3	4	3	1	4	2	4	4	2	1	1	1	3
41	3	3	4	3	4	4	3	2	4	2	3	3	2	1	1	2	3
42	4	3	4	3	3	4	4	4	4	2	4	4	1	2	2	1	4
43	3	3	4	4	4	3	4	1	3	1	3	3	1	2	2	2	3
44	3	4	3	4	3	4	3	1	4	2	4	4	2	1	2	1	3
45	4	3	4	3	4	3	4	2	3	1	3	4	2	2	1	2	4
46	3	4	3	4	3	4	3	1	4	2	4	3	2	1	1	1	3
47	4	3	4	3	4	4	3	2	4	2	3	3	2	1	1	2	3
48	4	4	3	4	3	4	3	1	4	2	4	4	2	1	2	1	3
49	3	3	4	3	4	3	4	2	3	1	3	4	2	2	2	2	4
50	3	4	3	4	3	4	3	1	4	2	4	4	2	1	1	1	3
51	3	3	4	3	4	4	3	2	4	2	3	3	2	2	1	2	4
52	4	3	4	3	3	4	4	4	4	2	4	4	1	2	2	1	4

PERNYATAAN						
18	19	20	21	22	23	24
1	2	2	2	3	2	4
2	1	2	2	4	2	3
2	2	1	2	3	2	4
2	3	2	1	3	2	4
2	2	3	2	4	2	3
2	1	2	2	4	2	3
1	2	1	2	3	1	4
1	2	2	1	3	2	4
2	2	1	2	4	2	3
1	4	2	1	3	3	4
2	2	3	2	4	2	3
2	1	2	2	4	2	3
2	2	1	2	3	1	4
1	2	2	1	3	2	4
2	2	1	2	4	2	3
1	4	2	1	3	3	4
2	2	3	2	4	2	3
1	2	2	1	3	2	4
2	2	1	2	4	2	3
1	4	2	1	3	3	4
2	2	3	2	4	2	3
2	1	2	2	4	2	3
2	2	1	2	3	1	4
1	2	2	1	3	2	3
1	2	2	1	3	2	4
2	2	3	2	4	2	3
2	1	2	2	4	2	3
1	2	1	2	3	1	4
1	2	2	1	3	2	4
2	2	1	2	4	2	3
1	2	2	2	3	2	4
2	1	2	2	4	2	3
2	2	1	2	3	2	4
2	2	1	2	3	1	4
1	2	2	1	3	2	4
2	2	1	2	4	2	3
1	4	2	1	3	3	4
2	2	3	2	4	2	3
2	1	2	2	4	2	3
2	2	1	2	3	1	4
1	2	2	1	3	2	4
2	2	1	2	4	2	3
1	4	2	1	3	3	4
2	2	3	2	4	2	3
1	2	2	1	3	2	4
2	2	1	2	4	2	3
1	4	2	1	3	3	4
2	2	3	2	4	2	3
1	2	2	1	3	2	4
2	2	1	2	4	2	3
1	4	2	1	3	3	4
2	2	3	2	4	2	3
1	2	2	1	3	2	4
2	2	1	2	4	2	3
1	4	2	1	3	3	4
2	2	3	2	4	2	3
2	1	2	2	4	2	3

RESPONDEN	PERNYATAAN																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
53	4	3	4	4	4	3	4	1	3	1	3	3	1	2	2	2	3
54	3	4	3	4	3	4	3	1	4	2	4	4	2	1	2	1	3
55	3	4	3	4	3	4	3	1	4	2	4	4	2	1	1	1	3
56	4	3	4	3	4	4	3	2	4	2	3	3	2	1	1	2	3
57	4	3	4	3	4	4	4	4	4	2	4	4	1	2	1	1	4
58	3	3	4	4	4	3	4	1	3	1	3	3	1	2	2	2	3
59	3	4	3	4	3	4	3	1	4	2	4	4	2	1	2	1	3
60	4	4	4	3	4	3	4	2	3	1	4	4	1	2	1	2	4
61	3	3	4	3	4	4	3	2	4	1	3	3	2	1	1	1	3
62	3	3	4	3	3	4	4	4	4	2	4	4	1	2	2	1	4
63	4	3	3	3	4	3	4	2	3	1	3	3	2	2	2	2	3
64	3	4	4	4	3	4	3	2	4	2	4	4	3	2	2	2	4
65	4	3	4	3	4	4	3	2	4	2	3	3	2	1	1	2	3
66	4	3	4	3	3	4	4	4	4	2	4	4	1	2	1	1	4
67	3	3	4	4	4	3	4	1	3	1	3	3	1	2	1	2	3
68	3	4	3	4	3	4	3	1	4	2	4	4	2	1	2	1	3
69	3	3	4	3	4	3	4	2	3	1	3	4	2	2	2	2	4
70	4	4	3	4	3	4	3	1	4	2	4	4	2	1	1	1	3
71	4	3	4	3	4	4	3	2	4	2	3	3	2	1	1	2	3
72	3	3	4	3	3	4	4	4	4	2	4	4	1	2	2	1	4
73	3	3	4	4	4	3	4	1	3	1	3	3	1	2	2	2	3
74	4	4	3	4	3	4	3	1	4	2	4	4	2	1	2	1	3
75	4	3	4	3	4	3	4	2	3	1	3	4	2	2	1	2	4
76	3	4	3	4	3	4	3	1	4	2	4	3	2	1	1	1	3
77	4	3	4	3	4	4	3	2	4	2	3	3	2	1	1	2	3
78	3	4	3	4	3	4	3	1	4	2	4	4	2	1	2	1	3
79	3	3	4	3	4	3	4	2	3	1	3	4	2	2	2	2	4
80	3	4	3	4	3	4	3	1	4	2	4	4	2	1	1	1	3
81	4	3	4	3	4	4	3	2	4	2	3	3	2	2	1	2	4
82	4	3	4	3	3	4	4	4	4	2	4	4	1	2	2	1	4
83	3	3	4	4	4	3	4	1	3	1	3	3	1	2	2	2	3
84	3	4	3	4	3	4	3	1	4	2	4	4	2	1	2	1	3
85	4	4	3	4	3	4	3	1	4	2	4	4	2	1	1	1	3
86	4	3	4	3	4	4	3	2	4	2	3	3	2	1	1	2	3
87	3	3	4	3	3	4	4	4	4	2	4	4	1	2	1	1	4
88	4	3	4	4	4	3	4	1	3	1	3	3	1	2	2	2	3
89	3	4	3	4	3	4	3	1	4	2	4	4	2	1	2	1	3
90	3	4	4	3	4	3	4	2	3	1	4	4	1	2	1	2	4
91	3	3	4	4	3	3	3	1	4	2	4	4	2	1	1	1	3
92	4	4	3	3	4	4	3	2	4	2	3	3	2	2	1	2	4
93	4	3	4	3	3	4	4	4	4	2	4	4	1	2	2	1	4
94	3	3	3	4	4	4	4	1	3	1	3	3	1	2	2	2	3
95	3	3	4	4	3	3	3	1	4	2	4	4	2	1	2	1	3
96	4	4	4	4	4	4	3	1	4	2	4	4	2	1	1	1	3
97	4	4	4	3	3	4	3	2	4	2	3	3	2	1	1	2	3
98	3	3	3	3	3	4	4	4	4	2	4	4	1	2	1	1	4
99	2	3	3	4	4	4	4	1	3	1	3	3	1	2	2	2	3
100	4	3	4	4	3	3	3	1	4	2	4	4	2	1	2	1	3
TOTAL	347	338	369	352	354	376	353	197	380	178	365	372	182	167	165	165	356
MEAN	3.44	3.35	3.65	3.49	3.5	3.72	3.5	1.95	3.76	1.76	3.61	3.68	1.8	1.65	1.63	1.63	3.49
Skor Indikator	2686								2330								
Rata-rata Indikator	335.75								258.89								
Prosentase	39.70								30.61								
Dimensi Indikator	Tempat Asal								Tempat Tujuan								

PERNYATAAN						
18	19	20	21	22	23	24
2	2	1	2	3	1	4
1	2	2	1	3	2	3
1	2	2	1	3	2	4
2	2	3	2	4	2	3
2	1	2	2	4	2	3
1	2	1	2	3	1	4
1	2	2	1	3	2	4
2	2	1	2	4	2	3
1	2	2	2	3	2	4
2	1	2	2	4	2	3
2	2	1	2	3	2	4
2	3	2	1	3	2	4
2	2	3	2	4	2	3
2	1	2	2	4	2	3
1	2	1	2	3	1	4
1	2	2	1	3	2	4
2	2	1	2	4	2	3
1	4	2	1	3	3	4
2	2	3	2	4	2	3
2	1	2	2	4	2	3
2	2	1	2	3	1	4
1	2	2	1	3	2	4
2	2	1	2	4	2	3
1	4	2	1	3	3	4
2	2	3	2	4	2	3
1	2	2	1	3	2	4
2	2	1	2	4	2	3
1	4	2	1	3	3	4
2	2	3	2	4	2	3
1	2	2	1	3	2	4
2	2	1	2	4	2	3
1	4	2	1	3	3	4
2	2	3	2	4	2	3
2	1	2	2	4	2	3
2	2	1	2	3	1	4
1	2	2	1	3	2	3
1	2	2	1	3	2	4
2	2	3	2	4	2	3
2	1	2	2	4	2	3
1	2	1	2	3	1	4
1	2	2	1	3	2	4
2	2	3	2	4	2	3
2	1	2	2	4	2	3
1	2	1	2	3	1	4
1	2	2	1	3	2	4
2	2	3	2	4	2	3
2	1	2	2	4	2	3
1	2	1	2	3	1	4
1	2	2	1	3	2	4
177	225	208	187	368	219	374
1.75	2.23	2.06	1.85	3.64	2.17	3.7
1758						
251.14						
29.69						
Aturan Peruntukan						

**TABULASI JAWABAN RESPONDEN UNTUK KUESIONER  
VARIABEL TAAT HUKUM (X<sub>1</sub>)**

RESPONDEN	PERNYATAAN													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	4	2	3	2	3	4	4	3	4	4	3	3	2	4
2	3	4	4	4	2	3	4	3	4	3	4	4	3	4
3	4	4	3	3	3	4	3	4	3	4	4	3	4	3
4	4	2	3	3	2	3	4	4	2	2	4	4	3	4
5	3	4	3	4	2	4	3	4	3	4	3	3	4	3
6	3	4	4	4	2	3	4	3	3	3	4	4	3	4
7	4	3	3	4	2	4	3	4	4	4	3	3	4	4
8	4	3	4	4	2	4	3	4	4	4	3	4	4	4
9	4	2	3	3	2	3	4	4	2	2	4	4	3	4
10	3	4	3	4	2	4	3	4	3	4	3	3	4	3
11	3	4	4	4	2	3	4	3	3	3	4	4	3	4
12	3	4	4	4	2	3	4	3	3	3	4	4	3	4
13	4	3	3	3	2	4	3	4	4	4	3	3	4	4
14	3	4	4	4	2	3	4	3	4	3	4	4	3	4
15	4	4	3	3	2	4	4	3	4	3	4	3	4	3
16	4	3	4	4	2	3	4	3	4	3	4	4	3	3
17	4	4	3	3	2	4	4	3	4	3	4	3	4	3
18	3	4	4	4	2	3	4	3	3	3	4	4	3	4
19	4	3	3	3	2	4	3	4	4	4	3	3	4	4
20	3	4	4	4	2	3	4	3	4	3	4	4	3	4
21	3	4	3	3	2	4	4	3	4	4	4	3	4	3
22	4	2	4	3	2	3	4	4	2	2	4	4	3	4
23	3	4	3	4	2	4	3	4	3	4	3	3	4	3
24	3	4	4	4	2	3	4	3	3	3	4	4	3	4
25	3	4	4	4	2	3	4	3	3	3	4	4	3	4
26	3	4	4	4	2	3	4	3	3	3	4	4	3	4
27	4	2	3	3	2	4	4	4	2	2	4	4	3	4
28	3	4	3	4	2	4	3	4	3	4	3	3	4	3
29	4	4	3	3	2	4	4	3	4	3	4	3	4	3
30	4	2	3	4	2	3	4	4	2	2	4	4	3	4
31	4	2	3	2	3	4	4	3	4	4	3	3	2	4
32	3	4	4	4	2	3	4	3	4	3	4	4	3	4
33	4	4	3	3	3	4	3	4	3	4	4	3	4	3
34	4	2	3	3	2	3	4	4	2	2	4	4	3	4
35	3	4	3	4	2	4	3	4	3	4	3	3	4	3
36	3	4	4	4	2	3	4	3	3	3	4	4	3	4
37	4	3	3	4	2	4	3	4	4	4	3	3	4	4
38	4	3	4	4	2	4	3	4	4	4	3	4	4	4
39	4	2	3	3	2	3	4	4	2	2	4	4	3	4
40	3	4	3	4	2	4	3	4	3	4	3	3	4	3
41	3	4	4	4	2	3	4	3	3	3	4	4	3	4
42	3	4	4	4	2	3	4	3	3	3	4	4	3	4
43	4	3	3	3	2	4	3	4	4	4	3	3	4	4
44	3	4	4	4	2	3	4	3	4	3	4	4	3	4
45	4	4	3	3	2	4	4	3	4	3	4	3	4	3
46	4	3	4	4	2	3	4	3	4	3	4	4	3	3
47	4	4	3	3	2	4	4	3	4	3	4	3	4	3
48	3	4	4	4	2	3	4	3	3	3	4	4	3	4
49	4	3	3	3	2	4	3	4	4	4	3	3	4	4
50	3	4	4	4	2	3	4	3	4	3	4	4	3	4
51	3	4	3	3	2	4	4	3	4	4	4	3	4	3
52	4	2	4	3	2	3	4	4	2	2	4	4	3	4

PERNYATAAN						
15	16	17	18	19	20	21
2	3	4	4	4	2	4
2	1	1	2	3	1	4
2	1	2	2	4	2	2
1	2	1	1	4	2	1
1	2	2	1	3	2	2
2	1	1	2	3	1	2
2	2	2	2	4	2	2
2	2	2	2	4	2	2
1	2	1	1	4	2	1
1	2	2	1	3	2	2
2	1	1	2	3	1	2
2	2	1	3	4	2	2
2	2	2	2	4	2	3
2	2	1	2	3	2	4
2	1	2	2	3	2	3
2	2	2	2	3	2	4
2	1	2	2	3	2	2
2	2	1	3	4	2	2
2	2	2	2	4	2	2
2	1	1	2	3	1	4
2	2	2	2	4	2	2
1	2	1	2	4	2	2
2	2	2	2	3	2	4
2	1	2	2	3	2	2
2	1	2	2	3	1	4
2	1	1	2	3	1	2
2	2	2	1	4	2	3
1	2	2	2	3	1	4
2	1	2	2	3	2	3
1	2	2	2	4	2	4
2	3	4	4	4	2	4
2	1	1	2	3	1	4
2	1	2	2	4	2	2
1	2	1	1	4	2	1
1	2	2	1	3	2	2
2	1	1	2	3	1	2
2	2	2	2	4	2	2
2	2	2	2	4	2	2
1	2	1	1	4	2	1
1	2	2	1	3	2	2
2	1	1	2	3	1	2
2	2	1	3	4	2	2
2	2	2	2	4	2	3
2	2	1	2	3	2	4
2	1	2	2	3	2	3
2	2	2	2	3	2	4
2	1	2	2	3	2	2
2	2	1	3	4	2	2
2	2	2	2	4	2	2
2	1	1	2	3	1	4
2	2	2	2	4	2	2
1	2	1	2	4	2	2

RESPONDEN	PERNYATAAN													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
53	3	4	3	4	2	4	3	4	3	4	3	3	4	3
54	3	4	4	4	2	3	4	3	3	3	4	4	3	4
55	3	4	4	4	2	3	4	3	3	3	4	4	3	4
56	3	4	4	4	2	3	4	3	3	3	4	4	3	4
57	4	2	3	3	2	4	4	4	2	2	4	4	3	4
58	3	4	3	4	2	4	3	4	3	4	3	3	4	3
59	4	4	3	3	2	4	4	3	4	3	4	3	4	3
60	4	2	3	4	2	3	4	4	2	2	4	4	3	4
61	4	2	3	2	3	4	4	3	4	4	3	3	2	4
62	3	4	4	4	2	3	4	3	4	3	4	4	3	4
63	4	4	3	3	3	4	3	4	3	4	4	3	4	3
64	4	2	3	3	2	3	4	4	2	2	4	4	3	4
65	3	4	3	4	2	4	3	4	3	4	3	3	4	3
66	3	4	4	4	2	3	4	3	3	3	4	4	3	4
67	4	3	3	4	2	4	3	4	4	4	3	3	4	4
68	4	3	4	4	2	4	3	4	4	4	3	4	4	4
69	4	2	3	3	2	3	4	4	2	2	4	4	3	4
70	3	4	3	4	2	4	3	4	3	4	3	3	4	3
71	3	4	4	4	2	3	4	3	3	3	4	4	3	4
72	3	4	4	4	2	3	4	3	3	3	4	4	3	4
73	4	3	3	3	2	4	3	4	4	4	3	3	4	4
74	3	4	4	4	2	3	4	3	4	3	4	4	3	4
75	4	4	3	3	2	4	4	3	4	3	4	3	4	3
76	4	3	4	4	2	3	4	3	4	3	4	4	3	3
77	4	4	3	3	2	4	4	3	4	3	4	3	4	3
78	3	4	4	4	2	3	4	3	3	3	4	4	3	4
79	4	3	3	3	2	4	3	4	4	4	3	3	4	4
80	3	4	4	4	2	3	4	3	4	3	4	4	3	4
81	3	4	3	3	2	4	4	3	4	4	4	3	4	3
82	4	2	4	3	2	3	4	4	2	2	4	4	3	4
83	3	4	3	4	2	4	3	4	3	4	3	3	4	3
84	3	4	4	4	2	3	4	3	3	3	4	4	3	4
85	3	4	4	4	2	3	4	3	3	3	4	4	3	4
86	3	4	4	4	2	3	4	3	3	3	4	4	3	4
87	4	2	3	3	2	4	4	4	2	2	4	4	3	4
88	3	4	3	4	2	4	3	4	3	4	3	3	4	3
89	4	4	3	3	2	4	4	3	4	3	4	3	4	3
90	4	2	3	4	2	3	4	4	2	2	4	4	3	4
91	3	4	4	4	2	3	4	3	4	3	4	4	3	4
92	3	4	3	3	2	4	4	3	4	4	4	3	4	3
93	4	2	4	3	2	3	4	4	2	2	4	4	3	4
94	3	4	3	4	2	4	3	4	3	4	3	3	4	3
95	3	4	4	4	2	3	4	3	3	3	4	4	3	4
96	3	4	4	4	2	3	4	3	3	3	4	4	3	4
97	3	4	4	4	2	3	4	3	3	3	4	4	3	4
98	4	2	3	3	2	4	4	4	2	2	4	4	3	4
99	3	4	3	4	2	4	3	4	3	4	3	3	4	3
100	4	4	3	3	2	4	4	3	4	3	4	3	4	3
TOTAL	349	347	347	361	211	356	378	354	334	329	382	369	353	380
MEAN	3.46	3.44	3.44	3.57	2.09	3.52	3.74	10	3.31	3.26	3.78	3.65	3.5	3.76
Skor Indikator	2349							2501						
Rata-rata Indikator	335.57							357.29						
Prosentase	36.28							38.63						
Dimensi Indikator	Aturan Pemerintah							Reward						

PERNYATAAN						
15	16	17	18	19	20	21
2	2	2	2	3	2	4
2	1	2	2	3	2	2
2	1	2	2	3	1	4
2	1	1	2	3	1	2
2	2	2	1	4	2	3
1	2	2	2	3	1	4
2	1	2	2	3	2	3
1	2	2	2	4	2	4
2	3	4	4	4	2	4
2	1	1	2	3	1	4
2	1	2	2	4	2	2
1	2	1	1	4	2	1
1	2	2	1	3	2	2
2	1	1	2	3	1	2
2	2	2	2	4	2	2
2	2	2	2	4	2	2
1	2	1	1	4	2	1
1	2	2	1	3	2	2
2	1	1	2	3	1	2
2	2	1	3	4	2	2
2	2	2	2	4	2	3
2	2	1	2	3	2	4
2	1	2	2	3	2	3
2	2	2	2	3	2	4
2	1	2	2	3	2	2
2	2	1	3	4	2	2
2	2	2	2	4	2	2
2	1	1	2	3	1	4
2	2	2	2	4	2	2
1	2	1	2	4	2	2
2	2	2	2	3	2	4
2	1	2	2	3	2	2
2	1	2	2	3	1	4
2	1	1	2	3	1	2
2	2	2	1	4	2	3
1	2	2	2	3	1	4
2	1	2	2	3	2	3
1	2	2	2	4	2	4
2	1	1	2	3	1	4
2	2	2	2	4	2	2
1	2	1	2	4	2	2
2	2	2	2	3	2	4
2	1	2	2	3	2	2
2	1	2	2	3	1	4
2	1	1	2	3	1	2
2	2	2	1	4	2	3
1	2	2	2	3	1	4
2	1	2	2	3	2	3
192	181	187	214	364	195	291
1.9	1.79	1.85	2.12	3.6	1.93	2.88
1624						
232						
25.08						
Punishment						

**TABULASI JAWABAN RESPONDEN UNTUK KUESIONER  
VARIABEL HUMAN SECURITY (Y)**

RESPONDEN	PERNYATAAN													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	4	3	4	3	3	2	4	1	4	4	2	2	3	2
2	3	4	3	4	4	1	3	2	3	4	1	1	4	1
3	3	3	3	4	4	2	3	2	3	4	2	1	4	2
4	4	4	3	3	4	1	4	2	3	3	1	2	4	2
5	3	4	4	3	4	2	4	1	3	4	2	2	3	2
6	4	3	3	3	3	1	3	1	3	4	1	1	3	3
7	4	4	3	4	3	2	3	2	4	3	2	2	4	2
8	4	3	4	3	3	2	4	1	4	4	2	2	3	2
9	4	3	4	3	3	2	4	1	4	4	2	2	3	2
10	3	4	3	4	4	1	3	2	3	4	1	1	4	1
11	3	3	3	4	4	2	3	2	3	4	2	1	4	2
12	4	4	3	3	4	1	4	2	3	3	1	2	4	2
13	3	4	4	3	4	2	4	1	3	4	2	2	3	2
14	4	3	3	3	3	1	3	1	3	4	1	1	3	3
15	4	4	3	4	3	2	3	2	4	3	2	2	4	2
16	4	3	4	3	3	2	4	1	4	4	2	2	3	2
17	4	4	3	3	4	1	4	2	3	3	1	2	4	2
18	3	4	4	3	4	2	4	1	3	4	2	2	3	2
19	4	3	4	3	3	2	4	1	4	4	2	2	3	2
20	3	4	3	4	4	1	3	2	3	4	1	1	4	1
21	3	3	3	4	4	2	3	2	3	4	2	1	4	2
22	4	2	4	4	3	3	3	4	2	4	2	4	3	4
23	4	4	3	3	4	1	4	2	3	3	1	2	4	2
24	3	4	4	3	4	2	4	1	3	4	2	2	3	2
25	3	3	3	4	4	2	3	2	3	4	2	1	4	2
26	3	4	4	3	4	4	3	4	3	1	3	4	3	4
27	4	2	3	4	3	4	4	4	2	4	2	4	3	4
28	3	4	3	4	4	4	4	3	3	2	4	3	4	3
29	3	4	4	3	4	2	4	1	3	4	2	2	3	2
30	4	3	3	3	3	1	3	1	3	4	1	1	3	3
31	4	3	4	3	3	2	4	1	4	4	2	2	3	2
32	3	4	3	4	4	1	3	2	3	4	1	1	4	1
33	3	3	3	4	4	2	3	2	3	4	2	1	4	2
34	4	4	3	3	4	1	4	2	3	3	1	2	4	2
35	3	4	4	3	4	2	4	1	3	4	2	2	3	2
36	4	3	3	3	3	1	3	1	3	4	1	1	3	3
37	4	4	3	4	3	2	3	2	4	3	2	2	4	2
38	4	3	4	3	3	2	4	1	4	4	2	2	3	2
39	4	3	4	3	3	2	4	1	4	4	2	2	3	2
40	3	4	3	4	4	1	3	2	3	4	1	1	4	1
41	3	3	3	4	4	2	3	2	3	4	2	1	4	2
42	4	4	3	3	4	1	4	2	3	3	1	2	4	2
43	3	4	4	3	4	2	4	1	3	4	2	2	3	2
44	4	3	3	3	3	1	3	1	3	4	1	1	3	3
45	4	4	3	4	3	2	3	2	4	3	2	2	4	2
46	4	3	4	3	3	2	4	1	4	4	2	2	3	2
47	4	4	3	3	4	1	4	2	3	3	1	2	4	2
48	3	4	4	3	4	2	4	1	3	4	2	2	3	2
49	4	3	4	3	3	2	4	1	4	4	2	2	3	2
50	3	4	3	4	4	1	3	2	3	4	1	1	4	1
51	3	3	3	4	4	2	3	2	3	4	2	1	4	2
52	4	2	4	4	3	3	3	4	2	4	2	4	3	4

PERNYATAAN							
15	16	17	18	19	20	21	22
1	1	4	3	3	3	4	3
2	2	3	3	4	3	3	4
2	1	4	4	3	4	4	3
2	1	3	4	4	3	3	3
2	1	4	3	4	3	4	3
2	1	3	4	4	3	3	4
1	1	3	3	4	4	3	3
1	1	4	3	3	3	4	3
1	1	4	3	3	3	4	3
2	2	3	3	4	3	3	4
2	1	4	4	3	4	4	3
2	1	3	4	4	3	3	3
2	1	4	3	4	3	4	3
2	1	3	4	4	3	3	4
1	1	3	3	4	4	3	3
1	1	4	3	3	3	4	3
2	1	3	4	4	3	3	3
2	1	4	3	4	3	4	3
1	1	4	3	3	3	4	3
2	2	3	3	4	3	3	4
2	1	4	4	3	4	4	3
2	3	1	2	4	2	4	2
2	1	3	4	4	3	3	3
2	1	4	3	4	3	4	3
2	1	4	4	3	4	4	3
1	4	1	2	3	1	4	2
2	3	2	1	4	2	4	3
2	4	2	2	3	1	3	4
2	1	4	3	4	3	4	3
2	1	3	4	4	3	3	4
1	1	4	3	3	3	4	3
2	2	3	3	4	3	3	4
2	1	4	4	3	4	4	3
2	1	3	4	4	3	3	3
2	1	4	3	4	3	4	3
2	1	3	4	4	3	3	4
1	1	3	3	4	4	3	3
1	1	4	3	3	3	4	3
1	1	4	3	3	3	4	3
2	2	3	3	4	3	3	4
2	1	4	4	3	4	4	3
2	1	3	4	4	3	3	3
2	1	4	3	4	3	4	3
2	1	3	4	4	3	3	4
1	1	3	3	4	4	3	3
1	1	4	3	3	3	4	3
2	1	3	4	4	3	3	4
2	1	4	4	3	4	4	3
2	1	3	4	4	3	3	3
2	1	3	4	4	3	3	4
1	1	3	3	4	4	3	3
1	1	4	3	3	3	4	3
2	1	3	4	4	3	3	3
2	1	4	3	4	3	4	3
1	1	4	3	3	3	4	3
2	2	3	3	4	3	3	4
2	1	4	4	3	4	4	3
2	3	1	2	4	2	4	2

RESPONDEN	PERNYATAAN													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
53	4	4	3	3	4	1	4	2	3	3	1	2	4	2
54	3	4	4	3	4	2	4	1	3	4	2	2	3	2
55	3	3	3	4	4	2	3	2	3	4	2	1	4	2
56	3	4	4	3	4	4	3	4	3	1	3	4	3	4
57	4	2	3	4	3	4	4	4	2	4	2	4	3	4
58	3	4	3	4	4	4	4	3	3	2	4	3	4	3
59	3	4	4	3	4	2	4	1	3	4	2	2	3	2
60	4	3	3	3	3	1	3	1	3	4	1	1	3	3
61	4	3	4	3	3	2	4	1	4	4	2	2	3	2
62	3	4	3	4	4	1	3	2	3	4	1	1	4	1
63	3	3	3	4	4	2	3	2	3	4	2	1	4	2
64	4	4	3	3	4	1	4	2	3	3	1	2	4	2
65	3	4	4	3	4	2	4	1	3	4	2	2	3	2
66	4	3	3	3	3	1	3	1	3	4	1	1	3	3
67	4	4	3	4	3	2	3	2	4	3	2	2	4	2
68	4	3	4	3	3	2	4	1	4	4	2	2	3	2
69	4	3	4	3	3	2	4	1	4	4	2	2	3	2
70	3	4	3	4	4	1	3	2	3	4	1	1	4	1
71	3	3	3	4	4	2	3	2	3	4	2	1	4	2
72	4	4	3	3	4	1	4	2	3	3	1	2	4	2
73	3	4	4	3	4	2	4	1	3	4	2	2	3	2
74	4	3	3	3	3	1	3	1	3	4	1	1	3	3
75	4	4	3	4	3	2	3	2	4	3	2	2	4	2
76	4	3	4	3	3	2	4	1	4	4	2	2	3	2
77	4	4	3	3	4	1	4	2	3	3	1	2	4	2
78	3	4	4	3	4	2	4	1	3	4	2	2	3	2
79	4	3	4	3	3	2	4	1	4	4	2	2	3	2
80	3	4	3	4	4	1	3	2	3	4	1	1	4	1
81	3	3	3	4	4	2	3	2	3	4	2	1	4	2
82	4	2	4	4	3	3	3	4	2	4	2	4	3	4
83	4	4	3	3	4	1	4	2	3	3	1	2	4	2
84	3	4	4	3	4	2	4	1	3	4	2	2	3	2
85	3	3	3	4	4	2	3	2	3	4	2	1	4	2
86	3	4	4	3	4	4	3	4	3	1	3	4	3	4
87	4	2	3	4	3	4	4	4	2	4	2	4	3	4
88	3	4	3	4	4	4	4	3	3	2	4	3	4	3
89	3	4	4	3	4	2	4	1	3	4	2	2	3	2
90	4	3	3	3	3	1	3	1	3	4	1	1	3	3
91	3	4	3	4	4	1	3	2	3	4	1	1	4	1
92	3	3	3	4	4	2	3	2	3	4	2	1	4	2
93	4	2	4	4	3	3	3	4	2	4	2	4	3	4
94	4	4	3	3	4	1	4	2	3	3	1	2	4	2
95	3	4	4	3	4	2	4	1	3	4	2	2	3	2
96	3	3	3	4	4	2	3	2	3	4	2	1	4	2
97	3	4	4	3	4	4	3	4	3	1	3	4	3	4
98	4	2	3	4	3	4	4	4	2	4	2	4	3	4
99	3	4	3	4	4	4	4	3	3	2	4	3	4	3
100	3	4	4	3	4	2	4	1	3	4	2	2	3	2
TOTAL	352	348	343	346	367	202	360	195	322	371	191	207	360	241
MEAN	3.49	3.45	3.4	3.43	3.63	2	3.56	1.93	3.19	3.67	1.89	2.05	3.56	2.39
Skor Indikator	2513								1692					
Rata-rata Indikator	314.13								282					
Prosentase	34.84								31.28					
Dimensi Indikator	Keamanan Lingkungan								Keamanan Individu					

PERNYATAAN							
15	16	17	18	19	20	21	22
2	1	3	4	4	3	3	3
2	1	4	3	4	3	4	3
2	1	4	4	3	4	4	3
1	4	1	2	3	1	4	2
2	3	2	1	4	2	4	3
2	4	2	2	3	1	3	4
2	1	4	3	4	3	4	3
2	1	3	4	4	3	3	4
1	1	4	3	3	3	4	3
2	2	3	3	4	3	3	4
2	1	4	4	3	4	4	3
2	1	3	4	4	3	3	3
2	1	4	3	4	3	4	3
2	1	3	4	4	3	3	4
1	1	3	3	4	4	3	3
1	1	4	3	3	3	4	3
1	1	4	3	3	3	4	3
2	2	3	3	4	3	3	4
2	1	4	4	3	4	4	3
2	1	3	4	4	3	3	3
2	1	4	3	4	3	4	3
2	1	3	4	4	3	3	4
1	1	3	3	4	4	3	3
1	1	4	3	3	3	4	3
2	1	3	4	4	3	3	3
2	1	4	3	4	3	4	3
1	1	4	3	3	3	4	3
2	2	3	3	4	3	3	4
2	1	4	4	3	4	4	3
2	3	1	2	4	2	4	2
2	1	3	4	4	3	3	3
2	1	4	3	4	3	4	3
2	1	4	4	3	4	4	3
1	4	1	2	3	1	4	2
2	3	2	1	4	2	4	3
2	4	2	2	3	1	3	4
2	1	4	3	4	3	4	3
2	1	3	4	4	3	3	4
2	2	3	3	4	3	3	4
2	1	4	4	3	4	4	3
2	3	1	2	4	2	4	2
2	1	3	4	4	3	3	3
2	1	4	3	4	3	4	3
2	1	4	4	3	4	4	3
1	4	1	2	3	1	4	2
2	3	2	1	4	2	4	3
2	4	2	2	3	1	3	4
2	1	4	3	4	3	4	3
190	166	339	334	382	316	379	337
1.88	1.64	3.36	3.31	3.78	3.13	3.75	3.34
							2443
							305.38
							33.87
Kesejahteraan							

NILAI-NILAI  $r$  PRODUCT MOMENT

N	Taraf	Signif	N	Taraf	Signif	N	Taraf	Signif
	5 %	1 %		5 %	1 %		5 %	1 %
3	0,997	0,999	26	0,388	0,496	55	0,266	0,345
4	0,950	0,990	27	0,381	0,487	60	0,254	0,330
5	0,878	0,959	28	0,374	0,478	65	0,244	0,317
			29	0,367	0,470	70	0,235	0,306
6	0,811	0,917	30	0,361	0,463	75	0,227	0,296
7	0,754	0,874						
8	0,707	0,834	31	0,355	0,458	80	0,220	0,288
9	0,666	0,795	32	0,349	0,449	85	0,213	0,278
10	0,632	0,765	33	0,344	0,442	90	0,207	0,270
			34	0,339	0,436	95	0,202	0,263
11	0,602	0,735	35	0,334	0,430	100	0,195	0,256
12	0,576	0,708						
13	0,553	0,684	36	0,329	0,424	125	0,176	0,230
14	0,532	0,661	37	0,325	0,418	150	0,159	0,210
15	0,514	0,641	38	0,320	0,413	175	0,148	0,194
			39	0,316	0,408	200	0,138	0,181
16	0,497	0,623	40	0,312	0,403	300	0,113	0,148
17	0,482	0,606						
18	0,468	0,590	41	0,308	0,398	400	0,098	0,128
19	0,456	0,575	42	0,304	0,393	500	0,088	0,115
20	0,444	0,561	43	0,301	0,389			
			44	0,297	0,334	600	0,080	0,105
21	0,433	0,549	45	0,294	0,380	700	0,074	0,097
22	0,423	0,537						
23	0,413	0,526	46	0,291	0,376	800	0,070	0,091
24	0,404	0,515	47	0,288	0,372	900	0,065	0,086
25	0,396	0,505	48	0,284	0,368			
			49	0,281	0,364	1000	0,062	0,081
			50	0,279	0,361			

Sumber : Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung. CV. Alfabeta. Edisi ke-6. 1999. Hlm.213





PEMERINTAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
KOTAMADYA JAKARTA SELATAN

Jalan Trunojoyo No. 1  
JAKARTA

No.005987

SURAT KETERANGAN

No. : 2117/-1.851.8.

Walikotamadya Jakarta Selatan menerangkan bahwa sesuai permohonan dari : Universitas Indonesia Program Pasca Sarjana Kajian Ketahanan Nasional, serta rekomendasi dari Kantor Kesbang dan Politik Kota Adm Jaksel Nomor 348/-1.851.85 tanggal 11 Agustus 2010.

Nama : ARIFIN MUKLIS

Tempat/Tanggal Lahir : -

Alamat : Jl. Salemba Raya No. 4 Jakarta 10430 Gedung C-FKG LT.IV

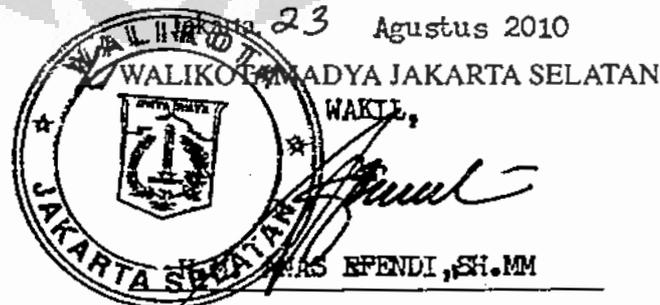
Rektor/Mahasiswa\* dari : Universitas Indonesia

No. Induk Rektor/Mahasiswa\* : 0806448283

mulai tanggal Agustus s.d September 2010 akan mengadakan Permohonan Ijin Survey Penelitian dan Data Tesis dengan Judul : Pengaruh Program Relokasi Masyarakat Terhadap Ketahanan Wilayah (Studi Kasus Penertiban Daerah Aliran Sungai Giliwung DKI Jakarta). lokasi di Kecamatan Tebet Jakarta Selatan.

dengan ketentuan :

1. Para Camat, Lurah, Instansi/Lembaga/Badan, RT dan RW setempat agar memberikan bantuan yang diperlukan.
2. Apabila menyangkut data-data kewilayahan, agar memberitahukan terlebih dahulu kepada Camat dan Lurah yang bersangkutan.
3. Setelah menyelesaikan kegiatan tersebut agar menyampaikan laporan tertulis mengenai hasil pelaksanaan pengumpulan data/observasi/praktek kerja nyata dimaksud, kepada Walikotamadya Jakarta Selatan



NIP. 195904151982021005

Catatan :

- Coret salah satu.



PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN  
KECAMATAN TEBET

**KELURAHAN KEBON BARU**

Jl. Raya Asem Baris 101 Telepon (021) 8319680 Tel/Fax. (021) 8294447  
JAKARTA 12830

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 42 / 1.851.8

Sehubungan dengan Surat Ketua Program PKN Universitas Indonesia Nomor : 324 / PT.02SPS.PKN.PPS / III / 2010 tanggal 4 Agustus 2010 perihal Penelitian Tesis PKN-UI, maka dengan ini Lurah Kebon Baru Kecamatan Tebet Kota Administrasi Jakarta Selatan menerangkan bahwa :

Nama : ARIFIN MUKHLIS  
Alamat : Jl. Salemba Raya No. 4 Jakarta Pusat  
Mahasiswa : Universitas Indonesia  
NPM : 08306448283  
Lokasi Penelitian : Kecamatan Tebet Jakarta Selatan

Akan mengadakan Survey Penelitian dan Data Tesis dengan Judul "PENGARUH RELOKASI MASYARAKAT TERHADAP KETAHANAN WILAYAH " (Study Kasus Penertiban Daerah Aliran Sungai Ciliung DKI Jakarta). dari bulan Agustus sampai dengan bulan September 2010.

Berkaitan dengan hal tersebut maka dengan ini kami mohon kesediaan Saudara untuk berkenan memberikan Data / Informasi yang berkaitan dengan Judul Penelitian seperti tersebut diatas.

Demikian untuk diketahui, atas bantuan dan kerjasama Saudara Saya ucapkan terima kasih.

LURAH KEBON BARU,  
BAMBANG SUHADA, S.Sos  
NIP. 1960012011985031011

Tembusan :

1. Walikota Administrasi Jakarta Selatan
2. Camat Tebet
3. Para Deke! Kelurahan Kebon Baru



PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN  
KECAMATAN PANCORAN

## KELURAHAN PENGADEGAN

Jl. Pengadegan Timur I Telepon : 7970707, J A K A R T A

27 Agustus 2010

Nomor : 202/1.777  
Sifat : Penting  
Lampiran :-  
Hal : Penelitian Tesis S-2 PKN  
UI

Kepada

Yth. 1. Sdr Ketua RW se Kel.  
Pengadegan  
2. Sdr Ketua RT se Kel.  
Pengadegan

di

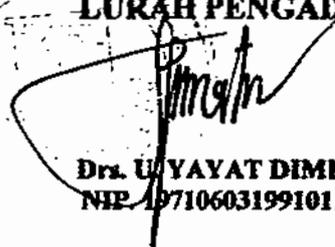
Jakarta

Berdasarkan Surat Keterangan Walikota Administrasi Jakarta Selatan, No.2117/-1.851.8 tanggal 23 Agustus 2010, tentang Izin Survey Penelitian Tesis S-2 PKN-UI kepada Saudara **ARIFIN MUKHLIS** dengan judul : Pengaruh Program Relokasi Masyarakat terhadap Ketahanan Wilayah (Studi Kasus Penertiban Daerah Aliran Sungai Ciliwung DKI Jakarta ), terhitung mulai Agustus sampai dengan September 2010, maka dengan ini kami mohon kepada Para Ketua RW dan RT se Kelurahan Pengadegan agar membantu pelaksanaan kegiatan mahasiswa tersebut.

Demikian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih

Tembusan :

1. Camat Pancoran Kota Administrasi Jakarta Selatan

  
**KELURAHAN PENGADEGAN**  
  
**Dr. U. YAYAT DIMIATI**  
NIP. 197106031991011003